

Mengabdi bagi Negeri









Mengabdi bagi Negeri

25 Tahun Mengabdi bagi Negeri Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

Penanggung Jawab

Riki Frindos

Redaksi

Rika Anggraini, Ali Sofiawan, Agus Prijono

Bahan dan Data

Indra Gunawan, Rony Megawanto, Puspa D. Liman, Irfan Bachtiar, Samedi, Rika Anggraini, Ali Sofiawan, Vidya Nalang, Gita Gemilang, Muhammad Syukur, Ali H. Safari, Basuki Rahmad, Puji Sumedi, Mozaika Hendarti, Edy Sutrisno, Anton Sanjaya, Muhamad Taufik, Ahmad Baihaqi, Gustaaf A. Lumiu, Natalia Monica, Hatijah, Edi Irianto, Ahfi Wahyu Hidayat, Rio Rovihandono, Dwi Pujiyanto, Heri Wiyono, Muhammad Syarifullah.

dar

Terima kasih secara khusus kepada Bapak Emil Salim dan Bapak Ismid Hadad yang mendorong kami untuk menyelesaikan buku ini.

Foto-foto koleksi KEHATI

Diterbitkan:

Yayasan KEHATT Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang Jakarta – Indonesia 12720 Telp: (62-21) – 718 3185 Fax: (62-21) - 719 6131 www.kehati.or.id

Kata Pengantar



Riki Frindos Direktur Eksekutif

Seperempat abad sudah KEHATI mengabdikan diri bagi kelestarian negeri. Ada semburat kebanggaan terhadap capaian-capaian yang diraih KEHATI. Namun, ada juga keresahan yang mendalam akan ketidakberdayaan menyiasati situasi. Dua puluh lima tahun adalah perjalanan yang cukup panjang dengan pembelajaraan yang luar biasa bagi KEHATI, dan saya percaya juga bagi Indonesia.

Buku kecil di tangan Anda ini merupakan catatan kecil perjalanan sejarah KEHATI. Namun ia tidak sekedar kronologi historis. Ia juga sebuah curahan pembelajaran. Curahan pembelajaran dari refleksi, menatap jauh ke belakang dan menoleh lekat-lekat ke dalam. Menelusuri jejak-jejak perjalanan panjang yang terukir pada hijau, biru, dan hitam alam Indonesia, pada senyum dan tangis anak negeri.

Banyak keberhasilan dan perubahan yang membesarkan hati yang ingin didorong KEHATI lebih jauh lagi. Namun, banyak pula pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan seiring dengan tantangan dan dinamika yang senantiasa berkembang di dunia konservasi keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, buku kecil di tangan Anda ini juga sebuah mimpi, dan peta jalan menuju mimpi itu. Yaitu, mimpi KEHATI akan alam yang lestari, untuk manusia kini dan bagi masa depan anak negeri. Mimpi KEHATI akan sebuah negeri, di mana kekayaan dan keindahan keanekaragaman hayatinya senantiasa tumbuh terjaga. Sebuah negeri dimana segenap anak bangsa bergerak bersama melestarikan dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam hayati, secara adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

Seperti dalam perjalanan dua puluh lima tahun terakhir, KEHATI tidak pernah, dan tidak akan bisa, melangkah sendiri. KEHATI senantiasa bergandeng tangan, bergerak bersama dengan ribuan mitra dan berbagai elemen masyarakat. Karena KEHATI adalah bagian dari sebuah gerakan. KEHATI akan terus mengulurkan tangan, menggandeng semua pihak, hingga gerakan ini menjadi arus utama, ketika semua saling bergandeng tangan untuk kehidupan yang berkelanjutan dalam kebersamaan.

Kelak, pelestarian kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia, bukan lagi sebuah himbauan penuh keputusasaan, atau sebaliknya himbauan yang dipaksakan dengan aturan dan kebijakan. Kelak, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara adil, bermartabat, dan berkelanjutan, menjadi bagian tidak terpisahkan dari hidup dan perikehidupan bangsa Indonesia. Ia menjadi nilai-nilai. Ia menjadi norma-norma. Kelak.

Prakata



Emil Salim Pendiri

Dua puluh lima tahun lalu, belum ada lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di bidang keanekaragaman hayati di Indonesia. Saat itu, memang sudah ada lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan hidup, tetapi belum menyentuh keanekaragaman hayati.

Peta pemahaman masih terbatas di kalangan ilmuwan yang memahami keanekaragaman hayati dari sisi ilmu pengetahuan. Sementara itu, di pihak lain, masyarakat lokal memiliki kearifan dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk hidup.

Jadi, ada pakar yang memiliki ilmu pengetahuan, dan ada masyarakat lokal yang belajar dari kearifan lokal untuk memanfaatkan sumber daya hayati. Saat itu, belum ada lembaga penghubung antara masyarakat keilmuan dengan masyarakat lokal dalam konteks keanekaragaman hayati.

Karena itu, ketika ada kesempatan pendanaan dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro, Brazil, pada 1992, fokusnya untuk mengembangkan masyarakat madani dalam bidang keanekaragaman hayati. Cita-cita adalah KEHATI untuk menjembatani antara komunitas keilmuan dengan masyarakat lokal tersebut.

Melalui para ahli biologi, para pendiri KEHATI lantas menggaet lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan yang mau berkiprah dalam keanekaragaman hayati. Dari upaya ini, lambat-laun lahirlah kelompok-kelompok masyarakat yang berkiprah di bidang keanekaragaman hayati.

Upaya menjembatani tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan di daerah tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Selain Indonesia, Brazil mewakili negara kaya keanekaragaman hayati di daratan benua. Jadi, bedanya: Brazil negara kontinen, Indonesia negara kepulauan.

Indonesia dibentuk oleh aktivitas dua lempeng tektonik Asia dan Australia. Lalu, terbentuklah dua biogeografi utama: Di sebelah barat merupakan paparan Sunda, dan di timur membentang paparan Sahul. Di antara keduanya, terdapat wilayah Wallacea yang sama sekali berbeda dengan bagian barat dan timur. Keanekaragaman geologi ini membentuk keanekaragaman ekosistem yang menghidupi berbagai flora, fauna, dan manusia.

Anehnya, Indonesia belum memahami betul kekayaan sumber daya hayatinya. Padahal sumber daya hayati menopang kehidupan manusia Indonesia. Pangan, kesehatan, energi dan air seluruhnya berasal dari keanekaragaman hayati. Cara berpikir Indonesia dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati masih saja memungut dan memanen.

Karena itu, dengan akal budi, keanekaragaman hayati dapat diperkaya nilai tambahnya. Di sinilah peran KEHATI untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, yang kemudian mendampingi masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya hayati. Dengan kapasitasnya, masyarakat sipil mengembangkan kearifan lokal dalam memanfaatkan keanakeragaman hayati. Pemanfaatan itu bukan untuk konsumsi, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Itulah sentuhan yang diberikan KEHATI, yang kemudian disebarkan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, ada lembaga masyarakat sipil, ada sumber daya alam, dan ada pehamanan kearifan lokal dalam mengelola kekayaan hayati.

Jadi, kuncinya adalah peningkatan kapasitas dan pendidikan masyarakat. Dengan akal budi, manusia Indonesia dapat memecahkan segala persoalan hidupnya. Oleh karena itu, KEHATI mendorong lembaga-lembaga swadaya masyarakat agar mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya hayati

Intervensi KEHATI fokus pada pangan, energi, kesehatan dan air, yang menjadi basis kehidupan. Konsep KEHATI bukan hanya memanfaatkan, tapi juga memperkaya nila tambah sumber daya hayati. Itulah modal yang dikembangkan KEHATI selama 25 tahun terakhir.

Memang, kiprah KEHATI yang berfokus pada pangan, energi, kesehatan dan air itu belum berdampak dan belum bersuara. Kapasitas yang dikembangkan KEHATI pun belum memberikan hasil bagi Indonesia.

Dengan demikian, tugas KEHATI ke depan adalah mewujudkan pengalamannya menjadi realitas di Indonesia. Caranya dengan menjalin jaringan di seluruh Tanah Air dengan melibatkan masyarakat lokal. Pengalaman dan pembelajaran KEHATI harus ditransfer ke pihak-pihak lain untuk menjadi motor penggerak konservasi keanekaragaman hayati.

Intinya, mengubah cara berpikir pemanfaatan yang eksploitatif menjadi pemanfaatan dengan memperkaya sumber daya hayati. Dan, modal utamanya adalah akal budi.

Akal budi memiliki kemampuan mencari solusi melampui batas-batas ruang dan waktu. Akal budi bisa membawa seseorang ke tingkat lokal sampai global. Inilah alur logis bagi kalangan muda saat ini, yang harus menatap Indonesia puluhan tahun ke depan.

Dengan akal budinya, generasi masa kini harus menancapkan pandangan ke masa depan. Karena, generasi muda yang akan menghadapi dampak pemanasan global, perubahan iklim, dan punahnya keanekaragaman hayati. Tanpa berpikir sejak saat ini, mereka yang akan merasakan dampak buruknya di masa depan.

Tugas generasi muda Indonesia cukup berat. Demi masa depan yang lebih baik, generasi muda harus berpikir sejak sekarang untuk menangani tantangan yang ada di depan mata itu. Dan, KEHATI harus lebih meningkatkan perannya secara lebih substantial bagi generasi muda. Ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Kelak saat mencapai seratus tahun Indonesia merdeka pada 2045, keadaan keanekaragaman hayati menjadi lebih baik.





Daftar Isi

Kata Pengantar	. V
Prakata	. VI
01 Pendahuluan	. 11
02 Fokus Perjuangan KEHATI	. 21
PERJUANGAN KEHATI	
03 Pendekatan Konservasi KEHATI	. 33
Sekilas Perkembangan Nasional	33
Pendekatan dan Kiprah KEHATI	38
04 Jangkauan Kemitraan KEHATI	. 47
05 Kinerja Pendanaan KEHATI	. 59
Dua Sisi KEHATI	
06 Membumikan Aksi Konservasi	. 79
EKOSISTEM HUTAN	82
EKOSISTEM PERTANIAN	100
EKOSISTEM PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
07 MENATAP MASA DEPAN	. 125
KEHATI dan Target Global Keanekaragaman Hayati	126
KEHATI dan Megatren Global	128
Penutup	133
Daftar Pustaka	. 134





Pendahuluan

Pada Mulanya...

Dua puluh tujuh tahun lalu, perhatian dunia berpaling ke Ric de Janeiro, Brazil. Pada bulan Juni 1992 itu, Perserikatan Bangsa-bangsa menggelar Konferensi Lingkungan dan Pembangunan selama 12 hari. Pertemuan ini populer sebagai Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, atau *Earth Summit*, yang menyatukan 150 kepala negara, kepala pemerintahan, serta berbagai organisasi lingkungan. Dalam konferensi, para pihak membahas berbagai cara untuk melindungi lingkungan dengan pola pembangunan berkelanjutan.

Para pemimpin dunia berunding, dan menghasilkan perjanjian yang mengikat secara hukum, yaitu Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Konvensi Pencegahan Penggurunan. Karena mengikat secara hukum, negara-negara yang bertandatangan wajib mematuhi kesepakatan itu.

Ada juga dokumen tak mengikat: Agenda 21, Deklarasi Rio, dan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Agenda 21 menjelaskan tentang kebijakan yang perlu diambil oleh negara-negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Deklarasi Rio berisi hak dan kewajiban negara berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan. Pernyataan tidak mengikat ini lebih menekankan kerelaan penandatangannya untuk mematuhi norma-norma dalam dokumen.

Pemerintah Indonesia, yang diwakili Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, menandatangani seluruh dokumen konvensi. Saat itu, Presiden Soeharto memimpin delegasi Indonesia, dengan tim perunding dipimpin Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim.



Hanya saja, delegasi Amerika Serikat melecut perdebatan ramai dalam sidang konferensi. Kendati menyetujui program kerja Agenda 21—yang tidak mengikat, delegasi Amerika Serikat, yang dipimpin Presiden George H. W. Bush Sr, tidak menandatangani konvensi—yang mengikat secara legal. Dalihnya, Kongres Amerika Serikat belum menyetujuinya sehingga tidak memberi mandat kepada delegasi untuk menandatangani konvensi.

Posisi Amerika Serikat membuat kesal peserta sidang. Untuk meredam berbagai kecaman, 48 jam sebelum konferensi ditutup, Presiden Bush tiba di Rio. Menyadari kejengkelan peserta konferensi, Presiden Bush mengundang beberapa wakil negara untuk bersantap siang sembari bertukar pikiran.

Dalam kesempatan itu, Presiden Bush menyatakan mendukung sepenuhnya tujuan konvensi. Namun, dalam pelaksanaannya, Presiden Bush ingin menempuh jalur bilateral, bukan multilateral. Penjelasan Presiden Bush mendapat sanggahan keras karena dinilai sekadar pembenaran untuk mengelak dari tanggung jawab global.

Pada akhir pertemuan, Presiden Bush mengajak Menteri Emil Salim berbicara empat mata. Presiden Bush menawarkan kepada Menteri Emil Salim untuk bekerjasama secara bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, dalam konservasi keanekaragaman hayati—sesuai isi konvensi. Indonesia dipilih karena dinilai sebagai negara yang kaya keanekaragaman hayati.

Mengingat
Indonesia berada
di wilayah tropis
yang menjadi
salah satu pusat
keanekaragaman
hayati dunia.
Masyarakat dunia
mengakui Indonesia
sebagai negara
mega-biodiversity.

Sekalipun begitu, Indonesia, bersama Brazil dan Tanzania merasa berkepentingan atas penandatangan konvensi. Ini mengingat Indonesia berada di wilayah tropis yang menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai negara *mega-biodiversity*. Negara kepulauan ini memiliki variasi jenis tumbuhan, satwa dan sumber daya genetik, serta kisaran habitat daratan dan laut yang luas.

Tetapi di sisi lain, tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia terbilang tinggi. Ancaman yang terus meningkat terhadap keanekaragaman hayati menjadi keprihatinan komunitas internasional. Jadi, konferensi Rio merupakan perwujudan komitmen global untuk menyelamatkan Bumi beserta isinya.

Akhirnya, kendati pesimis dengan tawaran Presiden Bush, Menteri Emil Salim melaporkan hasil percakapan itu kepada Presiden Soeharto.

•

Pada Januari 1993, Amerika Serikat dan Jepang membuat kesepakatan bersama di Tokyo. Presiden George Bush dan Perdana Menteri Kiichi Miyazawa menandatangani kesepahaman tentang dukungan konservasi keanekaragaman hayati di negara-negara berkembang. Dalam kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Tokyo ini, kedua negara sepakat mendanai pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, sebagai penandatangan Agenda 21, Jepang dan Amerika Serikat pada Juni 1993 berkomitmen memberi bantuan keuangan dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tujuannya: membantu negara-negara berkembang memenuhi kewajiban dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Program bantuan dalam payung Agenda 21 ini memberi kesempatan Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia, memenuhi komitmen dalam konservasi keanekaragaman hayati melalui kerja sama bilateral. Kerangka program kerja sama Agenda 21 juga lebih fleksibel dan inklusif. Para pihak yang terlibat bukan hanya instansi pemerintah terkait, tetapi juga harus melibatkan ilmuwan, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta.

Kedua negara sepakat meluncurkan program bersama yang dinamakan Program Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*The Indonesian Biodiversity Conservation Program*). Dalam program ini, masing-masing pemerintah membentuk tim perancang program yang berisi para pakar dan wakil pemerintah. Tujuan tim: menyusun dan melaksanakan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia lantas membentuk tim perancang program keanekaragaman hayati. Tim perancang dari Amerika Serikat diketuai Theodore M. Smith—konsultan USAID dan mantan direktur Ford Foundation di Indonesia. Tim perancang dari Jepang diketuai Yoshinori Suematsu, kepala Biro Riset dan Perencanaan Kementerian Luar Negeri Jepang. Sementara itu, tim perancang dari Indonesia diketuai Herman Haeruman Js, deputi ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

•

Akhir Maret 1993, Emil Salim tak lagi duduk di kabinet pemerintahan. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan dipegang Sarwono Kusumaatmaja. Meski begitu, upaya penerapan Konvensi Keanekaragaman Hayati terus berlanjut.

Tim perancang Indonesia, yang berada dalam koordinasi Bappenas, menyusun strategi program keanekaragaman hayati sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, dan *Biodiversity Action Plan for Indonesia* 1991 (BAPI 1991). Tim juga menjajaki kerja sama dengan pihak terkait di dalam negeri dan luar negeri. Penjajakan ini untuk memperoleh dana konservasi, yang saat itu memang belum cukup tersedia dalam anggaran negara.

Pada perkembangannya, tim perancang dari Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang menggelar serangkaian perundingan. Perundingan yang dipimpin Herman Haeruman ini untuk merancang tujuan, opsi pendanaan, sasaran, dan komponen kerja sama konservasi keanekaragaman hayati. Dalam proses perundingan, tiga negara ini ternyata sulit mencapai kesepakatan mengenai bentuk, tujuan, dan cara kerja sama.

Amerika Serikat hanya bersedia mendanai program keanekaragaman hayati sesuai arahan Presiden George Bush: hibah disalurkan kepada lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah Amerika Serikat akan menyediakan hibah melalui *Biodiversity Support Program* (BSP) dengan dana dari United States Agency for International Development (USAID). Sementara *Biodiversity Support Program* merupakan konsorsium lembaga swadaya masyarakat Amerika Serikat: WWF, The Nature Conservancy, dan World Resources Institute.

Lembaga swadaya masyarakat yang independen ini—yang saat itu belum ada—akan menerima dan mengelola dana hibah yang disalurkan melalui *Biodiversity Support Program*. Tujuan dari prosedur hibah itu untuk menciptakan mekanisme keuangan domestik yang fleksibel dan berkelanjutan bagi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Di sisi lain, Jepang hanya tertarik membantu pendanaan untuk membentuk Pusat Penelitian Biologi dan konservasi in-situ keanekaragaman hayati di taman nasional. Dua program itu berada dalam kerangka kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Departemen Kehutanan. Dengan kata lain, pemerintah Jepang hanya mau menyalurkan bantuannya kepada instansi pemerintah.

Sementara itu, Indonesia menghendaki seluruh bantuan disalurkan melalui, dan dalam koordinasi, Bappenas berdasarkan rencana program pemerintah. Bantuan juga harus berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pemerintah Indonesia.

Jelas ada perbedaan kepentingan, minat, dan tujuan, yang sulit dipertemukan antara ketiga negara tersebut. Tim perancang program Indonesia coba mewadahi tiga kepentingan itu dalam satu struktur manajemen, berupa komite teknis dan pengarah tiga-pihak (*tripartite steering and technical committee*). Dalam komite ini akan duduk wakil pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.

Namun, upaya kompromi ini tidak berhasil. Ketiga kepentingan yang memang berbeda itu nampaknya mustahil digabung dalam satu lembaga—apapun bentuknya. Untuk sementara waktu, masing-masing program dari Amerika Serikat dan Jepang dibiarkan mencari jalan dan bentuknya sendiri. Harapannya, kelak akan muncul hubungan antar-program yang bisa saling melengkapi satu sama lain.





Langkah Persiapan

Pada akhirnya, pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada instansi pemerintah: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Departemen Kehutanan. Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jepang membangun *National Biodiversity Information Network*. Sementara itu, bersama Departemen Kehutanan, pemerintah Jepang membangun Pusat Informasi Konservasi Alam (PIKA), dan pengelolaan data keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Untuk bantuan Amerika Serikat, inisiatif mencari solusi beralih dari pemerintah ke masyarakat sipil. Seperti diketahui, pemerintah Amerika Serikat menghendaki bantuan dana disalurkan dan dikelola lembaga swadaya masyarakat yang independen.

Untuk itu, kelompok masyarakat sipil berdiskusi tentang konsep dan gagasan dalam mewujudkan organisasi penyalur hibah yang mandiri. Dorongan mewujudkan gagasan itu kian menguat, mengingat pada 1993, ada kepastian Indonesia akan menerima hibah dari Amerika Serikat. Presiden Soeharto pun menyetujui adanya hibah untuk lembaga swadaya masyarakat itu.

Sejak April 1993, Emil Salim memang telah mengakhiri baktinya sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Pada awal 1994, Menteri Sarwono Kusumaatmaja mengundang Emil Salim sarapan pagi di Hotel Hilton. Menteri Sarwono meminta Emil Salim membentuk organisasi non-pemerintah sebagai pengelola hibah Amerika Serikat senilai US\$ 20 juta. Hibah ini sebagai wujud pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang pernah dibicarakan antara Presiden Bush dan Emil Salim dalam jamuan makan siang di sela konferensi Rio de Janeiro.

Emil Salim pun aktif memfasilitasi berbagai diskusi tentang lembaga penyalur hibah untuk keanekaragaman hayati. Dari berbagai konsultasi itu, dibantu rekan-rekan yang peduli lingkungan, Emil Salim bergerak membentuk tim kecil yang menjadi cikal bakal Yayasan KEHATI kini. Mereka adalah Koesnadi Hardjasoemantri, M.S. Kismadi, Ismid Hadad, Erna Witoelar, dan Nono Anwar Makarim. Mereka merancang konsep, anggaran dasar, rencana program, tata kelola, dan semua persiapan bagi badan hukum yayasan baru. Tentu saja, yayasan baru ini juga harus memenuhi syarat sebagai lembaga nirlaba pemberi hibah keanekaragaman hayati.

Kelompok pendiri yang diketuai Emil Salim ini menjadi *counterpart* bagi tim konsultan dari Amerika Serikat yang dipimpin Theodore Smith. Dua tim ini menyiapkan kelembagaan masyarakat sipil yang layak dan kompeten untuk menerima dan mengelola dana abadi (*endowment fund*) dari USAID—melalui *Biodiversity Support Program* (BSP).



Berbekal diterimanya usul lembaga baru oleh pihak Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, akhirnya Yayasan Keanekaragaman Hayati, atau Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, secara resmi berdiri di Jakarta, pada 12 Januari 1994. Pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 dari notaris publik B.R.Ay. Mahyastoeti Notonegoro S.H., dan terdaftar resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam anggaran dasarnya, KEHATI didirikan sebagai lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum yayasan yang bersifat nirlaba, mandiri, dan tidak memajukan kepentingan suatu kelompok atau aliran politik tertentu. Yayasan untuk tujuan amal, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, dengan menghimpun dan mengelola dana dari sumber-sumber di dalam dan di luar negeri, serta mengatur penyalurannya untuk program yang menunjang tercapainya tujuan yayasan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Pendek kata, KEHATI didirikan sebagai yayasan nirlaba dan independen yang mengelola dana hibah untuk konservasi keanekaragaman hayati.

Dewan Pengawas KEHATI yang pertama terdiri 22 tokoh masyarakat. Para tokoh dari berbagai kalangan ini bekerja secara sukarela dan dalam kapasitas pribadi. Meskipun ada anggota yang mantan pejabat pemerintah, tetapi tidak ada perwakilan pemerintah yang duduk di Dewan Pengawas. Hal ini untuk menjaga status KEHATI sebagai lembaga independen, otonom, dan mandiri.

Karena perannya dalam proses pendirian yayasan, Emil Salim kemudian dipilih sebagai ketua Dewan Pengawas yang pertama. Dewan Pengawas lantas memilih tujuh dari ke 22 anggotanya untuk duduk dalam Dewan Eksekutif. Dewan inilah yang melaksanakan kebijakan Dewan Pengawas, menunjuk Direktur Eksekutif, dan memberikan supervisi bagi program yayasan.

Pada awal perjalanan KEHATI, Emil Salim merangkap ketua Dewan Eksekutif, bersama Koesnadi Hardjasoemantri sebagai wakil ketua, Ismid Hadad sebagai sekretaris, dan Setiawan sebagai bendahara. Mereka memberikan kebijakan operasional kepada direktur eksekutif dan staf manajemennya. Pada Oktober 1994, Dewan Eksekutif menunjuk Setijati D. Sastrapradja sebagai direktur eksekutif yang pertama KEHATI.



Kendati lembaga baru, KEHATI memiliki modal dukungan yang baik dari Presiden Soeharto, Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, dan masyarakat sipil. Hal itu membekali Ketua Dewan Pengawas Emil Salim dalam menegosiasi berbagai persyaratan agar dana hibah Amerika Serikat disalurkan kepada KEHATI.

Pada prinsipnya, Indonesia dan Amerika Serikat pada 1994 telah sepakat dana abadi keanekaragaman hayati akan dihibahkan kepada KEHATI. Namun untuk maksud tersebut, KEHATI terlebih dahulu harus mencapai status layak mendapatkan hibah (*grant worthiness*).

Argumen dari prosedur ini: KEHATI sebagai lembaga baru harus membuktikan mampu mengelola keuangan dan mengoperasikan pengeluaran dana hibah secara bertanggungjawab. Pelaporan tidak hanya kepada donor tetapi juga kepada khalayak sebagai dana amanah publik (*public trust fund*). Yayasan juga harus mampu mengelola organisasi secara profesional sesuai standar internasional.

Karena itu, para pendiri, dan belakangan Dewan Eksekutif KEHATI, sejak Oktober 1993 telah bekerjasama dengan tim perancang kedua, yang terdiri konsultan ahli dari Amerika Serikat dan Indonesia. Ini untuk membantu persiapan KEHATI dalam menerapkan sistem, kebijakan, dan prosedur sesuai standar internasional. Hal itu harus dilakukan sebelum Amerika Serikat menandatangani kesepakatan, dan menghibahkan dana abadi kepada KEHATI.

Setelah lebih dari satu tahun persiapan kelembagaan, KEHATI dinyatakan memperoleh status layak mendapatkan dana hibah. Pada April 1995, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, pemerintah Amerika Serikat, dan Yayasan KEHATI menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama bilateral program keanekaragaman hayati.

Berdasarkan nota kesepahaman itu, pada bulan yang sama KEHATI menandatangani perjanjian kerja sama dengan USAID selama sepuluh tahun, dari 1995 sampai 2005. Dalam perjanjian Nomor AID 497-0384-A-00-5011-00 ini disebutkan USAID menyediakan dana abadi US\$ 16,5 juta untuk berfungsinya KEHATI sebagai penyalur hibah konservasi keanekaragaman hayati. Sementara untuk aktivitas KEHATI selama lima tahun pertama, ada tambahan hibah US\$ 2,5 juta. Delapan bulan kemudian, menjelang akhir Desember 1995, pembayaran dana abadi dilakukan melalui rekening KEHATI.

Selama dua tahun pertama, KEHATI mencurahkan sebagian besar upaya untuk membangun dirinya sebagai lembaga yang tepercaya. Langkah ini ditempuh agar KEHATI dikenal dan diakui oleh para pemangku kepentingan. Caranya, KEHATI menyiapkan pengawasan internal, menata sistem pengelolaan organisasi, mengembangkan infrastruktur keuangan dan mekanisme hibah. Selain itu, KEHATI juga mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional.***





Fokus Perjuangan KEHATI

Konferensi Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janiero, Brazil, pada 1992 berhasil meningkatkan perhatian dan keseriusan global dalam menghadapi krisis lingkungan. Tidak mengherankan, konferensi ini dipandang sebagai salah satu tonggak bersejarah dalam melestarikan lingkungan hidup.



Hasil konferensi merupakan rekonsiliasi perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, yang mengedepankan paradigma pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya, sudah sejak 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-bangsa telah memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan semakin terlihat wujudnya dalam Agenda 21—salah satu hasil konferensi. Agenda untuk menyongsong abad ke-21 ini merupakan rencana global yang dapat dijadikan panduan bagi negara-negara untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang demokratis, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.

Hakikatnya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang memenuhi kepentingan lintas-generasi, dan pada saat yang sama mengurangi dampak negatifnya terhadap keanekaragaman hayati. Sementara itu, Konvensi Keanekaragaman Hayati memiliki tiga tujuan utama: melindungi keanekaragaman hayati, memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan pembagian yang adil hasil pemanfaatan sumber daya genetik.

Semenjak konferensi tingkat tinggi di Rio, frasa keanekaragaman hayati, dari bahasa Inggris *biodiversity*, semakin populer di kalangan masyarakat. Selain frasa keanekaragaman hayati, sebagian kalangan di Indonesia juga memakai kata biodiversitas—serapan dari kata biodiversity.

Sebelum populer, frasa keanekaragaman hayati dikenal secara terbatas di lingkar pakar biologi. Itu pun dengan beragam variasi istilah: keanekaragaman biologi, keanekaragaman spesies, kekayaan spesies, maupun keanekaragaman alam. Frasa ini menjadi lebih bermakna setelah pakar biologi dari Harvard University Edward O. Wilson, mengenalkannya dalam buku berjudul 'Biodiversity' pada 1989. Kata itu rupanya rangkaian dari: biological diversity.

Kini, frasa keanekaragaman hayati tak hanya dikenal pakar biologi, tapi juga kerap dipakai pemerintah, perencana pembangunan, pengusaha, pegiat lingkungan, penyandang dana, siswa-siswi, pengambil kebijakan, dan sebagainya. Nampaknya, perlu mengingat kembali arti frasa ini. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kehidupan di bumi, beserta segala interaksi makhluk hidup di dalamnya. Keanekaragaman hayati mencakup semua tingkat sistem biologi, mulai dari tingkat genetik, spesies, sampai ekosistem.

Seluruh tingkat keanekaragaman ini saling berinteraksi satu sama lain untuk tumbuh berkembang, dan membentuk sistem penyangga kehidupan. Dengan demikian, keanekaragaman hayati memiliki fungsi dan manfaat yang amat vital untuk menopang kehidupan. Hampir tak ada kebutuhan hidup manusia yang lepas dari keanekaragaman hayati, mulai dari air, sandang, pangan, kesehatan, sampai energi.

Bila pun seseorang merasa kebutuhannya tidak ditopang oleh keanekaragaman hayati, itu karena hidupnya telah berjarak dengan proses ekologi esensial. Seiring hidup yang kian modern, manusia semakin tercerabut dari relasi yang akrab dengan keanekaragaman hayati. Dari hari ke hari, jarak ini semakin lebar. Lagipula, manusia memakai alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya, yang justru mengaburkan jasa keanekaragaman hayati.

Hakikatnya,
pembangunan
berkelanjutan
adalah pembangunan ekonomi
yang memenuhi
kepentingan lintasgenerasi, dan pada
saat yang sama
mengurangi dampak
negatifnya terhadap
keanekaragaman
hayati.

Tanpa terasa, pertumbuhan penduduk, gaya hidup konsumtif, industri dan teknologi yang tidak ramah lingkungan menyebabkan keanekaragaman hayati terancam. Ekspansi perkebunan, pertambangan, hutan tanaman, pemukiman, dan infrastruktur mengorbankan kawasan-kawasan yang menyimpan keanekaragaman hayati. Pada saat yang sama, lautan menjadi tempat sampah raksasa: dari daratan mengalir polutan, sampah, dan segala sisa kehidupan. Sumber daya laut pun menjadi sasaran pemanenan berlebihan untuk memenuhi kebutuhan manusia hari ini.

Ironisnya, masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keanekaragaman hayati menerima dampak dari pemanfaatan yang serampangan. Dampak selanjutnya, timbul persoalan sosial. Tidak mengejutkan, benturan sosial kerap terjadi di wilayah-wilayah kaya sumber daya hayati namun pemanfaatannya mengabaikan lingkungan. Pengalaman menunjukkan, berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati seringkali saling berinteraksi satu sama lain sehingga situasi semakin memburuk. Pembangunan berorientasi jangka pendek sudah pasti menimbulkan ketidakadilan akses terhadap sumber daya hayati. Dampak selanjutnya, manfaat jasa keanekaragaman hayati tidak terdistribusi secara adil dan merata.

Itulah sebabnya, Indonesia berada dalam situasi yang menggelisahkan. Di satu sisi, Indonesia berstatus sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia; di sisi lain, Indonesia memiliki tingkat kehilangan keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu pendorong hilangnya keanekaragaman hayati adalah aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan. Karena itu, paradigma pembangunan Indonesia yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam harus berubah menjadi pembangunan berkelanjutan.

Hal itu mengingatkan kembali seruan global untuk perubahan dalam pola pembangunan yang menggema di Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 1992. Di kemudian hari, seruan ini terus menggema di setiap forum global yang terkait dengan penyelamatan Bumi.





PERJUANGAN KEHATI

Yayasan KEHATI memegang mandat untuk mencapai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana hibah, perjuangan KEHATI untuk konservasi keanekaragaman hayati demi kehidupan manusia.

Keanekaragaman hayati, dalam perspektif KEHATI, menjadi modal utama pembangunan berkelanjutan. Dasar pemikirannya, pemanfaatan hari ini tidak menghilangkan kesempatan di masa depan. Perspektif tersebut bertumpu pada kenyataan bahwa seluruh kebutuhan lintas-generasi hanya dapat dipenuhi bila keanekaragaman hayati terjaga kelestariannya.

Sejak berdiri 25 tahun lalu, KEHATI memandang konsep pembangunan berkelanjutan dapat menjadi haluan dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang berlandaskan harmoni tiga komponen: ekonomi, sosial, dan ekologi. Konsep ini amat penting bagi Indonesia yang menggantungkan pembangunan ekonominya pada sumber daya alam. Bila tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan, sumber daya alam akan habis seiring dengan pertumbuhan penduduk. Artinya, tidak ada ruang untuk tawar-menawar bagi Indonesia untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan.

KEHATI mendorong penerapan pilar utama dalam konservasi sumber daya hayati: melindungi, mengawetkan atau memelihara, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati. Ketiga pilar tersebut saling terkait satu sama lain.

Pada tataran pengelolaan, pilar konservasi tersebut kerap disebut: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan—save it, study it, use it. Urutan prosesnya: perlindungan – pengawetan – pemanfaatan. Urutan ini tidak hanya bersifat linear, tapi juga siklis.

Upaya perlindungan untuk menjaga potensi keanekaragaman hayati yang telah maupun belum dimanfaatkan saat ini. Para pakar biologi mengingatkan, banyak potensi keanekaragaman hayati Indonesia yang belum dikenal dan dipahami manfaatnya. Agar tidak punah sebelum dimanfaatkan, potensi hayati harus dilindungi untuk menjamin peluang pemanfaatan generasi mendatang.

Nilai kesempatan ini mencakup segala kemungkinan pemanfataan untuk memenuhi sandang, pangan, papan, energi, dan kesehatan. Misalnya saja, demi menjaga ketahanan pangan, Indonesia selama ini masih bergantung pada bahan pangan impor. Padahal, keanekaragaman hayati Indonesia masih menyimpan potensi sumber untuk diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan hanya dimungkinkan bila sumber pangan alternatif dilindungi dan diawetkan secara memadai.

Secara ringkas, upaya konservasi dilakukan sesuai dengan tingkat-tingkat biologi yang membentuk keanekaragaman hayati. Perlindungan di tingkat genetik untuk menjaga keragaman plasma nutfah demi menjaga peluang pemanfaatannya di masa datang. Pada tingkat spesies, perlindungan ditujukan untuk mencegah kerusakan habitat, perburuan flora-fauna, dan perdagangan ilegal yang mengancam kelestarian spesies. Sedangkan di tingkat ekosistem, perlindungan untuk memelihara proses ekologi esensial yang menyangga kehidupan manusia.

Pada tahap selanjutnya, terjaganya keanekaragaman hayati memberi kesempatan upaya riset untuk memahami manfaatnya di masa datang. Tahap lanjutan dari perlindungan ini kerap disebut upaya pengawetan keanekaragaman hayati.

Dari hasil pengawetan tersebut, keanekaragaman hayati selanjutnya dapat dimanfaatkan secara bijak untuk menopang kehidupan manusia. Pada tahap selanjut-



nya, sebagian hasil dari pemanfaatan yang lestari dikembalikan untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Demikian seterusnya, sehingga tercipta hubungan serasi antara perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Hubungan tersebut harus dipahami dengan baik demi mencapai pembangungan berkelanjutan. Pemahaman konservasi keanekaragaman hayati hanya dalam kerangka perlindungan—seolah tidak bisa dimanfaatkan—dapat menimbulkan interpretasi yang salah dari pelaku pembangunan. Interpertasi yang keliru akan memandang konservasi dipandang menghambat pembangunan. Sebaliknya, konservasi keanekaragaman hayati juga tidak bisa dipahami hanya dalam kerangka pemanfaatan semata. Pandangan terakhir ini akan menyebabkan pembangunan mengabaikan kelestarian keanekaragaman hayati.

Persoalannya, konsep perlindungan sesuai tingkatan biologi tersebut seolah berjarak dari kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata, sebenarnya keanekaragaman hayati begitu dekat dengan keseharian. Begitu dekat sehingga kebanyakan orang justru tidak menyadari nilai keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan.

Padahal, hubungan dekat dengan keanekaragaman hayati dapat dilihat dari keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia. Di seluruh Indonesia, terlihat keanekaragaman budaya lazim berkaitan erat dengan keanekaragaman hayati. Setiap kelompok etnis memiliki pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk sumber pangan, sandang, obatobatan, maupun berbagai material lain. Dalam konteks sosial budaya ini, ancaman keanekaragaman hayati juga berarti ancaman terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat.

Tiga pilar konservasi menjadi pedoman KEHATI dalam menjalankan program-program hibahnya. Tentu saja, dalam melaksanakan mandat tersebut, KEHATI dipengaruhi dinamika di tingkat nasional dan global. Ini mengingat kehadiran KEHATI tidak bisa lepas dari konteks global dan nasional dalam konservasi keanekaragaman hayati. Artinya, evolusi kelembagaan

mempengaruhi KEHATI dalam menjalankan mandatnya.

Pada awal perkembangan lembaga, KEHATI mengembangkan jaringan kerja bersama para mitra dan masyarakat yang peduli lingkungan di berbagai daerah. Pada tahap awal ini, program KEHATI lebih bersifat jangka pendek—selama satu tahun. Hal itu tak terhindarkan mengingat isu keanekaragaman hayati masih relatif baru di Indonesia. Bahkan, istilah *biodiversity* belum masuk dalam kamus bahasa Inggris—apalagi bahasa Indonesia.



Tidak mengherankan, pada masa awal KEHATI berdiri, keanekaragaman hayati belum mendapat perhatian yang memadai dalam rencana pembangunan nasional. Karena itu, dalam kurun dua tahun pertama, antara 1995 - 1997, KEHATI mengembangkan program penyebaran informasi tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan keberadaan yayasan. Fokus KEHATI: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keanekaragaman hayati dan pelestariannya. KEHATI juga mendukung analisis kebijakan dan penelitian terapan.

Respons masyarakat terhadap kampanye keanekaragaman hayati terlihat dari banyaknya usulan program yang diterima KEHATI. Namun, sumber daya yang terbatas membuat KEHATI memilih lima kawasan prioritas. Pilihan kawasan prioritas didasarkan pada tingkat ancaman keanekaragaman hayati, yaitu: Aceh, Jawa-Bali, Kalimantan Timur, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur.

Ada tiga objektif utama pada masa ini: mendorong kebijakan konservasi keanekaragaman hayati; berjejaring dengan lembaga non-pemerintah, peneliti, institusi pendidikan, badan pemerintah, dan kalangan usaha untuk saling tukar informasi tentang keanekaragaman hayati; dan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam konservasi.

Pilihan kawasan prioritas didasarkan pada tingkat ancaman keanekaragaman hayati, yaitu: Aceh, Jawa-Bali, Kalimantan Timur, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur. Memperhatikan respons yang beragam terhadap isu keanekaragaman hayati, KEHATI melakukan penyesuaian visi dengan isu yang berkembang. Salah satunya, KEHATI lebih fokus pada konservasi ekosistem hutan dan laut. Program pada ekosistem hutan untuk memberdayakan masyarakat di kawasan yang dilanda pembalakan liar dengan pengembangan produk hutan non-kayu. Berkaitan dengan ekosistem laut, program KEHATI merehabilitasi terumbu karang dan pengelolaannya. KEHATI juga mencari pendekatan baru bagi konservasi keanekaragaman hayati melalui ekowisata. Dalam hal kebijakan, KEHATI memberikan advokasi untuk hak atas lahan, pemanfaatan pengetahuan tradisional, dan konservasi di sektor swasta.

Selama kurun 1998 – 2001, konservasi keanekaragaman hayati merupakan kerja besar dan butuh sumber daya yang besar pula. Dengan menimbang keterbatasan sumber daya, KEHATI menetapkan prioritas. Hal ini dilakukan untuk menjaga efektivitas program dalam memberi dampak pada pelestarian, dan implementasi program. Prioritas ini ditetapkan KEHATI dengan menetapkan region prioritas: Jawa-Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua. Lalu KEHATI menetapkan enam ekoregion, yaitu Kalimantan: Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, Jawa – Bali: Cagar Alam Gunung Tilu, Gunung Simpang, Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Barat, Jawa; Nusa Tenggara: Taman Nasional Laiwanggi-Wanggameti dan Manupeu-Tanadaru, Sumba; Papua: ekosistem pegunungan, Manokwari, dan Padaido, Biak.

Program kerja yang dikembangkan KEHATI pada kurun ini mencerminkan konservasi keanekaragaman hayati yang multipihak. Hal ini konsekuensi dari isu

keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian. Pemanfaatan berkelanjutan menjadi identik dengan pelestarian, dan pelestarian diwujudkan melalui pemanfaatan yang berkelanjutan.

Sejak 1999, KEHATI menggunakan pendekatan programatik di kawasan-kawasan prioritas. Ujung tombak pendekatan programatik ini adalah Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat (PKM), Program Pemberdayaan Masyarakat (PM), serta Program Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (PPKH). Program-program hibah ini dilaksanakan secara terpadu, berbasis masyarakat, dan berorientasi jangka panjang.

Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang desentralisasi, KEHATI mengambil langkah untuk mendesentralisasikan proses hibah dan perencanaan program. Upaya ini dilakukan melalui sebuah mekanisme yang disebut 'simpul jaringan'. Melalui kegiatan perencanaan gabungan dalam setiap simpul jaringan di bioregion, KEHATI berupaya mendekatkan solusi kepada sumber-sumber masalah berkaitan dengan isu keanekaragaman hayati.

Setelah itu, KEHATI memasuki era dengan pijakan yang lebih kokoh dan nilai-nilai baru program. Selama periode ini, KEHATI merumuskan pemberian hibah didasarkan pada pendekatan program, yang terbagi dalam tiga bidang: informasi, edukasi dan riset; program konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan; dan program advokasi kebijakan publik.

Pada bidang pertama, program pendidikan lingkungan dan keanekaragaman hayati untuk memacu pemahaman, kepedulian, dan perilaku yang mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari, juga dilakukan penelitian, studi, pengembangan metode, pengembangan sains dan teknologi.

Untuk program konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, KEHATI mendorong pengelolaan yang lestari melalui kearifan tradisional. Bidang ini juga mengembangkan dukungan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan.

Sementara program advokasi kebijakan publik merupakan upaya untuk membangun jaminan bagi pengakuan, penguasaan, dan pengelolaan oleh masyarakat. Program ini juga menyangkut perjuangan untuk kebijakan maupun penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil. KEHATI juga mendukung program reformasi hukum dan penegakan hukum, kajian kritis kebijakan, advokasi kebijakan perlindungan dari pembajakan kekayaan hayati (biopiracy), prinsip kehati-hatian dini (precautionary principle), dan rekayasa genetik (genetic engineering).

•

Dalam perkembangannya, KEHATI menempuh pendekatan ekosistem yang berfokus pada pangan (pertanian), energi, kesehatan, dan air (PEKA). Titik tekannya menyasar ekosistem penopang sebagian besar kehidupan masyarakat, yaitu ekosistem pertanian, ekosistem hutan, serta ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Tiga ekosistem prioritas program KFHATI



Ekosistem **Pertanian**



Ekosistem Hutan



Pulau-Pulau

Program KEHATI di tiga ekosistem prioritas yang fokus pada PEKA menerapkan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara terpadu. Pada ekosistem pertanian, KEHATI mendorong pengembangan model dan praktik pertanian ekologis selaras kearifan lokal dan teknologi yang sesuai dengan konteks lokal. KEHATI mendukung upaya pelestarian sumberdaya genetik, dan spesies tanaman, terutama tanaman pertanian yang terabaikan dan berpotensi bagi ketahanan pangan.

Pelestarian ekosistem pertanian dilakukan melalui program ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi secara bersamaan. KEHATI bersama mitra mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dan pengembangan sumber-sumber pangan lokal seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian. Pada saat yang sama, KEHATI juga mengajak masyarakat untuk mulai kembali mengonsumsi tanaman pangan lokal—yang semakin langka.

Pada ekosistem hutan, KEHATI mendorong penerapan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari, termasuk mencegah kerusakan hutan lebih lanjut dengan rehabilitasi, meningkatkan produktivitas dan meminimalkan dampak pemanasan global. Selain membuka peluang kerja sama pelestarian kawasan hutan dengan industri kehutanan, KEHATI juga mendampingi pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Konservasi pada ekosistem hutan memiliki dua sasaran ganda: perbaikan ekosistem untuk mengurangi dampak perubahan iklim, dan mendorong program adaptasi berbasis masyarakat.

Sementara di ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, KEHATI mendukung upaya konservasi spesies endemik dan dilindungi, pengembangan model pengelolaan berbasis masyarakat, perbaikan ekosistem, dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Perbaikan ekosistem pesisir misalnya, dilakukan dengan membentuk sabuk hijau mangrove di sepanjang pantai. Selain untuk mitigasi perubahan iklim, upaya tersebut juga melindungi masyarakat dari bencana alam.

Agar program kerja di setiap ekosistem sejalan dengan visi dan misi yayasan, KEHATI mengambil pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mendorong konservasi, advokasi kebijakan publik, penggalangan dukungan, dan partisipasi para pihak.

Pendekatan ekosistem yang fokus pada PEKA sangat penting untuk memastikan upaya konservasi yang berdampak luas dan terintegrasi. Tiga ekosistem penting yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi adalah ekosistem pertanian, ekosistem hutan, serta ekosistem pesisir dan pulau kecil. Ekosistem yang berfungsi baik akan mendukung ketahanan pangan, menghasilkan energi terbarukan, perlindungan terhadap kesehatan manusia, serta memungkinkan pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk air.

Sebenarnya, sebelum memantapkan diri berfokus pada PEKA, KEHATI telah memulai inisiatif melalui program-program di tingkat tapak. KEHATI menekankan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek (penerima manfaat) dalam konservasi keanekaragaman hayati. Desain program diarahkan agar masyarakat menjadi mandiri dan berdaulat atas PEKA serta bersumber pada potensi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di wilayahnya.

Tak hanya itu, KEHATI juga merancang program dengan sistem kelola yang ramah lingkungan dan berpegang pada kearifan lokal di skala komunitas, desa, dan kawasan. Konsep holistik ini memosisikan keanekaragaman hayati memiliki nilai tambah, dan menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, KEHATI mendorong keseimbangan antara perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap program berorientasi pada keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan agar masyarakat berdaya dalam melestarikan keanekaragaman hayati.

Kerangka berpikir demikian merupakan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan global. Pada Pertemuan Puncak Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development* [WSSD]) 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan (Rio+10), peran kunci keanekaragaman hayati dikelompokkan dalam komponen pangan, energi, kesehatan, dan air. Pada pertemuan itu, isu PEKA telah mendapat perhatian khusus dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Perhatian tersebut merupakan respon terhadap resolusi PBB Nomor 55/199 yang menjelaskan, PEKA tak terpisahkan dari implementasi Agenda 21—tentang pembangunan berkelanjutan.

Dengan meletakkan pangan, energi, kesehatan, dan air, sebagai faktor esensial penunjang kehidupan, maka konservasi keanekaragaman hayati harus dilihat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pangan, Energi, Kesehatan dan Air harus dipandang penting untuk menunjang keberlanjutan kehidupan, khususnya dalam penyediaan kebutuhan dasar dan jasa lingkungan.

Secara global, pangan, energi, kesehatan, dan air kemudian diidentifikasi sebagai hal penting dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* [MDGs]), yang sejak 2016 bergeser ke arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* [SDGs]). ***







Pendekatan Konservasi KEHATI

Sekilas Perkembangan Nasional

Sejak Indonesia mengesahkan Konvensi Keanekaragaman Hayati pada 1994, perhatian terhadap keanekaragaman hayati semakin meningkat. Pengesahan melalui Undangundang Nomor 5 Tahun 1994 itu sebagai wujud komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati.



Sebenarnya sejak 1978, Indonesia telah bersumbangsih dalam konservasi keanekaragaman hayati pada tataran global. Saat itu, Indonesia mengesahkan Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna yang Terancam Punah (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.

Masih dalam bidang kebijakan, Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Kebijakan ini mengatur pelestarian keanekaragaman hayati terutama di kawasan konservasi. Pada 1991, Indonesia kembali mengesahkan Konvensi Ramsar mengenai lahan basah melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991.

Seiring dengan dinamika global, pada 2004, Indonesia mengesahkan Protokol Cartagena tentang keamanan hayati melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004. Tiga tahun kemudian, pada 2013, Indonesia kembali meratifikasi Protokol Nagoya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013. Protokol ini tentang akses sumber daya genetik dan pembagian yang adil atas manfaat keanekaragaman hayati.

Sepanjang kurun yang sama, pemerintah membentuk sejumlah lembaga yang mengelola keanekaragaman hayati. Lembaga yang mengemban tugas itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Lembaga lain yang terkait adalah Kementerian Perencanaan Pembangungan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan ini berperan mengarusutamakan keanekaragaman hayati dalam rencana pembangunan nasional, sesuai dengan program di kementerian dan lembaga terkait.

Setiap lembaga mengemban amanat sesuai dengan kewenangannya, baik dalam konservasi in-situ maupun konservasi ex-situ. Apapun bentuknya, konservasi keanekaragaman hayati bertumpu pada tiga pilar: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

Konservasi in-situ berlangsung di habitat asli di kawasan yang dilindungi—seperti misalnya taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, ataupun kawasan konservasi laut. Pada masa sekarang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban tugas pengelolaan konservasi in-situ di hutan-hutan konservasi.

Untuk wilayah konservasi perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil beserta konservasi sumber daya laut,mandat pengelolaan dipegang Kementerian Kelautan dan Perikanan.Sementara itu, Kementerian Pertanian melakukan konservasi keanekaragaman genetik tanaman pertanian dan peternakan. Kementerian ini mengelola koleksi spesies tanaman pangan dan ternak untuk memperbaharui dan menjaga benih potensi bibit unggul.

Upaya konservasi in-situ dilakukan melalui pendekatan sesuai tingkatan biologi dalam keanekaragaman hayati: genetik, spesies, dan ekosistem. Sebenarnya, dengan melindungi kawasan yang kaya keanekaragaman hayati, upaya perlindungan mencakup seluruh tingkat biologi tersebut beserta proses ekologi esensialnya.

Hanya saja, pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat terkait biasanya memakai pendekatan konservasi spesies tunggal. Misalnya saja, konservasi badak sumatra, harimau sumatra, gajah sumatra ataupun spesies lain yang terancam punah. Pendekatan spesies bertujuan untuk melindungi individu dan spesies, yang juga melibatkan perlindungan ekosistem. Mandat kebijakan biasanya untuk mencegah kepunahan yang secara eksplisit berpusat pada spesies, terutama berfokus pada individu dan populasi.

Pendekatan spesies menjamin program lebih terarah, baik dari aspek pendanaan, tenaga, maupun pikiran. Dalam praktiknya, konservasi spesies tunggal dengan sendirinya juga melestarikan sumber daya genetik, dan melibatkan ekosistem.

Untuk melengkapi konservasi in-situ, pemerintah dan lembaga konservasi melakukan konservasi ex-situ di luar habitat asli. Lembaga konservasi ini bisa dari pemerintah ataupun pihak lain, seperti swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga konservasi meliputi kebun raya, kebun binatang, pusat penyelamatan satwa, pusat rehabilitasi, dan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian di luar habitat asli.

Fungsi utama lembaga konservasi untuk pengembangbiakan terkendali maupun penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya. Selain itu, lembaga konservasi juga berfungsi untuk pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ.

Salah satu badan pemerintah yang berkecimpung dalam konservasi ex-situ adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam konservasi keanekaragaman hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga berperan sebagai pemegang otoritas ilmiah. Lembaga ini melakukan pendekatan saintifik untuk meneliti potensi dan manfaat sumber daya hayati. Di samping itu, LIPI juga memberikan rekomendasi ilmiah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—sebagai otoritas pengelolaan—terkait pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati. Misalnya saja, LIPI memberikan saran ilmiah untuk menentukan kuota bagi tumbuhan dan satwa liar untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor.

Sebagai otoritas keilmuan, LIPI memiliki tanggungjawab untuk memberikan pencerahan tentang pentingnya keanekaragaman hayati bagi umat manusia. Lembaga ini didukung oleh berbagai pusat penelitian terkait keanekaragaman hayati. Misalnya saja, Pusat Penelitian Biologi yang melakukan penelitian pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Lembaga ini mengumpulkan tipe-tipe ekosistem terestrial, koleksi referensi tumbuhan (herbarium dan koleksi hidup), spesimen referensi museum zoologi, koleksi jasad renik, dan koleksi keragaman genetika dalam bentuk DNA. Contoh lainnya:Pusat Penelitian Bioteknologi yang meneliti sumberdaya hayati di tingkat spesies dan genetik tumbuhan.



Selain badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat juga turut serta dalam konservasi keanekaragaman hayati. Lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup mulai berkembang sejak 1980-an, dan mulai mengangkat isu keanekaragaman hayati sejak 1990-an. Kegiatannya terutama advokasi kebijakan, pendidikan lingkungan, dan pendampingan masyarakat di kawasan lindung.

Pada dekade 1970 - 1980-an, beberapa lembaga swadaya masyarakat internasional telah mendorong konservasi, terutama dalam pendirian kawasan konservasi, utamanya taman nasional. Selepas masa Reformasi 1998, banyak bermunculan lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan, yang semakin memperluas partisipasi masyarakat dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Mengingat banyaknya pihak yang terkait, pemerintah memandang penting adanya pendekatan strategis di tingkat nasional dalam konservasi keanekaragaman hayati. Sudah semenjak1993, pemerintah telah menerapkan pendekatan strategis dengan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati atau *Biodiversity Action Plan for Indonesia* (BAPI 1993).

Sepuluh tahun kemudian, pada 2003, pemerintah memperbaharui Rencana Aksi 1993, dan menjadi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020. Seiring dengan perkembangan isu-isu baru di tingkat global, seperti Biodiversity Action Plan 2020, Aichi Target, Access and Benefit Sharing dan perubahan iklim, IBSAP 2003-2020 pun diperbarahui dengan IBSAP 2015 – 2020.

Dokumen termutakhir ini diharapkan dapat mengikat Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan sesuai amanat Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena,dan Protokol Nagoya. Artinya, IBSAP sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mengelola keanekaragaman sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Dokumen IBSAP 2015-2020 berisi strategi dan rencana aksi yang mencakup prioritas pembangunan nasional ke depan. Sebagai pendekatan strategis, IBSAP menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, IBSAP dapat menjadi acuan bagi program pembangunan di segala bidang ditingkat pemerintahan, swasta, maupun masyarakat sipil.

Untuk mencapai visi IBSAP 2015 -2020, salah satunya, perlu dukungan pendanaan untuk mewujudkan strategi dan rencana aksi secara nyata.Pendanaan merupakan salah satu tantangan dalam konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.



Dibandingkan dengan era 1990-an, pada saat ini pendanaan konservasi memang jauh lebih baik. Selain dari anggaran negara, dana konservasi dapat berasal dari masyarakat, pihak swasta, dan dukungan internasional.Dari waktu ke waktu, danamemang telah meningkat, namun belum cukup untuk membiayai upaya konservasi yang butuh dana besar dan jangka panjang.

Pendekatan dan Kiprah KEHATI

Pendanaan konservasi keanekaragaman hayati telah menjadi pembicaraan hangat dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, 1992. Negara-negara menyadari untuk melestarikan keanekaragaman hayati dalam kerangka pembangunan berkelanjutan perlu dana yang tak sedikit, berkelanjutan, dan jangka panjang.

Salah satu contoh sumber dana untuk keanekaragaman hayati adalah Global Enviromental Fund atau Dana Lingkungan Global. Dana ini dibentuk pada 1991 yang dikelola Bank Dunia, United Nations Development Programme, dan United Nations Enviromental Programme. Sejak terbentuk, Dana Lingkungan Global telah menyalurkan hibah untuk konservasi keanekaragaman hayati di berbagai negara.

Selain itu, ada sejumlah mekanisme pendanaan yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta. Misalnya saja, CEPF – Critical Ecosystem Partnership Fund dari kerja sama CI dengan Bank Dunia, GEF, MacArthur Foundation dan pemerintah Jepang. Pendanaan ini untuk melindungi pusatpusat keanekaragaman hayati yang terancam. Di Indonesia misalnya, dana CEPF diinvestasikan di Sumatra,yang menyentuh kawasan-kawasan lindung di Sumatra Utara,Aceh, Jambi, dan Riau.

Perkembangan skema pendanaan internasional setelah KTT Bumi memang cukup menggembirakan. Hanya saja, dukungan dana internasional tidak memberikan penyelesaian jangka panjang. Itu karena tidak memenuhi perhatian, kontrak, kemampuan, dan penyebab" (atau sering disebut 4 C: concern, contract, capacity, causes). Dukungan dana lingkungan akan efektif bila pemberi dan penerima hibah memiliki perhatian atau *concern* yang sama. Dalam ungkapan lain, hal itu dapat dinyatakan dalam sejumlah pertanyaan: Bagaimana kontrak dapat dilaksanakan secara efektif? Bagaimana kapasitas lembaga dan sumber daya manusia dari penerima hibah? Apakah akar penyebab yang ada dapat diatasi dengan adanya dukungan dana?

Kendati persoalan tersebut belum tentu terselesaikan, pada akhirnya dana internasional tetap mengalir untuk program konservasi. Harapannya, dengan memetik pembelajaran dalam menjawab persoalan tersebut, akan menjadikan upaya konservasi lebih efektif di masa datang.

Sebenarnya, di samping bantuan langsung, ada satu mekanisme lain yang dinilai penting untuk mendukung konservasi jangka panjang. Alternatif pendanaan jangka panjang itu adalah sebentuk dana lingkungan di tingkat nasional. Dana ini didirikan sebagai dana perwalian, atau yayasan dengan dewan perwalian, yang mengelola dana abadi (endowment fund) untuk konservasi.

Di Indonesia, bentuk dana lingkungan nasional itu mewujud dalam diri Yayasan KEHATI. Sejak berdiri 25 tahun lalu, KEHATI mengemban amanat untuk mengelola dan menyalurkan hibah dari pengelolaan dana abadi. Amanat tersebut yang menjadi alasan utama KEHATI berdiri dan tetap berkembang sampai sekarang.

Dana abadi atau dana amanah, terjemahan kata *trust fund*, adalah dana yang diberikan kepada sebuah organisasi untuk dikelola dan disalurkan sesuai amanatnya. Seringkali mekanismenya memperlakukan dana abadi sebagai aset untuk mencapai tujuan strategis organisasi, yang perlu biaya besar dan terus-menerus. Esensi dana abadi adalah untuk meraih tujuan strategis jangka panjang. Mengapa perlu dana abadi? Karena,untuk mendanai program strategis jangka panjang—seperti konservasi keanekaragaman hayati, biasanya pencapaiannya tak mungkin melalui pendanaan konvensional ataupun anggaran pemerintah.

Dana abadi memiliki beberapa karakteristik. Pertama, dana abadi perlu sokongan dana dalam jumlah besar. Kedua, dana abadi dikelola sebagai aset yang harus dikembangkan nilainya, untuk menjamin pencapaian tujuan jangka panjang. Ketiga, dana abadi dikelola oleh badan hukum yang sah, memiliki tata kelola yang baik, dengan dewan multipihak yang mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai amanatnya. Keempat,dana abadi dikelola dengan sistem dan mekanisme yang baku, transparan,serta pemanfaatan yang efisien dan efektif.

Ada beberapa bentuk dana abadi:dana menyusut (sinking fund), dana bergulir (revolving fund), dana campuran (hybrid trust fund), dan dana abadi (endowment fund). Yang pertama, dana menyusut merupakan bantuan untuk digunakan sampai habis. Ini adalah jenis dana yang paling banyak ditemukan, semisal bantuan untuk bencana alam. Dana itu harus digunakan sampai habis hingga mencapai tujuan pertolongan bencana.

Yang kedua, dana bergulir adalah dana yang dimanfaatkan secara bergulir, dan semakin besar nilainya. Misalnya saja, ada lembaga yang menyisihkan sejumlah dana untuk kegiatan-kegiatan produktif. Sebagian hasil dari kegiatan produktif itu disisihkan untuk disimpan, lalu digulirkan—semisal program peternakan bergulir. Dengan demikian, dana cadangan tadi bergulir, dan jumlahnya makin besar.

Yang ketiga: dana campuran. Jenis ini biasanya diawali dengan dana menyusut untuk program tertentu. Dalam perkembangannya, karena program dianggap bermanfaat, ketika waktu parogram selesai, donor mempersilakan lembaga pengelola untuk menjadikannya dana abadi.

Dari keempat jenis dana tersebut, dana abadi yang paling sulit dan langka. Sulit karena prosesnya pelik, perlu sistem investasi, dan manajemen keuangan yang canggih. Langka karena sangat jarang ada lembaga donor yang memberikan dana abadi.

Jenis dana abadi inilah yang dikelola KEHATI. Pada 1995, dana abadi KEHATI senilai US\$16,5 juta dari Amerika Serikat, yang saat itu dalam kerangka perjanjian kerja sama USAID selama 10 tahun. Meskipun ada batas waktunya, tetapi ketika perjanjian kerja sama berakhir, setelah menjalani evaluasi,KEHATI berhasil memenuhi status layak menerima hibah (*grant worthiness*). Alhasil, dana abadi itu tetap dikelola KEHATI untuk konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Salah satu syarat status layak menerima hibah tersebut adalah kewajiban menggalang dana pendamping bagi dana abadi. Dana pendamping KEHATI untuk menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi di Indonesia. Dalam perjalanannya, KEHATI mampu menggalang sumber dana pendamping, yang kian mengukuhkan perannya sebagai lembaga hibah. KEHATI telah menjalankan mandat itu selama 25 tahun, dan akan terus berlanjut.

Pembelajaran hakiki dari pengalaman KEHATI adalah menumbuhkan kemandirian masyarakat sipil dalam pendanaan konservasi. Agar mandiri, lembaga swadaya masyarakat harus mengubah cara penggalangan dananya. Masyarakat sipil tidak lagi bisa mengandalkan aliran dana dari donor yang sering tidak berkelanjutan, dan berjangka pendek.

Dengan kata lain, dalam berkiprah di bidang konservasi keanakeragaman hayati, lembaga swadaya masyarakat tidak bisa lagi mengandalkan proyek demi proyek. Apalagi, proyek dari donor seringkali juga tidak relevan dengan visi lembaga yang menerima dana.

Itu memang tidak mudah. Namun pengalaman KEHATI dapat menjadi contoh bahwa penggalangan dana dapat dilakukan secara inovatif. KEHATI membuktikan pendekatannya dalam menggalang dana memberikan kesempatan luas untuk menjalankan upaya konservasi secara programatik dan jangka panjang.

Mandiri dalam pendanaan memungkinkan lembaga swadaya masyarakat merancang dan melaksanakan program jangka panjang, dan menjawab langsung persoalan yang ada. Aliran dana kerap mengalir sesuai kebijakan donor sehingga tak jarang tidak menjawab tantangan di lapangan. Kemandirian membuat lembaga swadaya masyarakat lebih dekat dengan tantangan dan persoalan nyata dalam pelestarian keanekaragaman hayati.

.

Evolusi program KEHATI

Periode
1994-
1998

KEHATI fokus pada upaya membangun organisasi dan sistem kelembagaan. Upaya ini meliputi pengembangan jaringan dengan berbagai mitra dan masyarakat yang peduli lingkungan di Tanah Air. Pada masa ini, program dan kegiatan mitra bersifat jangka pendekselama satu tahun. Dana hibah sepenuhnya berasal dari dana abadi KEHATI.

Periode 1998-2002

Fokus program mulai mengarah pada pendekatan ekosistem berbasis komunitas. Seperti: pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal dan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekowisata. Pengembangan program di wilayah kerja baru bertumpu pada kriteria keterancaman keanekaragaman hayati dan pola pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan di kawasan konservasi. Kerjasama dengan mitra berjangka lebih panjang, multipihak, dan menjangkau isu-isu penting yang relevan. KEHATI dan jaringannya adalah penghubung antara kesadaran lokal dan global dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Pendekatan program mencakup peningkatan kesadartahuan masyarakat, pengembangan jaringan, dan peningkatan kapasitas mitra. Proses seleksi mitra berbasis pada jaringan bioregion dan tema kegiatan disesuaikan dengan prioritas masing-masing jaringan kerja bioregion. Pada masa ini, KEHATI telah menggunakan tata kerja pemberian hibah yang baku, dan sekaligus memberikan dukungan teknis, peningkatan kapasitas, dan menyediakan jasa konsultasi bagi mitra. Selain mengandalkan dana abadi, KEHATI mulai menyusun kebijakan flantropi untuk menggalang dana dari lembaga donor dan pihak lain.

Periode 2002-2007

Fokus progam meluas: pendekatan ekosistem diiringi dengan advokasi kebijakan publik. Jaringan mitra diperluas baik di tingkat daerah maupun nasional. KEHATI menggalakkan pendekatan ekosistem dengan dukungan masyarakat dan jaringan kerjanya.

Periode 2007 sampai 2013

KEHATI memperluas cakupan program dengan menggalang dana-dana bilateral, multilateral, dan korporasi besar. KEHATI menarik dana-dana bilateral untuk beberapa program khusus bertahun jamak, seperti *Multistakeholder Forestry Programme* 2 (MFP 2), *Tropical Forest Conservation Action* (TFCA) for Sumatera, dan TFCA-Kalimantan.

KEHATI juga mengembangkan kerjasama program dengan korporasi besar, seperti Chevron dalam *Green Corridor initiative*, Merajut Sabuk Hijau Pesisir, Koridor Pangan Lokal, dan sebagainya. Keberhasilan kerjasama multipihak jangka panjang ini telah meningkatkan portofolio KEHATI sebagai Conservation Trust Fund terbesar, terpercaya, dan berpengaruh di Indonesia.

Periode 2013-2017 KEHATI menerapkan pendekatan lebih holistik. Strateginya: memperkaya pendekatan berbasis ekosistem yang mendukung masyarakat lokal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Fokusnya: pangan lokal, energi, kesehatan, dan air. Pada periode ini, selain berjejaring dengan lembaga swadaya masyarakat besar, korporasi, dan pemerintah, KEHATI juga menegaskan dukungan bagi masyarakat lokal, masyarakat adat, dan yang marjinal di tiga ekosistem: hutan, pertanian, dan laut. Pada kurun ini, KEHATI juga menambah portofolio baru skala besar: Millenium Challenge Account -Indonesia, Indonesian Sustainable Palm Oil, dan Blue Abadi Fund.

KEHATI telah berupaya keras dengan pendekatan ekosistem berbasis masyarakat pada tiga ekosistem prioritas. Upaya konservasi ini dikerjakan bersama para pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, komunitas filantropi, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya. Karakteristik program KEHATI mengutamakan gerakan akar rumput yang tersebar di seluruh Indonesia. Gerakan ini perlu dijadikan model pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia dan terbukti berhasil baik.

Tentu saja, selain mengelola dana abadi dan menghimpun dana pendamping, KEHATI juga sebagai penyalur hibah konservasi. Dalam menyalurkan hibah, KEHATI menerapkan beberapa pendekatan untuk program-program konservasi keanekaragaman hayati.

Kendati pada masa awal skema hibah berbasis proyek jangka pendek, KEHATI menyadari upaya konservasi perlu skema yang sistemik dan berjangka panjang. Untuk itulah, KEHATI menerapkan pendekatan programatik jangka panjang. Harapan dari pendekatan programatik: setiap kegiatan dapat berkaitan satu sama lain, yang lalu mengarah pada visi dan misi KEHATI. Skema ini juga memungkinkan KEHATI memberdayakan kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan ekosistem setempat. Masyarakat yang berdaya akan mampu mandiri dalam melestarikan sumber daya hayati.

Skema programatik berupa berbagai aktivitas, mulai dari penyadaran masyarakat, riset, advokasi kebijakan, sampai pemanfaatan lestari sumber daya hayati. Skema ini juga diiringi dengan upaya menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program dengan skema programatik bersifat multipihak dengan mengedepankan pemanfaatan secara lestari.

Artinya, program dapat dikembangkan oleh beberapa mitra, namun masih dalam cakupan satu kerangka kerja. Hal itu juga berarti pemanfaatan secara lestari hanya dapat dilakukan bila para pihak yang terlibat peduli terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Kepedulian ini meliputi keteguhan hati untuk bersikap benar sesuai kaidah kelestarian dan terbuka untuk mengubah praktik yang tak ramah lingkungan.

Skema programatik juga dapat memperluas dampak positif secara sosial dan membangkitkan gerakan konservasi. Kesuksesan dan keunikan program akan mengundang para pihak untuk terlibat dalam pengembangan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati.

KEHATI juga menempuh pendekatan ekosistem dalam melaksanakan programnya. Pendekatan ekosistem merupakan penerapan ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kelestarian di tingkat ekosistem. Kendati kerap dipakai untuk konservasi hidupan liar, pendekatan ekosistem juga digunakan dalam konteks mengelola ekosistem itu sendiri—seperti misalnya, ekosistem pertanian.

Pertimbangan yang melandasi pendekatan ini sederhana: komponen-komponen ekosistem mengendalikan pangan (pertanian), energi, kesehatan, dan air (PEKA). Pendekatan ini dapat dilakukan pada skala ruang dan wilayah apapun, dengan menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ekosistem.

Dengan pendekatan ekosistem yang berfokus pada pangan, energi, kesehatan, dan air, KEHATI meyakini tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pemanfaatan, dan pembagian yang adil. Pendekatan ini dapat dilakukan pada skala ruang dan wilayah apapun, dengan menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ekosistem. Dengan kerangka berpikir seperti itu, pangan, energi, kesehatan, air dan keanekaragaman hayati menjadi pilar utama bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, desain program KEHATI diarahkan untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan masyarakat atas pangan, energi, kesehatan, dan air, yang bersumber dari potensi keanekaragaman hayati.

Pendekatan ekosistem selaras dengan upaya global dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Pada 1995, untuk pertama kalinya, pendekatan ekosistem diperkenalkan sebagai prinsip umum dalam konferensi kedua Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa. Konvensi Keanekaragaman Hayati pun menegaskan upaya konservasi dilakukan secara holistik. Hal itu berarti upaya konservasi menyatukan ekologi dan ekonomi. Aspek ekologi menyangkut tingkat keanekaragaman hayati: gen, spesies, dan ekosistem, sementara aspek ekonomi terkait dengan sosial dan budaya masyarakat. Sejalan dengan tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, pendekatan ekosistem menuntut strategi terpadu untuk mengelola lahan, air, dan sumber daya hayati yang meningkatkan pemanfaatan secara lestari dan adil.

Konvensi Keanekaragaman Hayati memberikan panduan ringkas tentang pendekatan ekosistem. Pertama, berfokus pada hubungan dan proses fungsional dalam ekosistem. Komponen-komponen dalam ekosistem mengendalikan pola penyimpanan dan pelepasan energi, air, nutrisi, yang membangun daya tahan ekosistem terhadap gangguan. Pengetahuan proses dalam ekosistem dibutuhkan untuk memahami daya tahan ekosistem, dampak kerusakan keanekaragaman hayati dan habitat, penyebab kerusakan, faktor-faktor penentu dalam pengambilan keputusan.



Kedua, meningkatkan pemerataan manfaat keanekaragaman hayati. Pendekatan ekosistem mempertahankan dan memperbaiki manfaat ekosistem, yang mendorong pihak terkait bertanggung jawab secara mandiri dalam pelestarian dan pemanfaatan ekosistem. Pendekatan ini bisa dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam pengelolaan ekosistem dan penilaian manfaat ekosistem secara adil.

Ketiga, praktik pengelolaan adaptif. Proses dan fungsi ekosistem kompleks dan beragam. Karena tingginya tingkat ketidakpastian hubungan dengan aspek sosial, pengelolaan ekosistem harus menjadi pembelajaran terus-menerus. Pembelajaran hanya mungkin dilakukan bila ada peluang beradaptasi.

Keempat, pengelolaan pada skala isu yang tepat, dan desentralisasi sampai tingkat terbawah. Pendekatan ekosistem tak jarang harus dilakukan pada tingkatan komunitas lokal. Efektifitas desentralisasi membutuhkan pendampingan, pemberdayaan, dan dukungan kebijakan. Pengelolaan pada skala yang lebih luas dibutuhkan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan para pihak.

Kelima, menjamin keterlibatan, kerja sama dan koordinasi antar-sektor. Pendekatan ekosistem tidak lepas dari strategi dan rencana aksi nasional, sehingga melibatkan antar-sektor: pertanian, perikanan, kehutanan dan sektor terkait lain.

Upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia mencakup dimensi yang luas: ekologi, sosial, ekonomi,budaya, multipihak di skala lokal, regional, nasional,dan internasional. Karena itu, dalam pengelolaan programnya, KEHATI menggunakan pendekatan ekosistem yang mengedepankan pengetahuan lokal. Ini mengingat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat tradisional, hidup begitu dekat dengan alam lingkungannya. Alam yang menyimpan keanekaragaman hayati menjadi sumber kehidupan, dan memengaruhi denyut sosial masyarakat.

Program-program yang didanai KEHATI juga mencakup peningkatan kesadaran masyarakat lokal untuk membangkitkan kembali kearifan lokalnya. Ini untuk menumbuhkan semangat bahwa konservasi keanekaragaman hayati bermula dan berpusat di masyarakat lokal.

Pendek kata, implementasi program KEHATI dilakukan berdasarkan pendekatan ekosistem dengan skema programatik yang mengarah pada pangan, energi, kesehatan dan air. Pendekatan holistik ini diharapkan bisa menjawab kompleksnya keanekaragaman genetik, spesies, ekosistem, dan interaksinya dengan sosial-ekonomi masyarakat.

KEHATI juga mengutamakan gerakan akar rumput yang menyentuh kehidupan masyarakat, dalam bidang pangan, energi, kesehatan dan air. Upaya ini dikerjakan bersama para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, komunitas filantropi, masyarakat lokal, dan pihak lainnya. KEHATI memperluas cakupan program yang dilandasi peningkatan ekonomi, dan mendorong kearifan lokal untuk diadopsi menjadi kebijakan di daerah dan nasional.

Pendekatan ekosistem juga mengedepankan terjaganya keanekaragaman hayati agar sistem penyangga kehidupan tetap berfungsi semestinya. Konsep ini meletakkan keanekaragaman hayati sebagai sumber penghidupan masyarakat dari sisi ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya. Hal ini penting untuk membumikan nilai kelestarian keanekaragaman hayati sebagai penyedia jasa baik di tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem. Pendekatan ekosistem menjadi kerangka acuan KEHATI untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Intinya, pendekatan ekosistem menekankan keseimbangan di antara tiga pengelolaan keanekaragaman hayati: perlindungan, pengawetan, dengan pemanfaatan.

Kerangka pemikiran tersebut menegaskan pendekatan ekosistem tidak meniadakan pendekatan yang lain, seperti perlindungan kawasan konservasi, ataupun pendekatan spesies tunggal. Pendekatan ekosistem justru memperkuat pendekatan lainnya dalam melestarikan keanekaragaman hayati.

Pendekatan ekosistem membuka peluang memadukan seluruh pendekatan tersebut dalam menghadapi kompleksnya situasi dan tantangan yang ada. Hasil akhirnya, pendekatan ekosistem akan mendorong tercapainya keseimbangan tiga pilar konservasi: perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, adil, dan merata.***





Jangkauan Kemitraan KEHATI

Sejak berdiri 25 tahun lalu, KEHATI memahami upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati harus melibatkan banyak pihak. Demi keberhasilan upaya konservasi dengan pola pembangunan berkelanjutan menuntut kemitraan multipihak dan jangka panjang. Dari perspektif proses ekologi alami, keanekaragaman hayati memang mencakup tingkatan biologi yang rumit. Sementara itu, secara sosial-politik, konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati melibatkan tiga pemangku kepentingan utama: pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Interaksi antara aspek ekologi dan sosial-politik ini terlihat nyata pada pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Persoalannya, seringkali interaksi itu berat sebelah: terlalu menekankan pemanfaatan, dan mengabaikan pelestarian.

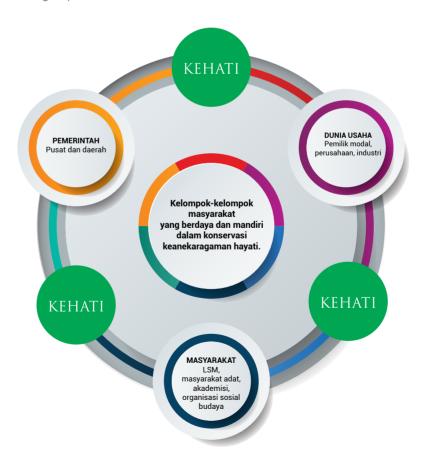
Sifat kemitraan multipihak membuat konservasi keanekaragaman hayati memerlukan prasyarat yang berlaku bagi semua pihak terkait: komitmen untuk konservasi, kapasitas yang setara, serta kerelaan berbagi tanggung jawab dan pendanaan. Dengan demikian, konservasi keanekaragaman hayati merupakan kerja besar dalam jangka panjang dengan dukungan sumber daya yang tak sedikit.

KEHATI bekerjasama dengan para pihak dalam dua kerangka. Kerangka pertama, kerja sama hibah: dengan mitra sebagai penerima hibah; kerangka kedua kerja sama bukan hibah, yang bersifat kolaboratif dan koalisi. KEHATI menentukan mitra dengan beberapa kriteria: mendukung pencapaian visi dan misi KEHATI, tidak bertentangan dengan nilai dasar KEHATI, saling percaya dan bertanggung-gugat, serta berkomitmen dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Sepanjang sejarah KEHATI, salah satu pelajaran penting adalah mengambil sikap antara peran sebagai penyalur hibah dengan peran pelaksana program. Penentuan sikap tersebut telah membayangi KEHATI semenjak berdiri: apakah sebagai fasilitator, pelaksana program, ataukah penyalur hibah.

Barangkali yang perlu direspon bukan dikotomi antara pemberi hibah dan pelaksana program, namun pada ketercapaian tujuan program. Pada akhirnya, KEHATI memposisikan dirinya sebagai pendamping bagi kelompok masyarakat agar mampu mandiri dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Itu posisi jalan tengah: KEHATI sebagai 'penyalur hibah plus' atau 'grantmaking plus'. Artinya, KEHATI memberikan hibah kepada mitra, sekaligus menyediakan bantuan teknis dan pengendali program. Ini sebenarnya pendekatan yang biasa dilakukan lembaga hibah di Indonesia—setidaknya lembaga donor lain telah melakukan hal serupa. KEHATI memilih peran penyalur hibah plus ini dengan tujuan untuk melaksanakan program dengan pendekatan mendalam dan intensif.



Masih berkaitan dengan peran strategis itu, KEHATI menempatkan dirinya sebagai fasilitator maupun 'jembatan' dalam kemitraan dengan pihak-pihak lain. Secara ringkas, pola hubungan tersebut tergambarkan dalam bagan berikut.

Dalam praktiknya, wujud kerja sama dengan mitra tercermin pada program-program yang didanai KEHATI. Dalam program-program itu tertuang komitmen antara KEHATI dan mitra, yang menentukan kegiatan konservasi di lapangan. Jangkauan kemitraan KEHATI, dengan demikian sebidang dan senyawa dengan mitra-mitranya.

Wujud kerja sama dan para pihak terkait memang bermacam-macam. Tapi, ada sejumlah pihak utama: pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta. Tentu saja dalam unsur masyarakat terdapat banyak eksponen: budayawan, media, masyarakat adat, dan sebagainya. Dalam bekerjasama dengan pemerintah, KEHATI bersama mitra melibatkan pemerintah desa, kabupaten, provinsi hingga pusat, tergantung pada tujuan program.

Hal ini misalnya, dapat dilihat pada upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh hak kelola hutan sosial, KEHATI dan mitra bekerjasama dengan pihak berwenang pengelola hutan, pemerintah desa, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat.

Namun, seringkali KEHATI dan mitra menjumpai kebijakan yang cenderung sektoral. Misalnya saja, kebijakan tata ruang di kabupaten yang tidak mendukung konservasi. Dalam mengurai tantangan seperti itu, mitra dan KEHATI menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, legislatif, dan perguruan tinggi.

Tak jarang KEHATI dan mitra harus melibatkan seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam satu kegiatan. Ini terutama terkait dengan tantangan dalam menciptakan pasar dan strategi pemasaran produk keanekaragaman hayati. Mengingat beragamnya lokasi program yang tersebar di seluruh Tanah Air, tantangan pemasaran produk hayati pun bermacam-macam. Beberapa pengalaman KEHATI menunjukkan, ada masyarakat masih perlu didorong untuk bekerjasama dengan pelaku pasar. Sementara di pengalaman lain, masyarakat sudah pada tahap mengembangkan jaringan pasarnya sendiri. Namun, hubungan pasar itu seringkali tidak adil, entah karena harga yang tidak kompetitif maupun terjerat jaringan tengkulak.

Karena itu, KEHATI mendorong setiap mitra menjalin kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta, dalam mengembangkan strategi pemasaran produk hayati. Termasuk dalam hal ini: upaya peningkatan nilai tambah dan ragam produk hayati. Hal terakhir ini kerap muncul pada masyarakat penghasil komoditas yang tidak tahan lama dan tinggal di wilayah terpencil. Mengubah bahan mentah menjadi produk olahan—yang lebih tahan lama, kerap sangat membantu pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, penganekaragaman produk berkaitan dengan peningkatan nilai tambah sumber hayati (bioresource) yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, energi, kesehatan dan lainnya. Apalagi pada masa sekarang, pemanfaatan sumber daya hayati sangat terkait dengan isu bioprospeksi (bioprospecting). Bioprospeksi merupakan penilaian terhadap sumber daya genetik dan hayati. Isu-isu bioprospeksi biasanya dibarengi dengan munculnya hak kepemilikan intelektual, pembagian yang adil dan merata, serta dampak negatif dari pemanfaatan produk rekayasa genetik.

Berdasarkan pengalaman 25 tahun, ada satu contoh bagus tentang kemitraan multipihak: Multistakeholder Forestry Programme 2 (MFP-2) yang dikelola KEHATI. Pada 30 September 2013, Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Penandatanganan di Brussel, Belgia, oleh Menteri Kehutanan, Komisioner Lingkungan dan Presidensi Uni Eropa itu bersejarah bagi Indonesia dalam perdagangan kayu legal.

Kesepakatan FLEGT-VPA merupakan hasil dari rangkaian panjang negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa sejak Januari 2007. Kesepakatan ini memastikan kepercayaan Uni Eropa terhadap perbaikan tata-kelola kehutanan dan industri kehutanan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Terbukanya akses pasar Eropa ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi industri kayu di Indonesia, baik pengrajin menengah ataupun kecil. Melalui program ini, KEHATI memfasilitasi proses negosiasi sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Ini berdampak positif dalam mengurangi pembalakan liar yang jelas-jelas mengancam keanekaragaman hayati.

Penjaminan legalitas kayu dan produk kayu ini benar-benar multipihak. Dari sisi kebijakan, program melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perdagangan. Untuk menjamin transparansi SVLK, masyarakat sipil terlibat sebagai pemantau independen. Sistem SVLK bisa berjalan dengan kerelaan pihak industri perkayuan—dari skala kecil, menengah hingga besar—untuk menjalani penilaian dari lembaga verifikasi independen. Sementara itu, kelompok masyarakat,



yang memiliki hutan rakyat sebagai salah satu sumber pasokan kayu, juga wajib turut serta dalam penilaian legalitas.

Itu baru satu contoh yang bisa memberikan gambaran program KEHATI yang melibatkan para pihak terkait. Tentu saja, dari berbagai program di seluruh Tanah Air, KEHATI masih memiliki banyak contoh. Tingkat keterlibatan para pihak cukup beragam, namun pada hakikatnya bermuara pada paradigma kemitraan multipihak.

Upaya konservasi dan pemanfaatan KEHATI bertumpu pada komunitas masyarakat. Tahapannya mulai dari meningkatkan kesadaran, lalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sampai mampu memanfaatkan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Pada tahap selanjutnya, KEHATI memperluas dampak positif yang dapat membangkitkan gerakan konservasi. Harapannya, kesuksesan program akan mengundang pihak lain untuk turut berkontribusi dalam mengembangkan inisiatif baru konservasi keanekaragaman hayati. Hal itu akan mendorong para pihak punya rasa memiliki atas keanekaragaman hayati.

KEHATI juga memberikan perhatian dan kesempatan kemitraan bagi lembaga komunitas (atau kelompok swadaya masyarakat), lembaga swadaya masyarakat yang kecil maupun lembaga baru di pelosok negeri. Pilihan ini bertujuan untuk memberdayakan lebih banyak lembaga di tingkat akar rumput di berbagai daerah. Kelak, lembaga-lembaga ini diharapkan berdiri di garis depan dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya hayati untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Tentu saja, pilihan ini memiliki tantangan: KEHATI harus mencurahkan perhatian memberdayakan masyarakat baik kapasitas dalam mengelola dana maupun mencapai tujuan program. Hasilnya, KEHATI memiliki hubungan baik dengan organisasi akar rumput yang tersebar di Indonesia. Dari hubungan itu, KEHATI secara alamiah membangkitkan, melahirkan, dan menyimpan pengetahuan baru berkenaan dengan model konservasi keanekaragaman hayati berbasis komunitas.

Dari pengalaman KEHATI bermitra di akar rumput, pengelolaan keanekaragaman hayati tidak terlepas dari nilai lokal dalam bentuk pengetahuan yang berkembang di masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal itu, salah satu upaya KEHATI adalah mendorong masyarakat mengeksplorasi kearifan lokalnya.

Nilai-nilai lokal, yang menjadi komitmen komunitas, dibutuhkan untuk menciptakan gerakan konservasi di akar rumput. Berlandaskan nilai dan komitmen itu, komunitas merumuskan aturan main yang berlaku efektif dalam kehidupan sehari-hari. Aturan main itu biasanya juga mencakup penerapan sanksi sosial—jika terjadi pelanggaran. Tata nilai lokal juga menjadi modal sosial bagi masyarakat untuk merumuskan aturan kewenangan dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Wujud keterkaitan antara kearifan lokal dengan konservasi terlihat dalam beberapa peran yang berkembang di masyarakat: pemelihara, pemanfaat, dan penyebar pengetahuan. Berbagai peran itu saling berkaitan satu sama lain, dan hidup dalam wujud aturan adat-istiadat. Misalnya saja, aspek pemeliharaan yang nampak pada tradisi lubuk larangan di Sumatera, yang menentukan pola pemanfaatan sumber daya sungai. Bahkan, bila dimungkinkan, KEHATI mendorong kebijakan di pemerintahan desa untuk mengadopsi kearifan lokal.

Dalam pendekatan program hibahnya, KEHATI selalu memasukkan aspek advokasi kebijakan publik yang dilakukan mitra bersama jaringannya. Ini dilakukan terutama bila tantangan konservasi keanekaragaman hayati yang dihadapi masyarakat berasal dari kebijakan eksternal.

Salah satu dasar advokasi KEHATI adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dihasilkan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro. Pada 1994 pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang dilanjutkan dengan mencantumkan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Visi dan misi setiap rencana strategis KEHATI selalu menuangkan kebijakan publik konservasi keanekaragaman hayati dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Upaya advokasi KEHATI menyentuh para pembuat kebijakan di tingkat eksekutif dan legislatif. Selain itu, setelah ada kebijakan otonomi daerah, KEHATI bahkan mendorong kebijakan di tingkat desa ataupun aturan lokal. KEHATI melakukan advokasi baik secara sendirian maupun berkoalisi dengan organisasi nonpemerintah lainnya.

Pada umumnya, ada pandangan bahwa masyarakat yang berpendidikan rendah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Kenyataannya, memang masyarakat masih banyak yang berkesadaran rendah tentang konservasi. Tidak sulit menemukan sikap dan perilaku yang tak ramah lingkungan di jalan, di sungai, pantai dan hutan: sampah, perambahan, perburuan liar, bom ikan. Namun perilaku tersebut tidak selalu dipengaruhi tingkat pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan cukup juga menunjukkan perilaku buruk tersebut.

Di balik perilaku itu, ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu perumusan dan penerapan kebijakan yang tidak memadai. Hal ini punya kontribusi besar dalam perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati seringkali karena perencanaan yang buruk, penegakan hukum yang lemah. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki perumusan, perencanaan, dan penerapan kebijakan. Perubahan mendasar yang perlu adalah paradigma pembangunan, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Karena itu, KEHATI mengedepankan program advokasi publik untuk mengubah cara pandang dan pendekatan pembangunan pemerintah yang cenderung memberlakukan sumber daya alam sebagai komoditas, tanpa menghiraukan nilai-nilai lain yang terkandung di dalamnya

Salah satu advokasi yang dilakukan koalisi lembaga swadaya masyarakat pada awal Reformasi adalah perubahan Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia dan pembahasan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia menyatakan, "Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Koalisi LSM memandang ayat tersebut dianggap memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mendominasi pengelolaan sumber daya alam, sementara rakyat memainkan peran yang pasif.

Upaya advokasi kebijakan ini merupakan amanat dari Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam pada 23-25 Mei 2000 di Jakarta. Sesuai dengan Rencana Strategis 2002-2007, program advokasi kebijakan publik KEHATI fokus pada cakupan yang berkaitan dengan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal.

KEHATI aktif terlibat dan mendukung gerakan masyarakat sipil untuk perbaikan tata kelola sumber daya alam yang melahirkan TAP MPR XI Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR itu menjadi mandat bagi KEHATI dalam mengawal penyusunan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam secara partisipatif.

Kala itu, tumbuh kesadaran bahwa gagalnya pengelolaan sumber daya alam disebabkan beberapa kelemahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan—seperti pengabaian masyarakat adat, sektoral, eksploitatif, dan kurangnya perlindungan hak asasi manusia. Di atas semua itu, kelemahan paling mendasar adalah negara terlalu dominan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tentu saja, kelemahan ini tidak sekonyong-konyong muncul. Kelemahan itu lahir dari pengabaian peran publik dalam perumusan kebijakan.

Dengan berpijak pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, yang mengamanatkan adanya konsultasi publik dalam menyusun program pembangunan nasional, penyusunan RUU PSDA dilakukan melalui konsultasi publik. Proses tersebut diperlukan untuk menghasilkan undang-undang yang mencerminkan persoalan yang berkembang di berbagai kalangan, yang hidupnya tergantung pada sumber daya hayati.

Konflik hak dan pengelolaan misalnya, menjadi persoalan nyata dalam keseharian masyarakat. Karena itu kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi krusial untuk didiskusikan bersama khalayak. Hasil konsultasi publik sebenarnya tidak hanya untuk RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, tapi juga berguna dalam perubahan kebijakan dan menjadi model konsultasi dalam menerbitkan kebijakan publik.

Pada proses awal konsultasi publik, diadakan penjaringan fasilitator di enam region: Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebelum proses berlangsung, dilakukan persamaan persepsi dan platform dari bahan dan konsultasi publik. Setelah itu, dilakukan perumusan rencana konsultasi publik di setiap region. Ini mengingat kondisi setiap region berbeda sehingga setiap fasilitator secara otonom dapat menyusun proses konsultasi publik.

Dalam praktiknya, ada dua pendekatan konsultasi publik: berbasis komunitas dan berbasis multipihak. Pendekatan yang pertama untuk mendapatkan masukan lebih mendalam tentang masalah, solusi, dan harapan publik. Konsultasi publik komunitas



di enam region, 141 kali konsultasi publik di tingkat multipihak (stakeholder) dan komunitas. Hasilnya: ada 1.882 masukan dengan klasifikasi sejumlah isu: kebijakan, 35 persen; kelembagaan, 30 persen; manajemen, 29 persen; dan penyelesaian konflik 6 persen.

Kegiatan lain untuk memperkuat konsultasi publik adalah kampanye media untuk membentuk opini dan memperoleh dukungan masyarakat. Dalam kampanye, KEHATI bekerja sama dengan sembilan stasiun televisi, 32 radio, 26 media cetak dan dua media online di seluruh Indonesia. Untuk mempertajam analisis atas isu-isu kritis RUU, digelar diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*-FGD) dengan mengundang pakar tentang isu bioregion, ekonomi berkelanjutan, dan usahawan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Seiring dengan pendekatan program untuk konservasi tiga ekosistem: hutan, pertanian, pesisir dan pulau-pulau kecil, KEHATI aktif mendorong advokasi kebijakan publik dari tingkat desa sampai ke pusat. KEHATI mendorong kebijakan dengan mengupayakan perubahan tata laksana pembangunan dan budaya hukum pada dua tingkat kebijakan, yakni tataran kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

Advokasi kebijakan publik di tingkat lokal dan daerah dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dan menyediakan data informasi. Pembagian kerja dengan pihakpihak terkait, mulai dari kampanye, penyusunan konsep kebijakan, pendekatan persuasif, negosisasi, maupun mobilisasi pendapat publik merupakan strategi yang diperankan para mitra KEHATI.

Keterlibatan KEHATI dalam proses penyusunan kebijakan publik merupakan salah satu bentuk kemitraan dengan pemerintah. KEHATI memanfaatkan peluang kemitraan ini untuk mendukung upaya konservasi di akar rumput. Sebagai lembaga non-pemerintah, KEHATI memandang advokasi kebijakan dapat menjadi saluran untuk menyampaikan pandangan kritis dengan berbekal pengalaman dan jaringan para mitra.

Sesuai dengan peran strategisnya, KEHATI mengembangkan kemitraan multipihak di dua bidang: program hibah dan penggalangan dana. Dana hibah KEHATI untuk pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati. Sementara itu, penggalangan sumber daya demi keberlanjutan program konservasi. Penggalangan sumber daya KEHATI tidak bisa dimaknai hanya sebatas penggalangan dana. Maknanya lebih luas, yang mencakup mobilisasi dukungan, partisipasi, dan kolaborasi, berbagai kalangan dalam konservasi keanekaragaman hayati. KEHATI melakukan pendekatan tersebut pada program dan isu yang berkembang di tataran internasional, nasional, dan di lokasi sasaran program.



Untuk mencapai pendekatan tersebut, KEHATI membangun aliansi strategis agar terjalin sinergi dalam menyusun kekuatan bersama sesuai dengan kemampuan setiap pihak. KEHATI mengembangkan aliansi yang berwatak 'keterikatan yang cair': setiap pihak tetap bebas mencapai tujuannya, tapi terikat pada tujuan aliansi.

Pendekatan tersebut menjadi langkah lanjutan yang dibangun dengan mengoptimalkan setiap pihak yang telah menjadi mitra multipihak KEHATI. Sementara itu, aliansi dengan lembaga baru dapat dilakukan setelah ada proses kerja sama yang saling menguntungkan kedua pihak. Ini berarti aliansi dengan lembaga baru dikembangkan dengan langkah awal penjajakan dan pertimbangan dampaknya bagi aliansi lain yang lebih dulu ada.

Melalui pendekatan ekosistem dengan skema programatik, program mitra KEHATI terbukti dapat menciptakan kerja sama jangka panjang dengan para pihak. Namun, pada saat yang sama, KEHATI dan mitra tak jarang juga menghadapi dana yang terbatas. Kemitraan multipihak KEHATI melalui kolaborasi dan aliansi menjadi solusi dalam menghadapi kendala pendanaan yang terbatas.

KEHATI menyadari penggalangan sumber daya menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan mandat sebagai lembaga penyalur hibah. Pada saat yang sama, KEHATI memandang penting aspek komunikasi sebagai langkah awal dalam upaya menggalang sumber daya. Penggalangan sumber daya menjadi jiwa KEHATI yang menjadi tugas bersama seluruh lini yayasan, yang ditopang data, informasi, dan pengetahuan. Sejak berdiri, KEHATI telah mendukung berbagai program yang menghasilkan data, informasi, dan pengalaman yang menjadi pengetahuan.

Himpunan pengetahuan ini berguna sebagai bekal keberlanjutan KEHATI maupun sumber pengetahuan bagi khalayak umum. Pembelajaran bersama akan melahirkan individu ataupun sekelompok masyarakat yang berkomitmen pada konservasi keanekaragam hayati. Komitmen ini, pada tataran selanjutnya akan melahirkan penghargaan kepada manusia, alam, dan keberlanjutan lintas-generasi.

Berbekal pengalaman panjang dan berkiprah di banyak tempat, KEHATI mengetahui tak sedikit komunitas, individu, dan perusahaan yang berjuang melestarikan keanekaragaman hayati. Untuk menghargai upaya masyarakat itu, KEHATI mengapresiasi dengan "KEHATI Award." Penghargaan ini sebagai pengakuan atas upaya luar perseorangan maupun kelompok dalam konservasi keanekaragaman hayati. Selain sebentuk apresiasi, penghargaan ini juga untuk menumbuhkan minat seluruh komponen bangsa bersumbangsih dalam konservasi.

Pada awal penyelenggaraan tahun 2000, apresiasi ini hanya ada satu kategori umum. Setahun kemudian, belajar dari kerumitan dalam memilih kandidat, KEHATI mengembangkan lima kategori: Prakarsa Lestari Kehati, Pendorong Lestari Kehati, Peduli Lestari Kehati, Cipta Lestari Kehati, dan Citra Lestari Kehati.

Penghargaan ini juga sebagai bentuk upaya peningkatan kesadaran dan advokasi kebijakan. Caranya, dengan mendekatkan interaksi para pahlawan lingkungan dengan pengambil keputusan. Dengan kedekatan ini diharapkan para pengambil kebijakan dapat memiliki kepekaan, pemahaman, dan wawasan yang lebih baik tentang

keanekaragaman hayati. Ini mengingat para penerima KEHATI Award berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang yang beragam.

Upaya penggalangan sumber daya juga berkaitan dengan kampanye dan edukasi yang menjangkau lintas-generasi. Sudah sejak berdiri, KEHATI memahami untuk mencapai keberhasilan dalam konservasi diperlukan program edukasi dan kampanye. Kesadaran ini sudah muncul sejak KEHATI berdiri. Dan hingga saat ini, kampanye dan edukasi menjadi salah satu lini penting dalam penggalangan sumber daya.

KEHATI menggunakan berbagai sarana edukasi dan kampanye bagi publik, mulai dari siaran pers, kertas posisi, sampai publikasi yang memuat isu-isu penting dan program. Program edukasi dan kampanye untuk memberikan bekal informasi yang menggugah kesadaran masyarakat terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Mengingat media telah berkembang pesat, KEHATI menyalurkan informasi menyalurkan informasinya melalui media sosial yang populer di kalangan milenial, seperti Youtube, Instagram, Facebook.

Kini publik bisa langsung berinteraksi dengan KEHATI melalui platform media sosial yang beragam. Masyarakat dari berbagai usia, golongan, dan latar belakang dapat berpartisipasi dalam mendiskusikan keanekaragaman hayati. Isu-isu penting dapat didiskusikan hanya dengan ketukan jari: ancaman, tantangan, manfaat, dan masa depan keanekaragaman hayati.

KEHATI akan terus mengembangkan upaya-upaya penggalangan sumber daya yang menjangkau banyak kalangan. Penggalangan sumber daya, baik pendanaan maupun kolaborasi, akan semakin menuntut inovasi seiring dengan tantangan konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam menggalang dana, KEHATI menempuh cara-cara inovatif, dan berbedabeda sesuai dengan pihak sasaran. Upaya penggalangan di sektor swasta misalnya, perlu dikaitkan dengan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemitraan dengan korporasi dilakukan dengan mengajak pihak swasta untuk melaksanakan tata kelola yang berpihak pada kelestarian sumber daya hayati. KEHATI menerapkan strategi yang berbeda untuk menjalin kemitraan dengan lembaga donor dan entitas bisnis. Tentu saja, semua bentuk kerja sama dilandasi dengan komitmen untuk meraih kelestarian keanekaragaman hayati dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. ***



Kinerja Pendanaan KEHATI

Yayasan KEHATI memperoleh dana hibah dari Amerika Serikat melalui perjanjian kerja sama dengan *United State Agency for International Development* (USAID). Sesuai sejarah pembentukannya, dana tersebut merupakan dana amanah publik (*public trust fund*) untuk konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Mandat KEHATI: mengelola dan menyalurkan hibah untuk konservasi keanekaragaman hayati. Dana abadi merupakan mekanisme dan instrumen pengelolaan dana untuk mencapai tujuan strategis yang perlu biaya besar dalam jangka panjang.



Jangka waktu perjanjian kerja sama USAID berlangsung sepuluh tahun mulai dari 1994 sampai 2005. Jangka waktu itu sebagai kesempatan untuk menyiapkan kapasitas dan kelembagaan KEHATI dalam mengelola dana abadi. Selama masa perjanjian, USAID melakukan pengawasan intensif dan memberikan berbagai pertimbangan kepada yayasan. Berdasarkan perjanjian itu, yayasan menerima US\$16,5 juta untuk dana abadi dan US\$ 2,5 juta untuk operasional lima tahun pertama. Di samping itu, pada masa awal, ada juga bantuan teknis dan konsultasi. Persyaratan dalam perjanjian kerja sama juga mewajibkan KEHATI mengumpulkan dana pendamping (matching fund) US\$ 6,5 iuta dari sumber-sumber lain.

Sebelum benar-benar memperoleh dana USAID, KEHATI mesti melalui uji kelayakan menerima hibah untuk memenuhi syarat perjanjian kerja sama-termasuk strategi investasi dana abadi. Misalnya saja, ada syarat investasi dana abadi harus terdaftar secara resmi pada US Securities & Exchange Commision. Selain demi keamanan dana abadi, syarat itu juga berarti dana harus diinvestasikan di Amerika Serikat.

Dalam upaya mendapatkan status layak menerima hibah, KEHATI terdaftar sebagai organisasi nirlaba dan bebas pajak di Amerika Serikat. Status ini memungkinkan perusahaan ataupun entitas lain yang berbasis di Amerika Serikat, yang menyumbangkan dana ke KEHATI, mendapatkan keringanan pajak.

KEHATI memperlakukan dana abadi sebagai aset, dan bukan sebagai sumber penghasilan. Dengan demikian, mengelola dana abadi juga berarti mengelola aset. Sumber penghasilan KEHATI diperoleh dari keuntungan investasi dana abadi itu. KEHATI mengelola dana abadi dengan dua tujuan utama: mempertahankan nilai intrinsik dana

abadi sepanjang waktu, dan mendapatkan pendapatan bagi yayasan.

KEHATI menanamkan dana abadi dalam portofolio internasional untuk investasi saham dan pendapatan tetap, dengan target komposisi: 60persen saham dan 40persen surat berharga.

Dalam empat tahun pertama investasinya di pasar modal Amerika Serikat, KEHATI menikmati tingkat keuntungan yang tinggi. Sejak 1996 hingga 2000, keuntungan dana abadi mencapai 13,7persen. Ini melampui sasaran tahunan yang diharapkan sebesar 6persen, ditambah biaya pengelolaan investasi dan tingkat inflasi. Ini juga berarti modal awal dana abadi yang US\$ 16,5 juta pada 1995, telah tumbuh mencapai hampir US\$ 25 juta pada akhir 1999-setelah dikurangi penarikan tahunan US\$ 2,225 juta untuk program.

Krisis keuangan Asia pada 1997 membuat jumlah dana abadi KEHATI melonjak besar dalam mata uang rupiah. Hal itu lantaran jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sekadar mengingat kembali, nilai tukar rupiah saat KEHATI berdiri pada 1994 sekitar Rp2.300 per dolar. Nilai kurs ini terus tak stabil, bahkan sempat melampui Rp15.000 per dolar pada 1998-saat krisis memuncak di Indonesia.

Dalam upaya mendapatkan status lavak menerima hibah. KEHATI terdaftar sebagai organisasi nirlaba dan bebas pajak di Amerika Serikat. Status ini memungkinkan perusahaan ataupun entitas lain yang berbasis di Amerika Serikat, yang menyumbangkan dana ke KEHATI. mendapatkan keringanan pajak.

Lonjakan nilai dana abadi membuat KEHATI tiba-tiba menerima lebih banyak rupiah dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Namun, inflasi mengejar fluktuasi nilai tukar rupiah sehingga pertambahan nilai itu dengan cepat ditelan untuk biaya operasional lembaga. Pada saat yang sama, selama masa Reformasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati meningkat drastis. Krisis ekonomi merembet menjadi krisis lingkungan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati merajalela di seluruh negeri: pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, perburuan dan perdagangan gelap florafauna.

Merespons situasi itu, KEHATI mengubah pola pendekatan programnya. Pada masa awal berdiri, hibah KEHATI lebih banyak untuk mendukung konservasi spesies dan kampanye keanekaragaman hayati. Saat itu, jumlah hibah relatif kecil, berkisar antara Rp10 juta - Rp20 juta per kelompok sasaran. Total hibah program ini hanya US\$70 ribu - US\$100 ribu per tahun karena memang dana hibah yang tersedia juga kecil.

Namun semenjak 1999, pemberian hibah diperluas melalui pendekatan programatik dan bioregion. Pendekatan ini bertujuan agar program dapat menjawab masalah di lapangan—mengingat krisis multidimensi yang mengancam keanekaragaman hayati. Perubahan pendekatan itu membuat jangkauan program semakin luas, yang semula hanya di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, kemudian mencakup lebih banyak kawasan di Indonesia.





Sayangnya, pemboman World Trade Center (WTC) di New York pada 11 September 2001 dan skandal Enron membuat nilai dana abadi turun drastis—seperti pada umumnya terjadi di pasar investasi dunia saat itu. Saat itu, portofolio KEHATI ikut menderita akibat melemahnya pasar modal Amerika Serikat. Setelah menikmati tahun-tahun pertumbuhan antara 1995 – 1999, antara 2000 hingga 2002, kerugian aset saham KEHATI mencapai US\$ 5.2 juta dari nilai pasar. Tingkat suku bunga yang rendah dengan kisaran 2,5 – 3 persen pada portofolio KEHATI di Amerika Serikat, jelas tidak menguntungkan yayasan. Sementara itu, bila berinvestasi di pasar modal Indonesia, KEHATI bisa mendapatkan suku bunga 15 -18 persen.

Kendati menanam modal di pasar Indonesia bisa memberikan keuntungan bagi yayasan, namun hal itu tidak diizinkan perjanjian kerja sama USAID. Investasi dana abadi, dan investasi kembali pendapatan dari dana abadi hanya diperbolehkan melalui instrumen keuangan di Amerika Serikat dengan perantara keuangan di Amerika Serikat pula. Meski nilai keseluruhan portofolio KEHATI mencapai jumlah tinggi hampir US\$25 juta dolar pada 1999, nilai itu turun menjadi US\$22,6 juta pada 2000, lalu jatuh lebih dalam lagi: US\$17,4 juta pada 2002.



Turunnya nilai dana abadi hampir bersamaan dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama USAID pada 2005. Masa-masa ini memaksa KEHATI menggunakan dana secara efisien. Yayasan mesti berhemat, termasuk mengurangi rencana perluasan pusat-pusat jaringan regional dan pemberian hibah baru. Keadaan ini menyadarkan KEHATI: meski dana abadi memberi peluang untuk mencapai tujuan yayasan, namun nilai investasinya ternyata tidak selalu tetap

Pada saat perjanjian kerja sama USAID berakhir, KEHATI wajib menghimpun dana pendamping senilai US\$ 6,5 juta. Lantaran pada awal 2004 baru bisa menghimpun US\$2,8 juta, KEHATI masih harus mengumpulkan US\$ 3,7 juta untuk menggenapi kewajiban dana pendamping. Artinya, kewajiban dana pendamping masih kurang, sementara waktu sudah begitu mendesak.

Mengingat jumlah dana yang begitu besar, dan harus dihimpun dalam waktu singkat, KEHATI mengambil sejumlah langkah. Pertama, yayasan bernegosiasi dengan USAID agar kekurangan dana pendamping ataupun tenggat waktu ditinjau kembali. Kedua, berupaya menggalang dana skala besar melalui cara dan sumber alternatif, seperti skema pengalihan utang untuk konservasi (debt-for-nature swap [DNS]) ataupun membentuk dana lingkungan atau investasi hijau (green fund). Ketiga, mendorong program baru dan memperluas cakupan program yang telah berjalan baik, melalui kerja sama dengan donor lain.

Hasilnya, USAID menyetujui untuk menurunkan kewajiban dana pendamping yang harus dipenuhi KEHATI. USAID menilai KEHATI berhasil mempertahankan nilai dana abadi, dan bahkan dalam krisis ekonomi mampu menghimpun dana pendamping. Dalam keadaan krisis ekonomi dan krisis pasar keuangan internasional, KEHATI justru bisa menggalang dana tambahan US\$ 2,8 juta. Tak hanya itu, bahkan program dan peran KEHATI juga berkembang di tingkat daerah dan nasional.



Capaian kinerja KEHATI selama sepuluh tahun pertama dalam mengelola program dan dana abadi dinilai begitu baik. Karena itu, sampai perjanjian kerja sama berakhir pada 2005, KEHATI telah lulus dua kali evaluasi dari tim penilai independen. Berkat kinerja ini, USAID memutuskan pengelolaan dana abadi diserahkan kepada KEHATI untuk konservasi dalam jangka waktu tak terbatas.

Belajar dari ketidakpastian selama krisis, KEHATI mengubah strategi investasi dan penggalangan dana pendamping. Sungguh, dana pendamping penting untuk menjamin keberlanjutan KEHATI dan hibah konservasi. Sepanjang rentang waktu perjanjian kerja sama USAID, dana abadi hanya untuk menutupi biaya program. Karena itu, adanya dana pendamping tentu akan memberi ruang bagi KEHATI untuk berinovasi dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, tantangan KEHATI adalah menjalankan strategi investasi yang beragam dan menggalang dana pendamping jangka panjang. Harapannya, hal itu dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan ketergantungan KEHATI pada dana abadi. Ada beberapa strategi dalam mengumpulkan dana pendamping, mulai dari diversifikasi donor, pengembangan pendanaan yang inovatif, melibatkan swasta, sampai pengelolaan dana abadi yang lebih efektif.

KEHATI menempatkan dana abadi di pasar modal dengan menimbang tingkat pengembalian, tingkat deviasi, diversifikasi, atau gabungan dari beberapa portofolio. Selain itu, investasi juga memperhitungkan risiko penurunan nilai dan investasi dalam kategori utama, termasuk saham, obligasi, kas, dan properti. Dalam menjaga tercapainya tujuan yayasan dalam jangka panjang, KEHATI mengalokasikan dana abadi dengan target komposisi dasar: 60persen saham dan 40 persen instrumen pendapatan tetap.

Kebijakan keuangan juga mengatur pengeluaran untuk operasional dan hibah yang dibatasi minimal tiga persen dan maksimal lima persen dari ratarata nilai pasar dana abadi dalam satu tahun anggaran. Namun, ketentuan ini kemudian berubah. Penarikan dana untuk pengeluaran maksimal bisa 6,5persen per tahun. Sementara untuk biaya investasi (cost of investment) ditetapkan maksimal dua persen dari total dana yang dikelola. Investasi terutama untuk mempertahankan nilai intrinsik dana abadi sepanjang waktu dan memperoleh pendapatan yang pasti. Pendapatan itu untuk menyediakan dana hibah dan operasional yayasan.



Komite Investasi (*Investment Committee*) memainkan peranan penting dalam pengelolaan dana abadi. Tugas pokok komite: mengarahkan dan merekomendasikan kebijakan dan prosedur investasi; mengawasi kinerja *fund manager* dan *investment advisor*; dan memantau performa investasi dana abadi.

Seiring waktu, KEHATI menyaksikan ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati yang semakin pelik dan rumit. Keadaan itu mendorong KEHATI untuk terus menggalang partisipasi, dukungan, dan kedermawanan sosial dari semua pihak. Sesuai dengan mandatnya sebagai penyalur hibah, KEHATI mengembangkan kemitraan untuk menghimpun dana pendamping dari sumber lain—di luar dana abadi.

Dana pendamping merupakan bagian komitmen KEHATI sebagai lembaga penyalur hibah. Meski awalnya untuk memenuhi perjanjian kerja sama USAID, dana pendamping juga penting bagi kelangsungan yayasan dan keberlanjutan program. Ada dua jenis dana pendamping yang didapatkan KEHATI, yaitu: restricted fund, yaitu dana yang penggunaannya sangat tergantung pada kesepakatan dengan pemberi dana, dan unrestricted fund: dana yang penggunaannya diserahkan kepada penerima dana (KEHATI).

Untuk mencapai hasil maksimal dalam menggalang dana, strategi yang dikembangkan KEHATI meliputi diversifikasi sumber dana, penggalangan inovatif, pelibatan korporat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsiblity [CSR]), pengelolaan dana abadi yang akuntabel, dan pengembangan instrumen hibah.

Konsep penggalangan tersebut sebagai diversifikasi sumber dana, agar KEHATI tidak bergantung pada satu atau dua sumber saja. Dengan modal dana abadi, KEHATI mencari dana tambahan dari program besar ataupun program strategis pengelolaan sumber daya alam. KEHATI juga menargetkan penggalangan dana dari badan kerja sama bilateral maupun multilateral, lembaga donor internasional, atau lembaga filantropi luar dan dalam negeri.

Dengan cara ini, KEHATI tidak perlu mengejar proyek kecil jangka pendek, yang menjadi sumber pendanaan bagi lembaga swadaya masyarakat lain. Dengan bekal dana abadi dan reputasinya, KEHATI memiliki peluang besar dalam menghimpun dana dari lembaga donor dengan program dana menyusut (sinking fund). Dana menyusut termasuk sejenis dana abadi, hanya saja waktunya lebih pendek dan jumlahnya tidak sebesar dana abadi USAID.

Salah satu inisiatif dalam menggalang dana, KEHATI memprakarasai filantropi atau kedermawanan sosial dalam konservasi keanekaragaman hayati. Ini mengingat karakter KEHATI sebenarnya organisasi penyalur hibah yang filantropis. Filantropi atau kedermawanan sosial seringkali dimaknai serupa dengan karitas (*charity*). Meski samasama memuat makna keikhlasan, tetapi karitas sejatinya memberi bantuan sesaat dan mendesak—misalnya membantu korban bencana alam.

Berbeda dengan karitas, makna filantropi lebih luas. Filantropi adalah hibah yang diharapkan bisa menjadi modal sosial untuk memberdayakan masyarakat. Filantropi ditujukan untuk kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat. Sumbangan filantropis pada dasarnya dibutuhkan organisasi sosial untuk kemandirian masyarakat.

Dan sebenarnya, kehidupan masyarakat Indonesia sangat lekat dengan kedermawanan sosial. Itu terlihat dari kebiasaan berderma dan bergotong royong. Hanya saja, dorongan beramal orang Indonesia umumnya dilandasi nilai-nilai agama untuk jangka pendek dan mendesak—bantuan bencana alam misalnya. Seiring perkembangan zaman, sejumlah lembaga telah mengembangkan filantropi untuk modal sosial pendidikan ataupun kesehatan. Namun kedermawanan sosial untuk konservasi keanekaragaman hayati nampaknya belum banyak lembaga yang mengembangkannya. Padahal, organisasi masyarakat yang bergerak dalam konservasi juga butuh sumbangan filantropi.

Selama 25 tahun usianya, KEHATI menggalang dukungan dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam kemitraan dengan swasta, KEHATI proaktif melibatkan entitas bisnis dalam penggalangan dana, baik melalui tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility [CSR]) maupun skema pendanaan melalui pasar modal.

Tanggung jawab sosial mensyaratkan adanya kemitraan untuk mencapai tujuan bersama, membangun kepercayaan, mencari solusi bersama, dan hubungan yang timbal-balik. KEHATI menetapkan sejumlah syarat dalam kemitraan dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan.

Pertama, perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Kedua, perusahaan mengadopsi nilai-nilai lingkungan hidup dalam operasi bisnisnya. Ketiga, perusahaan mematuhi peraturan dan audit lingkungan. Dan terakhir, perusahaan bersedia terlibat dalam program KEHATI—sesuai kesepakatan kemitraan. Ringkasnya, KEHATI menjalin hubungan dengan perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam siklus usahanya.



Selain itu, KEHATI juga mengembangkan cara lain dalam menggalang dana melalui entitas bisnis, tidak dengan dana dari tanggung jawab sosial, melainkan dari pasar modal. Untuk upaya ini, pada mulanya KEHATI bekerjasama dengan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menerbitkan Indeks Standar Investasi Hijau. Kerjasama ini melahirkan reksadana Indeks SRI-KEHATI, yang salah satu jenisnya dapat diperjualbelikan di pasar modal (*Exchange Traded Funds*/ETF). Lalu, sebagian fee dihibahkan ke KEHATI untuk program konservasi. Ini benar-benar strategi baru dalam penggalangan dana lembaga non-profit, yang belum pernah ada di Indonesia maupun di Asia.

Usaha KEHATI menghimpun dana melalui pasar modal sebenarnya telah dimulai sejak 2007, saat KEHATI bersama *fund manager* PT Bahana TCW Indonesia meluncurkan produk investasi Reksadana Kehati Lestari (RDKL), satu produk reksadana dengan portfolio obligasi pemerintah Republik Indonesia, dengan skema pembagian *management fee*.

Hingga 2018, Reksadana Kehati Lestari memiliki kinerja yang cukup baik dengan nilai aset bersih per unit Rp 2.008,05. Keseluruhan nilai aset bersih senilai Rp 937,16 millar. Semenjak diluncurkan pada 2007, perkembangan NAB dari 2007 hingga 2018 sebesar 101 persen.

Pertumbuhan Return Reksadana Kehati Lestari

Kinerja Historis	Reksadana Kehati Lestari
1-bln	0.1%
3-bln	3.6%
6-bln	3.8%
1-thn	8.7%
3-thn	7.3%
5-thn	33.0%
S.P (sejak pembentukan)	67.1%

Sumber: Bahana TCW, 30 Desember 2014

Pada 2009, KEHATI kembali melakukan terobosan bersejarah di pasar modal. Bersama PT Bursa Efek Indonesia, KEHATI menggagas dan membentuk satu indeks saham baru: Sustainable & Responsible Investment (SRI) KEHATI Index. SRI KEHATI merupakan indeks investasi hijau pertama dan satu-satunya di Indonesia—hingga saat ini. Bahkan indeks ini menjadi investasi hijau pertama di ASEAN, dan kedua di Asia.

Investor dapat memakai Indeks SRI KEHATI sebagai pedoman untuk membeli saham maupun produk investasi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial—utamanya yang menerapkan kelestarian lingkungan hidup. Indeks ini membuka peluang menggalang dana dari investor dalam negeri untuk memilih saham sesuai kriteria 'hijau' yang ditetapkan KEHATI.

Indeks SRI KEHATI terdiri dari kumpulan 25 saham unggulan dari 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini dinilai kinerjanya setiap semester. Penilaian kinerja berdasarkan prinsip dan kriteria ekonomifinansial, tata kelola yang baik, kepedulian lingkungan, sosial, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan.

Sejak diluncurkan sampai saat ini, performa indeks ini cukup menggembirakan: rata-rata sekitar 10 persen di atas indeks saham-saham lainnya—seperti indeks LQ-45 dan IHSG. Ini menunjukkan respons positif investor yang bersedia membayar harga premium untuk membeli saham perusahaan yang berkinerja sesuai Indeks SRI-KEHATI.

Pada 2014, KEHATI kembali membuat terobosan di bursa. Bekerjasama dengan fund manager PT. Indo Premier Investment Management, KEHATI meluncurkan reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa, yaitu *Exchange-Traded Fund* (ETF). Namanya: Reksadana Premier ETF SRI-KEHATI, berkode 'XISR'.

Sebagai sponsor ETF-XISR, KEHATI menempatkan dana Rp 29,2 miliar dari dana abadi. Sampai 2018, pertumbuhan aset terkelola (asset under management) reksadana ini senilai Rp 222,88 miliar.

Dengan strategi penggalangan dana di pasar modal, KEHATI dapat memeroleh dana tambahan secara teratur yang bebas dari kepentingan pihak manapun. Dengan demikian, KEHATI leluasa memanfaatkannya untuk konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam menggalang dana menyusut (sinking fund), pada 2008 KEHATI menjadi swap-partner dengan menginvestasikan US\$1 juta pada program pengalihan utang untuk lingkungan (debt-for-nature swap) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Melalui skema ini, pemerintah Amerika Serikat mengkonversi pembayaran utang pemerintah Indonesia, yang kemudian digunakan untuk konservasi hutan Indonesia, di Pulau Sumatera (TFCA-1)—lalu juga di Pulau Kalimantan untuk TFCA-2.

Pada Program TFCA-1, selain menjadi swap partner, KEHATI juga bertindak sebagai administrator yang mengelola nilai pengalihan utang senilai hampir US\$ 30 juta. Skema pengalihan utang ini yang pertama di Indonesia, yang terwujud setelah melalui proses panjang negosiasi antara KEHATI dan pemerintah Indonesia. Sebagai skema yang masih baru, pengalihan utang untuk lingkungan tidak begitu saja bisa berterima di Indonesia. KEHATI memulai pendekatan kepada badan pemerintah dan otoritas keuangan di Indonesia pada 2002. Saat itu, KEHATI bekerja sama dengan lembaga lain, seperti WWF Indonesia, The Nature Conservancy, Conservation International, dan Natural Resources Management-USAID.

Untuk meyakinkan pemerintah, KEHATI mendatangkan pakar dari negara-negara yang telah menerapkan skema pengalihan utang untuk konservasi, termasuk Filipina dan Meksiko. Para pakar ini bertemu muka dan menjelaskan kepada pemerintah ihwal skema ini di negaranya. Mereka menegaskan skema pengalihan utang untuk konservasi menawarkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak terkait.

Dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah, dibahas juga peluang penerapan skema uang sama untuk utang dari negara debitur yang berbeda-beda, seperti Jerman dan Inggris. Sampai akhirnya, pada 2009 muncul peluang menerapkan skema pengalihan utang dari pemerintah Amerika Serikat, untuk konservasi hutan melalui Tropical Forest Conservation Act (TFCA) di Sumatera, lalu disusul untuk Kalimantan dan berikutnya TFCA-3 yang ditujukan khusus untuk perlindungan spesies kunci di Sumatera.

Pengelolaan keuangan KEHATI yang ideal bertumpu pada lima pilar utama. Pilar pertama, perencanaan strategis keuangan lembaga; kedua, pertumbuhan dana abadi; ketiga, diversifikasi sumber pendanaan; keempat, penggalian kemampuan pendanaan mandiri; dan kelima, akuntabilitas keuangan. Lima pilar itu untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, tata kelola keuangan yang baik akan menjamin keberlanjutan lembaga dan aliran dana hibah bagi konservasi keanakeragaman hayati di Indonesia.

Skema dana abadi dapat menjawab tantangan konservasi keanekaragaman hayati yang bersifat jangka panjang, multipihak, dan berdimensi luas. Dana abadi juga bisa memberikan pendapatan tetap untuk program jangka panjang, dan mekanismenya tanpa intervensi pihak lain. Keuntungan lainnya, pemberi hibah hanya sekali memberikan bantuan, dan tidak perlu lagi repot bernegosiasi pada masa selanjutnya.

Sistem pengelolaan dana abadi KEHATI diatur dalam suatu sistem tata kelola yang akuntabel dan terpercaya. Sebagai lembaga penyalur hibah, tata kelola yang baik adalah mutlak. Bagian keuangan KEHATI secara rutin dan tertib menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan sesuai dengan kaidah tata kelola.

KEHATI berupaya terus meningkatkan standar mutu pelayanan bagi mitra dan donor dengan standardisasi aktivitas sesuai ISO 9001-2008. Sertifikasi ISO ini diperoleh pada 2012, dan selalu dapat dipertahankan. Pada 2018, ISO 9001-2008 kemudian meningkat ke sertifikat ISO 9001-2015. Secara rutin, bagian keuangan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dengan baik dan tertib administrasi.

Keberhasilan mempertahankan ISO menjadi salah satu indikator terjaganya standar akuntabilitas KEHATI. Di samping itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, setiap tahun laporan keuangan KEHATI diaudit oleh kantor akuntan publik dengan afiliasi internasional. KEHATI juga melakukan pemutakhiran sistem informasi manajemen terpadu dengan sistem pengelolaan hibah dan mobilisasi sumber daya yang tepat. Dengan begitu, dihasilkan laporan keuangan terintegrasi antar-transaksi keuangan secara keseluruhan dengan setiap sumber dana.



KEHATI juga mendorong dan mendampingi para mitranya dalam mengelola keuangan secara akuntabel. Dana yang dihibahkan kepada mitra hanya untuk program yang didukung KEHATI, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain—kecuali dengan persetujuan KEHATI terlebih dahulu.

KEHATI berhak menarik sebagian atau seluruh hibah, atau membatalkan sebagian atau seluruh pembayaran yang hendak dihibahkan kepada mitra kerja. Hal ini dilakukan jika mitra tidak mampu memanfaatkan hibah untuk program yang telah ditentukan bersama KEHATI.

Sebelum KEHATI menghibahkan dana, mitra harus dapat menunjukkan lembaganya menerapkan sistem pengendalian internal yang andal. Sistem pengendalian itu harus menjamin akurasi tata buku keuangan, melindungi aset mitra, taat terhadap prinsip dan standar operasi keuangan dan non-keuangan KEHATI, efisien, serta mampu memecahkan masalah yang timbul dalam sistem dan prosedur keuangan.

Mitra harus menatabukukan secara terpisah semua transaksi dari dana hibah KEHATI. Dengan demikian, seluruh penerimaan dan pengeluaran dana hibah dapat diidentifikasi sesuai laporan keuangan mitra. Seluruh pendapatan bunga yang diterima dari dana hibah harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan triwulanan.

Jika jumlah dana hibah KEHATI yang disalurkan cukup besar, mitra akan diaudit kinerja program dan tata laksana keuangannya. KEHATI berhak memilih dan menetapkan akuntan independen untuk audit ini. Audit yang dibiayai KEHATI ini dilakukan setiap tahun.

Begitu juga, mitra harus menjamin kelompok dampingannya, yang menerima hibah KEHATI, siap untuk diaudit. KEHATI berhak untuk tidak menyerahkan dana hibah selanjutnya, jika mitra tidak menyerahkan laporan kemajuan, laporan keuangan, dan realisasi triwulan berjalan, rencana kegiatan, serta proyeksi anggaran program berikutnya—sesuai dengan perjanjian. Ini mengingat laporan program dan keuangan merupakan alat pemantauan baik secara formal maupun informal.

•

Selayaknya lembaga penyalur hibah, dalam memanfaatkan dananya, KEHATI berusaha berperan sebagai pengungkit (*leverage*) bagi pihak-pihak lain. Dengan peran itu, KEHATI tidak harus menjadi donor utama, atau satu-satunya pemberi hibah, bagi mitra. Peran ini penting karena ancaman terhadap keanekaragaman hayati dewasa ini menuntut banyak pihak lebih serius dalam upaya pelestarian.

Ini juga berarti, para mitra harus mencari dana pendamping bagi hibah KEHATI. Dalam banyak hal, itu dikarenakan KEHATI tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dana program yang diajukan mitra. Mitra yang menunjukkan kemampuannya dalam menggalang dana tambahan akan mendapatkan pertimbangan lebih dalam pengambilan keputusan KEHATI.



Selama 25 tahun, KEHATI berhasil menghimpun Rp 851 miliar dana pendamping. Sumber dana pendamping berasal dari lembaga donor dan lembaga bantuan bilateral, multilateral, korporat, yayasan korporat dan sumber-sumber lain. Lembaga bilateral mendominasi sumber dana pendamping sebesar 91,05 persen, lalu korporasi dan yayasan korporasi, 5,57 persen, disusul lembaga multilateral 2,66 persen. Sisanya, berasal dari filantropi.

Sementara itu, kecenderungan pembiayaan tahunan KEHATI dilakukan dengan analisis atas penerimaan, yaitu berapa dan dari sumber mana saja penerimaan diperoleh KEHATI. Yang kedua, berbasis pada analisis atas pengeluaran, yaitu untuk apa saja pengeluaran tersebut. Dalam pengelolaan dana, analisis atas pengeluaran lebih difokuskan pada dana abadi untuk melihat kinerja pengelolaannya. Diasumsikan, sebagian besar dana pendamping bersifat restricted fund: penggunaannya tergantung kesepakatan dengan pihak donor.

Dalam pengelolaan keuangan atas dasar penerimaan dan pengeluaran, surplus yang dicapai menjadi saldo untuk program tahun berikutnya. Secara keseluruhan, kinerja pendanaan menunjukkan kemampuan KEHATI mempertahankan hasil dari investasi dana abadi, konsolidasi sumber daya untuk dana pendamping, dan pengembangan mitra korporat. Kinerja ini memang dicapai di tengah arus perubahan, bahkan saat krisis keuangan melanda dunia. Kinerja itu memang belum memenuhi harapan dan permintaan pendanaan bagi program konservasi keanekaragaman hayati yang semakin rumit dan mendesak.





Kinerja KEHATI dalam penggalangan dana makin terlihat melalui penerimaan dari dana pendamping yang menunjukkan peningkatan. Data di atas menggambarkan perbandingan sumber dana setiap tahun. Pada 2002 misalnya, 66 persen penerimaan berasal dari dana abadi, dan dana pendamping baru berkontribusi 34 persen. Namun secara porsi dana pendamping meningkat menjadi 92 persen dari total penerimaan tahunan pada 2018.

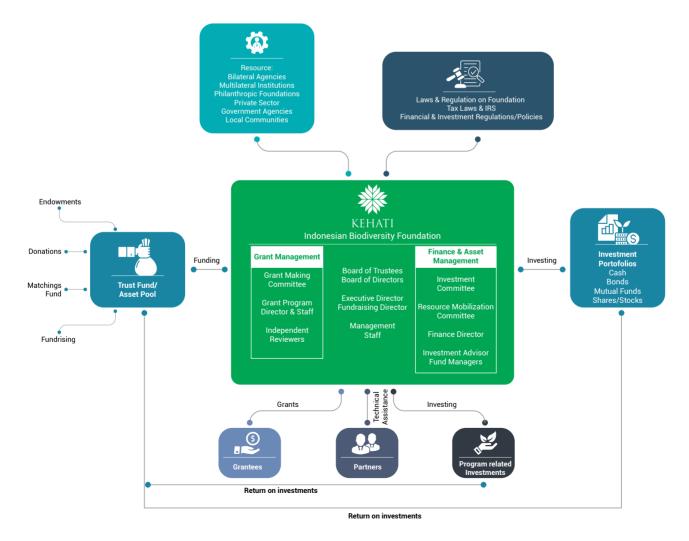
Dengan demikian, berbekal dana abadi sebagai modal lembaga penyalur hibah, dana awal senilai US\$ 16,5 juta telah tumbuh berkembang. Bahkan pada saat krisis, nilainya menjadi US\$ 22 juta. Selain dana awal itu, KEHATI berhasil menarik danadana tambahan dari sponsor dan sumber lain senilai US\$ 80 juta. Dalam 25 tahun perjalanannya, KEHATI mampu mengelola dana lebih dari US\$ 200 juta yang disalurkan bagi program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Dua Sisi KEHATI

Mandat yang diemban KEHATI memberikan dua peran penting. Peran pertama, KEHATI mengelola dan membesarkan dana abadi. Dana abadi dikelola sebagai aset yang harus dikembangkan agar nilainya tidak merosot untuk keberlanjutan program hibah. Artinya, dana abadi tidak boleh habis, entah untuk biaya operasional maupun program hibah. Peran kedua, KEHATI membuat program konservasi keanekaragaman hayati dengan memberikan hibah kepada lembaga masyarakat sipil.

Kedua peran tersebut menuntut KEHATI menggalang dana, mengelola, lalu menyalurkan hibah untuk konservasi keanekaragaman hayati. Singkatnya, peran pertama terkait dengan pengelolaan modal atau asset management, sedangkan yang kedua pengelolaan program atau program management. Peran ganda ini sebenarnya sangat berbeda. Dua tugas ini umumnya tidak disatukan dalam satu lembaga karena esensi setiap peran memerlukan manajemen yang berbeda.

KEHATI tidak boleh melupakan dua wajah pengelolaan dana abadi itu, yang keduanya bekerja saling mendukung. Ketika KEHATI dibentuk dan diberi mandat untuk mengelola dana abadi, muncullah konsep kelembagaan berikut.



Ibarat rumah, KEHATI memiliki dua kamar. Kamar sebelah kiri untuk pengelolaan program hibah, sedangkan kamar kanan adalah pengelolaan aset. Keduanya di bawah naungan sistem manajemen yang sama. Titik tolaknya: mengelola dana abadi atau asset pool. Jadi, semua aset di KEHATI dikumpulkan menjadi satu di asset pool.

Dengan demikian, instrumen penyaluran hibah berada di kamar kiri, dengan prosedur dan seleksi ketat. Melalui kamar kiri ini, KEHATI memiliki mitra penerima hibah. Sementara kamar kanan untuk mengelola aset dan keuangan untuk investasi jangka panjang. Meski setiap kamar punya sistem dan staf, namun keduanya berhubungan erat dan saling mendukung di bawah satu atap tata kelola KEHATI.

KEHATI menerapkan konsep 'satu rumah dua kamar' itu ke dalam struktur organisasinya. Organisasi kamar pengelolaan aset dipimpin direktur keuangan, dibantu manajer keuangan, akuntan, dan *investment specialist*. Selain itu, juga ada Komite Investasi dan Komite Penggalangan Sumber Daya yang mengawasi kebijakan investasi KEHATI di pasar modal serta penggalangan dana dari sumber-sumber lain. KEHATI juga menunjuk beberapa *fund manager* dan perusahaan profesional pengelola dana investasi, yang melaksanakan kebijakan penempatan dana investasi yayasan di berbagai jenis dan produk investasi di pasar uang dan pasar modal.

Sementara itu, kamar pengelolaan program hibah dipimpin direktur program, dibantu manajer hibah dan tim independen penilai proposal. Ada pula Komite Dana Hibah yang mengawasi dan mengarahkan kebijakan penyaluran hibah kepada para mitra.

Hanya saja, dana yang keluar dari kamar pengelolaan modal tidak semuanya berbentuk hibah. Sebagian dana yang keluar juga digunakan untuk investasi. Besaran dananya sesuai kebijakan KEHATI, yang kemudian sebagian dikelola dalam bentuk investasi. Dana KEHATI yang dikelola melalui *fund manager* diwujudkan dalam portofolio berupa lembar saham, obligasi, atau lainnya di pasar modal. Hasil investasi menghasilkan dana setiap tahun, yang lantas dimasukkan kembali ke dana abadi atau *asset pool*.

Pengelolaan dana abadi dengan mengalokasikan sejumlah aset untuk investasi di pasar modal atau bursa efek berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Misalnya, tingkat keuntungan, volatilitas pasar modal, tingkat inflasi, diversifikasi, jenis dan kategori instrumen investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, properti dan sebagainya.

Seluruh pertimbangan itu diatur dalam kebijakan alokasi dana investasi yang disusun Komite Investasi, dan disahkan pengurus yayasan. Pelaksana pengelolaan dana abadi di bursa efek adalah direktur keuangan, investment specialist, investment advisor dan asset manager.

Jika jumlah dana yang ditarik direktur keuangan sebagian besar untuk mitra, maka untuk investasi akan lebih kecil. Bila *grant management* meminta dana besar, maka tidak banyak dana yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio investasi.

Dengan demikian, siklus hubungan antara pengelolaan program, manajemen KEHATI, dan pengelolaan aset menjadi penting. Dari sinilah lahir relasi antara pengelolaan program dengan investasi, yaitu KEHATI mendorong program-program inovatif, yang dipandang sebagai investasi, dan kemudian menghasilkan dana yang bisa dimasukkan lagi ke dalam asset pool.

Artinya, tidak semua dana abadi KEHATI untuk investasi. Sesuai kebijakan, harus ada dana untuk biaya operasional dan dana hibah. Kebijakan keuangan untuk biaya operasional dan program hibah dibatasi minimum tiga persen, dan maksimum lima persen, dari rata-rata nilai pasar dana abadi dalam satu tahun anggaran.







Membumikan Aksi Konservasi

KEHATI tak pernah surut menunaikan amanatnya dalam konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Selama ini, KEHATI telah berjejaring dengan 300 ribu penerima hibah yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Bersama jaringan yang luas tersebut, KEHATI membumikan program-programnya hingga ke tingkat tapak.





Sekadar menyegarkan ingatan kembali, program KEHATI memakai pendekatan ekosistem berbasis masyarakat. Pendekatan ini merupakan strategi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang memadukan keseimbangan antara pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian secara adil atas manfaat sumber daya hayati. Pendekatan ekosistem juga menuntut pengelolaan yang adaptif untuk meminimalkan kelemahan pendekatan sektoral.

Dalam pendekatan ekosistem berbasis masyarakat, KEHATI memberi perhatian pada beberapa aspek. Pertama, aspek kewilayahan ekologis. KEHATI memahami pendekatan sektoral cenderung menciptakan benturan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan konservasi. Benturan itu mengakibatkan kerusakan keanekaragaman hayati. Dengan menimbang kewilayahan ekologis berarti ada tuntutan cara berpikir dan ketrampilan yang adaptif, kolaboratif, multipihak, dan lintas-sektor.

Kedua, melibatkan masyarakat. KEHATI meningkatkan dukungan di akar rumput untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari nilai-tambah keanekaragaman hayati. Upaya itu berlangsung pada tahap investasi, produksi, dan konsumsi. Dengan demikian, akan tumbuh investor yang bertanggung jawab, pengusaha yang menerapkan pola produksi ramah lingkungan, pemerintah yang pro-konservasi, dan konsumen hijau di Indonesia.

Ketiga, berbasis masyarakat lokal dan masyarakat adat. KEHATI memastikan masyarakat setempat memperoleh akses, manfaat, dan kemampuan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Keempat, tata kelola yang baik. Kebijakan dan penguatan kapasitas masyarakat dapat berhasil bila dijalankan melalui tata kelola yang baik. Selain mendorong keterbukaan informasi, KEHATI juga mendukung upaya menghindari konflik kepentingan pelaku pembangunan melalui kebijakan maupun penguatan jaringan anti-korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.



Fokus KEHATI terhadap empat kebutuhan dasar manusia







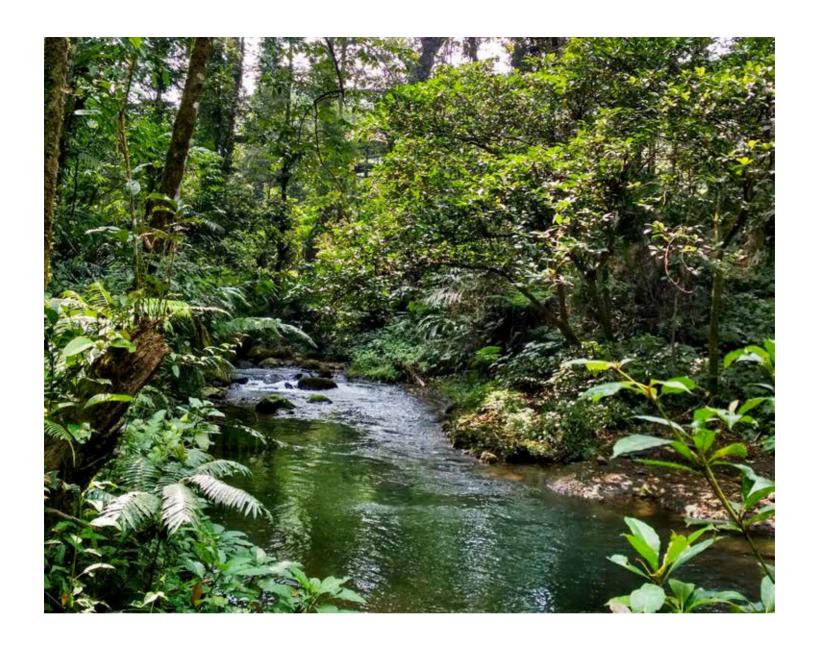


Dengan pendekatan ekosistem, KEHATI menyentuh langsung tiga ekosistem yang menyangga kehidupan masyarakat: pertanian, hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Di tiga ekosistem penopang itu, KEHATI berfokus pada empat kebutuhan dasar manusia: pangan, energi, kesehatan, dan air (PEKA). Fokus program itu sekaligus menjadi sasaran strategis yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan: aksi konservasi, pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, dan penyaluran hibah. Demi mendukung tercapainya tujuan program, KEHATI menjalin komunikasi dan menggalang sumber daya dari berbagai kalangan.

Seluruh rangkaian program KEHATI berpedoman pada tiga aspek: melestarikan, memanfaatkan, dan memberdayakan. Aspek pelestarian merupakan upaya untuk memelihara sistem ekologi tetap berfungsi, yang menjadi syarat utama pembangunan berkelanjutan. Sementara aspek pemanfaatan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar berdaya dalam menjaga keanekaragaman hayati. Karena itu, pemberdayaan masyarakat selalu menjadi bagian penting dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Bersama para mitra di seluruh Tanah Air, program KEHATI menyentuh langsung tantangan dan persoalan di lapangan. Rangkaian kerja KEHATI berlangsung di ekosistem hutan, pertanian, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Paparan berikut ini menguraikan upaya KEHATI dalam membumikan konservasi keanekaragaman hayati di akar rumput.





EKOSISTEM HUTAN

Sebagai satu kesatuan ekosistem, hutan berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Manfaatnya merentang dari penyedia jasa ekosistem sampai penyokong ekonomi masyarakat. Sebagai penyedia jasa ekosistem, hutan berperan dalam banyak hal: penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, habitat flora-fauna, sampai pengatur hidrologi. Jasa ekosistem hutan kian terasa manfaatnya dalam perputaran ekonomi masyarakat, semisal lahan yang subur, sumber pangan dan air bersih. Program KEHATI di ekosistem hutan berupa kerja-kerja perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil akhirnya: kelestarian hutan demi kehidupan umat manusia.

Aksi Konservasi di Bumi Andalas

Tropical Forest Conservation Action for Sumatra (TFCA-Sumatera) merupakan skema pengalihan utang untuk lingkungan (debt-for-nature swap) dibawah perjanjian bilateral antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia. Kedua pemerintah menandatangani perjanjian pengalihan utang pada tanggal 30 Juni 2009 yang akan menghapus sebagian beban utang Indonesia untuk dialihkan ke sebuah dana amanah (trust fund) bagi konservasi hutan Sumatera. Program yang juga disebut TFCA pertama (TFCA-1) ini khusus untuk konservasi di 13 bentang alam prioritas di Sumatera. Dana amanah TFCA-Sumatera menyediakan dana hibah bagi lembaga-lembaga lokal dan nasional sebagai mitra untuk bekerja melestarikan hutan beserta keanekaragaman hayati di dalamnya.

Hasil bumi dari Pulau Andalas telah menjadi tumpuan pembangunan ekonomi sejak akhir abad kesembilan belas—saat masa kolonial. Saat itu, Sumatera dipandang sebagai pulau harapan bagi ekspansi pembangunan berbasis pertanian dari Pulau Jawa. Sejak abad kesembilan belas, hutan Sumatera mengalami penyusutan untuk berbagai kepentingan: perkebunan, permukiman, hutan tanaman, dan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain Sumatera merupakan pulau yang didiami begitu banyak megafauna karismatik serta merupakan pusat penyebaran spesies pohon khas dan bernilai tinggi Asia Tenggara dari famili *Dipterocarpaceae*. Pulau ini sarat keanekaragaman hayati yang menyediakan jasa ekosistem, sumber pangan, sumber obat-obatan serta energi terbarukan bagi manusia baik masa kini maupun masa yang akan datang. Namun demikian Sumatera juga menjadi *hot spot* keanekaragaman hayati dunia, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut dibarengi dengan laju kehilangan yang tinggi pula. Itulah sebabnya Sumatera menjadi prioritas dan sangat penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dunia.

Bersama para mitra, TFCA bekerja dengan pendekatan bentang alam atau ekosistem. Yayasan KEHATI melalui TFCA-Sumatera menyentuh tigabelas bentang alam prioritas yang bernilai penting. Program ini terbentang di sepanjang Sumatera bermula dari Hutan Warisan Seulawah, Taman Nasional Gunung Leuser dan Ekosistem Leuser, Taman Nasional Batang Gadis, Ekosistem Angkola, Batang Toru, Daeran Aliran Sungai Toba Barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Semenanjung Siak Kampar, Ekosistem Tesso Nilo, Taman Nasional Kerinci —Seblat, Kepulauan Siberut dan Mentawai, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, hingga Taman Nasional Way Kambas.

Wujud upaya TFCA berupa dukungan diantaranya bagi pengelolaan kawasan konservasi, pemulihan populasi spesies terancam punah, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati Sumatera, kawasan konservasi menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keutuhan habitat flora-fauna dan eksistensi sumber plasma nutfah.

Salah satu upaya yang dilakukan mitra TFCA: patroli perlindungan yang melibatkan masyarakat, pengelola kawasan dan lembaga swadaya masyarakat. Selain berpatroli, tim perlindungan ini juga mengumpulkan data dan infromasi: mengenai



habitat dan populasi serta ancaman berupa perburuan, pembalakan liar, dan perambahan. Pada saat konflik satwa liar-manusia mengancam, tim pun turut dalam upaya mitigasi: pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian pasca-konflik.

Terlibatnya masyarakat ini menjadi penting untuk menumbuhkan modal sosial bagi keberlanjutan patroli secara swadaya. Ini mengingat ancaman dari luar kawasan konservasi berlangsung terus-menerus. Dengan kata lain, pelibatan masyarakat tak sebatas kebutuhan program, tapi juga untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Keberlanjutan (sustainability) ini menjadi kata kunci untuk setiap proyek yang dijalankan melalui pendanaan TFCA-Sumatera.

Masih dalam upaya perlindungan, TFCA Sumatera - KEHATI memfasilitasi penyusunan prosedur operasi standar bagi penanganan tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas, TFCA Sumatera bersama mitra menggelar sejumlah pelatihan bagi penegak hukum, termasuk polisi dan polisi kehutanan serta petugas bea dan cukai. Latihan ini bertemakan identifikasi forensik kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dan hukum pidana bidang kehutanan, yang saat ini telah berkembang menjadi kejahatan yang teroganisir serta bersifat trans-nasional.

Patroli perlindungan untuk memastikan keutuhan kawasan konservasi yang menjadi habitat flora-fauna merupakan upaya penting terutama bagi konservasi spesies terancam punah. Karena itu, hampir di semua bentang alam prioritas, program TFCA mencakup juga konservasi yang ditujukan khusus bagi keberlanjutan spesies.

Melengkapi tim patroli, TFCA bersumbangsih dalam membentuk tim mitigasi konflik satwa liar dan manusia. Seperti misalnya, tim *Conservation Response Unit* (CRU) yang terdiri dari pawang (*mahout*) dan gajah terlatih memerlukan dukungan sumber daya yang besar dalam jangka panjang, mulai dari kebutuhan pakan gajah terlatih, medis, dan fasilitas *camp* gajah. Untuk itu, TFCA menyokong perawatan gajah jinak di 25 lokasi *ex situ* konservasi gajah dan Pusat Latihan Gajah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, dan Lampung.

Di lapangan, utamanya di Sumatera bagian utara, mitigasi konflik dilakukan dengan menetapkan kawasan perlindungan gajah di Aceh Jaya. Bahkan untuk mengurangi tensi konflik, mitra TFCA menempuh pendekatan teknik: membangun *barrier* gajah dan pagar listrik untuk mencegah kembalinya kawanan gajah ke pemukiman atau tempat aktivitas manusia.

Pun TFCA turut meningkatkan kapasitas para pihak dalam mitigasi konflik harimau dan manusia. Bahkan untuk penanganan pasca-konflik, TFCA berkontribusi membangun suaka harimau di Suaka Margasatwa Barumun, Sumatera Utara. Suaka *ex-situ* ini menampung harimau korban konflik, yang selanjutnya kesehatannya dipulihkan kembali. Bila fisik dan kesehatan memadai, harimau korban konflik dapat dilepasliarkan kembali



ke kawasan konservasi. Fasilitas suaka harimau ini diharapkan menjadi rujukan dalam membangun tempat sejenis di lokasi lain.

Ada satwa lain yang butuh penyelamatan segera: badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*). TFCA Sumatera mendukung pemerintah dengan dana hibah untuk konservasi badak Sumatera. Kondisi populasi badak Sumatera yang sudah berada di ambang kepunahan memerlukan suatu tindakan yang cukup "radikal" untuk menghindari kepunahan. Tindakan awalnya dimulai dengan mengumpulkan informasi menyeluruh tentang sebaran dan populasi badak. Data awal ini sebagai bekal untuk mengembangkan rencana tindakan darurat badak (*Emergency Action Plan*) yang merupakan tindakan segera dan mendesak. Langkah selanjutnya, menyusun rencana jangka panjang berupa Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Sumatera sebagai pedoman pengelolaan jangka panjang bagi para pihak, setelah atau bersamasama dengan tindakan darurat. Tindakan darurat ini intinya adalah mengkonsolidasikan populasi atau sub-populasi yang tidak *viable* untuk membentuk populasi yang mampu berkembang biak baik secara alami maupun melalui bantuan tangan manusia dan teknologi di lingkungan terkontrol.

Mitra-mitra KEHATI dalam program TFCA telah menggelar survei okupansi untuk mengetahui sebaran, tingkat hunian, serta mempelajari faktor penentu sebaran badak. Survei ini berlangsung di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Survei okupansi masih memerlukan kajian lanjutan untuk analisis populasi—seperti survei dengan kamera intai.

Pada saat yang bersamaan, para mitra berpatroli untuk melindungi badak



dari perburuan liar. Kendati untuk konservasi badak, patroli juga menjaga kawasan konservasi dan melindungi satwa lainnya. Dalam waktu dekat tindak lanjut akan dilakukan dengan melakukan survei trajektori untuk mengkonsolidasikan populasi yang tidak viable tersebut.

Untuk spesies orangutan, TFCA dan mitra menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) 2017-2027 Orangutan. Seperti halnya satwa yang lain, primata merah ini juga terancam punah akibat menyusutnya habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. Apalagi kini Sumatera dihuni dua spesies orangutan: Pongo abelii dan P. tapanuliensis dimana yang kedua dipercaya merupakan spesies baru pecahan dari P. abelii.

Mitra TFCA tak pernah lelah memberikan penyuluhan dan penanggulangan konflik orangutan dan manusia di wilayah rawan konflik. Di Ekosistem Leuser Blok Langkat misalnya, mitra menggelar survei habitat dan populasi orangutan yang terjebak di wilayah permukiman. Dari sejumlah tindakan penyelamatan, sejauh ini mitra telah menyelamatkan tujuh orangutan. Empat orangutan di antaranya dipindah ke Taman Nasional Gunung Leuser dan hutan lindung, sedangkan tiga lainnya dipulihkan di pusat rehabilitasi.

Upaya lain yang tak kalah penting yaitu pemulihan (restorasi) ekosistem yang rusak. Upaya restorasi ekosistem yang dilakukan sejauh ini mencakup bentang alam Blok hutan Halaban dan Suaka Margasatwa Linge Isaq, keduanya di Ekosistem Leuser; hutan Pesanguan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan Taman Nasional Berbak-Sembilang. Restorasi juga mencakup pemulihan ekosistem gambut di Rawa Tripa dan Suaka Margasatwa Singkil, dua dari tiga ekosistem gambut penting yang tersisa di Aceh. Pemulihan ekosistem gambut ini berupa pemblokiran kanal untuk meningkatkan permukaan air yang mencakup luasan 1.600 hektare, yang sebelumnya dikeringkan untuk kebun sawit. Pemulihan ekosistem dapat menyatukan kembali habitat satwa liar yang terfragmentasi, dan menciptakan koridor jelajah.

Bahkan TFCA Sumatera mendorong masyarakat mengelola kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan konservasi dengan perhutanan sosial. Pada umumnya, wilayah hutan di sekitar kawasan konservasi juga menjadi daerah jelajah satwa liar. Sementara di sisi lain, kawasan hutan di wilayah penyangga ini juga berdekatan dengan permukiman masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan, wilayah penyangga kawasan konservasi akan turut terjaga. Ada dua manfaat melibatkan masyarakat dengan skema perhutanan sosial: hutan terjaga, masyarakat berdaya.

Demi keberlanjutan upaya konservasi memang menuntut pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Perhutanan sosial dapat menjadi sarana pemberdayaan dengan cara memberikan izin kelola kepada masyarakat. Ada beberapa skema izin hak kelola: hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, ataupun kemitraan

Contoh bagus dapat dilihat di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Di sana, mitra TFCA memfasilitasi masyarakat adat mendapatkan izin mengelolan hutan adat yang berbatasan langsung dengan taman nasional. Kawasan hutan adat ini tidak hanya menyediakan habitat satwa liar, tapi juga menjadi daerah tangkapan air bagi wilayah sekitarnya.

Tak hanya itu, mitra juga meningkatkan ekonomi masyarakat sembari mengurangi perambahan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Caranya: mengajak masyarakat menanam kopi arabika di luar taman nasional. Pada titik ini, keluarnya sejumlah petani dari taman nasional mengurangi tekanan perambahan. Untuk memasarkan komoditas kopi, mitra TFCA Sumatera bekerjasama dengan perusahaan untuk menampung kopi arabika dari masyarakat.

Aksi nyata yang lain berasal dari sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mitra di Tanggamus, Lampung, memfasilitasi izin kelola hutan kemasyarakatan bagi kelompok-kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hasilnya menggembirakan.



Dengan membandingkan data 2008 (sebelum ada program TFCA Sumatera) dengan data 2015 (setelah ada program) terlihat meningkatnya pendapatan rata-rata tahunan rumah tangga rata-rata 300 persen: dari Rp 7,8 juta menjadi Rp 31,6 juta. Selain itu, semua panen dari hutan kemasyarakatan harus membayar retribusi non-pajak 6 persen dari harga rata-rata komoditas. Ini memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah sekitar Rp 41,8 miliar per tahun.

Yang lebih menggembirakan, petani hutan kemasyarakatan yang berhimpun dalam koperasi bisa mengakses kredit perbankan. Hal ini menunjukkan otoritas perbankan mempercayai keberlanjutan hasil dari hutan sosial. Akses kredit perbankan membuka peluang bagi petani untuk mengembangkan ekonomi lebih baik.

Dengan membandingkan data 2008 (sebelum ada program TFCA Sumatera) dengan data 2015 (setelah ada program) terlihat meningkatnya pendapatan rata-rata tahunan rumah tangga 300 persen: dari Rp 7,8 juta menjadi Rp 31,6 juta. Selain itu, semua panen dari hutan kemasyarakatan harus membayar retribusi non-pajak 6 persen dari harga rata-rata komoditas. Ini memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah sekitar Rp 41,8 miliar per tahun.

Yang lebih menggembirakan, petani hutan kemasyarakatan yang berhimpun dalam koperasi bisa mengakses kredit perbankan. Keberhasilan ini menunjukkan otoritas perbankan mempercayai keberlanjutan hasil dari hutan sosial. Akses kredit perbankan membuka peluang bagi petani untuk mengembangkan ekonomi lebih baik.

Kisah Berhikmah

Kopi untuk Konservasi

Di Renah Pemetik, lembah subur di tepi Taman Nasional Kerinci Seblat, sekitar 3 jam perjalanan dari Sungai Penuh, Jambi ada cerita tentang kopi. Di sana, kopi arabika tumbuh subur, dan menarik minat petani untuk meninggalkan 'lahannya' di dalam taman nasional.

Pada mulanya, tidak mudah untuk mengajak petani ke luar dari taman nasional. Bagi petani, beralih komoditas adalah pertaruhan hidup. Pada umumnya petani Renah Pemetik, dan petani dari luar daerah, menanam kopi robusta di 'lahanlahan' taman nasional. Lantaran berada di taman nasional, petani tak dapat merawat kopinya secara intensif, karena harus kucing-kucingan dengan petugas dan baru masuk taman nasional saat kopi berbuah.

Ini berbeda dengan kopi arabika yang menuntut perawatan dan ketekunan petani. Namun, hasil kopi arabika menjanjikan pendapatan yang lebih baik. Perawatan dan ketekunan merupakan syarat pertama. Syarat kedua, petani harus menanam kopi arabika di lahannya—bukan di taman nasional.

Salah satu anggota Konsorsium Akar Network: Lembaga Tumbuh Alami berusaha meyakinkan petani untuk menanam arabika di lahan miliknya. Awalnya, para petani ragu karena kopi arabika belum pernah ditanam di Renah Pemetik. Hingga Paidirman, salah seorang petani, memberanikan diri menanamnya. Berbekal bibit kopi dari TFCA Sumatera, Paidirman mulai menanam arabika di kebunnya. Kopi arabica Kerinci ini juga unik, umumnya kopi arabica berbuah musiman, tetapi kopi arabica Kerinci ini berbuah sepanjang tahun. Dengan demikian produksi kopinya bisa mencapai dua kali lipat dari produksi arabica pada umumnya.

Keberanian Paidirman melecut petani lain. Petani yang tergerak mengikuti Paidirman lantas mendapatkan pendampingan dari Lembaga Tumbuh Alami. Sejak 2013, saat TFCA—Sumatera mengawali program ini, setidaknya 60.000 bibit arabika telah diberikan kepada para petani. Saat ini, sedikitnya 77 keluarga, yang semula petani berpindah tebang bakar, beralih menjadi petani menetap kopi arabika.

Setiap tahun mereka bisa memanen sekitar 15 kilogram kopi merah dari setiap pohon. Paidirman misalnya, dengan 400 pohon dengan harga kopi mentah Rp 7.000 per kilogram, ia bisa mendapat sekitar Rp 45 juta setiap tahun.

Kopi arabika dari Renah Pemetik ditampung dan diolah PT. Agro Tropic Nusantara. Perusahaan lokal ini juga berperan dalam meningkatkan pendapatan petani dengan komitmen ekspor 1.000 ton per tahun.

Keberhasilan ini kontras dengan kisah Paidirman sepuluh tahun lalu. Ketika itu, dia kucing-kucingan dengan aparat karena merambah hutan taman nasional. Dia merasa gelisah dan tidak aman saat itu. "Saya hanya menebang satu hektare lahan, tetapi tetap saja itu dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Program ini menunjukan adanya kolaborasi yang positif antara petani sebagai produsen kopi dengan pasar dari sektor swasta. Kolaborasi ini juga dapat menjadi model korelasi antara konservasi dan ekonomi masyarakat yang menghubungkan konservasi hutan, hasil produksi, dan pasar di Sumatera maupun tempat lain.***

Aksi Konservasi untuk Paru-paru Dunia



Hutan tropis Kalimantan juga dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Selain menyimpan 15 ribu spesies bunga-bungaan, hutan Kalimantan juga rumah bagi satwa liar terancam punah: bekantan, orangutan, gajah kerdil, dan badak sumatera. Seperti halnya Sumatera, keanekaragaman hayati Kalimantan saat ini juga sedang terancam.

Masyarakat global menyadari hutan tropis di pulau ini berperan sebagai paru-paru dunia. Dengan demikian, rusaknya hutan Kalimatan akan berdampak luas, melintasi batas-batas wilayah Indonesia. Bersama Sumatera, laju kerusakan hutan di Kalimantan terbilang besar. Meski begitu, hingga kini kawasan hutan di pulau ini masih memberikan manfaat dalam menjaga dan melindungi plasma nutfah. Sekitar 55 persen luas kawasan hutan Kalimantan berperan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan memasok jasa ekosistem bagi masyarakat.

Untuk memastikan kelestarian sumber daya hayatinya, *Tropical Forest Conservation Act* Kalimantan (TFCA Kalimantan) melaksanakan program konservasi di pulau ini. Program TFCA Kalimantan merupakan kerjasama pengalihan utang yang kedua (TFCA-2) antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia. *Swap partner* pengalihan utang ini: The Nature Conservancy dan World Wildlife Fund for Nature untuk mendukung inisiatif *Heart of Borneo* dan Program Karbon Hutan Berau.

Program TFCA untuk melindungi keanekaragaman hayati yang langka dan terancam punah. Selain itu, program juga untuk merawat jasa ekosistem daerah aliran sungai, konektivitas antar-zona ekologi hutan, dan koridor yang bermanfaat bagi keanekaragaman hayati. Tak hanya itu, TFCA juga meningkatkan ekonomi melalui pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam dan pemanfaatan lahan berorientasi emisi rendah.

Berbagai upaya TFCA dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan berlangsung di setiap kabupaten sasaran. TFCA mendorong pertukaran ide konservasi dan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam konservasi spesies terancam punah, TFCA menyokong berbagai survei habitat dan survei okupansi. Salah satunya, melestarikan ekosistem hutan yang menjadi habitat orangutan. Untuk mendapatkan data awal, survei digelar di Kapuas Hulu, terutama di koridor Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Mitra TFCA menggelar survei tersebut dengan melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah.

Survei partisipatif ini menemukan 242 spesies pohon, yang 141 di antaranya sumber pakan orangutan. Data ini menunjukkan kawasan survei dapat menjadi lokasi pelepasliaran orangutan. Penetapan ini sesuai kriteria IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) tentang kelayakan tempat pelepasliaran orangutan.

Upaya mencari lokasi pelepasliaran begitu penting bagi pemulihan populasi orangutan kalimantan di alam. Apalagi mengingat banyaknya orangutan, yang layak dilepasliarkan, masih menghuni lembaga konservasi ex-situ. Dengan kata lain, banyak orangutan yang telah siap dilepasliarkan, sementara sangat sedikit kawasan yang layak

untuk lokasi pelepasliaran. Dan saat ini, kawasan survei tersebut telah menjadi tempat pelepasliaran orangutan.

Sementara itu, di Kutai Barat, Kalimantan Timur, KEHATI melalui TFCA Kalimantan dan mitra melakukan survei habitat badak sumatera di Kalimantan. Selain di Sumatera, satwa ini dapat ditemukan di Kalimantan dalam jumlah yang sangat terbatas. Berdasarkan analisis populasi dan kelayakan habitat (Population and Habitat Viability Analysis-PHVA) tahun 2016, populasi badak diperkirakan kurang dari 100 individu di alam.

Pada November 2018, para pihak berhasil menyelamatkan seekor badak di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Penyelamatan ini berkat kerjasama banyak pihak: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, WWF Indonesia, perguruan tinggi, mitra lokal, dan masyarakat. Badak yang diberi nama Pahu ini telah dipindahkan ke Suaka Badak Kelian, yang pembangunannya didukung TFCA Kalimantan.

Upaya lain konservasi spesies berlangsung di bentang alam Belantikan Hulu dan pegunungan Schwaner. Di sana, mitra TFCA menggelar survei bioekologi banteng, dan menemukan 10-20 banteng. Tes DNA mengungkap banteng di Kalimantan nampaknya berbeda dengan banteng di Jawa.

Untuk mendorong perhutanan sosial, TFCA memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola hutan desa di sejumlah lokasi di Kapuas Hulu, Berau, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Upaya ini ditindaklanjuti dengan penetapan areal kerja dan rencana kerja hutan desa. Tahap-tahap ini untuk memenuhi beberapa syarat dalam memperoleh hak kelola hutan desa. Sejak 2014, saat TFCA mulai berkiprah, program telah memfasilitasi terbitnya 23 izin hak kelola hutan desa, dengan total luas sekitar 112 ribu hektare.



Pengakuan pemerintah atas hak kelola akan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan di sekitar desanya. Pendampingan untuk masyarakat dilakukan dengan penguatan kelembagaan, penataan kawasan hutan, dan tata produksi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

Di sisi lain, dalam mitigasi perubahan iklim, KEHATI melalui program TFCA Kalimantan berupaya dengan penanaman dan pengayaan hutan, yang diiringi pencegahan alih fungsi lahan, pencegahan kebakaran hutan, dan patroli perlindungan. Upaya ini misalnya, nampak dari mitra TFCA dalam mendorong pengukuhan dan pengelolaan Hutan Lindung Sungai Lesan, Berau. Pengukuhan hutan lindung ini penting untuk mempertahankan cadangan karbon hutan.

Untuk pemanfaatan berkelanjutan, TFCA mendorong pengembangan produk unggulan hasil hutan nonkayu, seperti pewarna alami, madu, kerajinan, produk mangrove. Sementara itu, untuk pemanfaatan jasa lingkungan, TFCA menyokong pengembangan ekowisata di 17 lokasi di empat kabupaten sasaran.

Di tengah maraknya pembukaan hutan untuk kebun sawit, TFCA pun memfasilitasi kelompok petani karet alam di Kapuas Hulu. Pendampingan ini untuk meningkatkan pengelolaan kebun karet tradisional agar tidak dikonversi menjadi kebun sawit. Secara tradisional, petani menanam karet dengan kerapatan tinggi di hutan sekunder. Pengelolaan kebun karet pun biasanya ekstensif dengan perawatan ala kadarnya. Petani membiarkan vegetasi hutan sekunder tetap tumbuh alami bersama tanaman karet. Hasilnya, tumbuhlah hutan karet: campuran vegetasi hutan dan tanaman komoditas karet. Aspek ekologi dan ekonomi dari hutan karet tradisional itulah yang penting untuk dipertahankan.



Hanya saja, agar hasilnya memadai perlu adanya pengelolaan kebun karet yang efektif dari sisi ekologi dan ekonomi. Dari sisi ekologi, TFCA mengadakan pelatihan bagi petani karet tentang sadap lestari, pembuatan pupuk dan pestisida organik. Sementara dari sisi ekonomi, mitra meningkatan kapasitas petani dalam membuka akses pasar karet. Kegiatan ini memberikan dua dampak positif: kelestarian ekosistem dan manfaat ekonomi bagi petani.

Produk unggulan lain yang dikembangkan: madu hutan dari Taman Nasional Danau Sentarum dan sekitarnya di Kapuas Hulu. Kawasan ini dikenal sebagai sentra madu organik dengan pengelolaan lestari. TFCA dan mitra memfasilitasi kelompok-kelompok petani madu, atau *periau*, yang bergabung dalam beberapa perhimpunan. Ada beberapa periau yang difasilitasi TFCA: Asosiasi Periau Danau Sentarum, Asosiasi Periau Mitra Penepian, Asosiasi Periau Bunut Singkar, dan Asosiasi Periau Muara Belitung.

Bersama asosiasi tersebut, mitra TFCA menerapkan teknik panen madu lestari. Tekniknya: periau hanya mengambil bagian kepala sarang madu. Sebagai bentuk kendali mutu madu, periau menjalankan pengawasan internal secara ketat. Kemampuan untuk menyebarkan teknik panen lestari dan kendali mutu menjadi kunci bagi keberlanjutan produksi madu Kapuas Hulu. Dan, petani madu sangat menyadari kelestarian produksi madu sangat tergantung pada kesehatan ekosistem.

TFCA dan mitra pun mengembangkan ekowisata dengan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya, penguatan kelompok masyarakat dan lembaga adat untuk mengelola ekowisata dengan prinsip ekologi. Upaya ini untuk menambah wawasan masyarakat tentang kelestarian ekosistem yang penting bagi keberlanjutan manfaat ekonomi.

Di Kabupaten Berau misalnya, TFCA mengembangkan ekowisata mangrove di sepanjang pesisir Berau, danau Dua Rasa di Labuan Cermin, Kampung Merabu, Hutan Lindung Sungai Lesan, dan Teluk Sigending. Sementara di Kalimantan Barat, tepatnya di Kapuas Hulu, mitra mengembangkan ekowisata di Danau Sentarum dan Danau Empangau. Pun di lokasi-lokasi lain: Meliau, Melamba, Manua Sadap, Tanjung Lokang, dan Kedungkang, yang menawarkan jelajah alam, budaya, dan pengalaman hidup bersama masyarakat dayak Kapuas Hulu.





Kisah Berhikmah

Mengembalikan Marwah Tenun Dayak Iban

Terik siang telah menjelang, saat Yati Duba (45) menuju hutan yang berjarak setengah kilometer dari kampungnya. Dengan menggendong keranjang bambu di punggung dan sebilah pisau di tangan kanan, dia berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dikelilingi rerimbunan hutan.

Seperti umumnya perempuan di Sungai Abui, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kala sedang tak meladang, Yati mencari aneka dedaunan sebagai bahan pewarna alam untuk tenun Dayak Iban. "Ini Daun engkerbai, bagus buat pewarna cokelat," tuturnya seraya memetik daun tanaman yang mudah ditemui di hutanhutan hujan tropis Kalimantan itu.

Dua jam berlalu, Yati telah kembali ke kampungnya. Bersama perempuan-perempuan lainnya di Rumah Betang Sungai Sendik, Desa Sungai Abui, dia mulai mengolah aneka daun tersebut sebagai bahan pewarna. Rumah betang merupakan rumah tradisional Suku Dayak. Bentuknya memanjang. Satu rumah betang terdiri 18-20 bilik. Tiap bilik dihuni 3-4 keluarga.

Ada beberapa tanaman yang diolah. Selain engkerbai, ada rengat padi dan rengat akar untuk menghasilkan warna hitam dan merah. Daun mengkudu dan kunyit untuk warna kuning serta engkerbai laut untuk merah.

Semua daun-daun tersebut tumbuh di hutan-hutan di sekitar desa. Daun-daun tanaman tersebut direbus dalam air mendidih. Air hasil rebusan diaduk hingga mendapatkan warna yang diinginkan. Untuk menghasilkan warna kombinasi seperti ungu dan hijau, air daun dicampur dengan kapur tempuyung dari cangkang siput sungai.

"Untuk mengunci warna agar tidak luntur, kita juga pakai tawas atau kapur," kata Yati. Benang yang telah dicelupkan dengan pewarna alam lalu dibawa ke dalam rumah betang. Sejumlah perempuan tampak duduk bersila di hadapan alatalat tenun. Siang itu, seperti umumnya di harihari di luar meladang, para perempuan dewasa melakukan aktivitas menenun. Tenun Dayak Iban telah terkenal ke pelosok penjuru negeri, bahkan dunia internasional. Di samping nilai filosofisnya, pewarna alam membuat harga tenun tradisional ini menjadi tinggi. Harganya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 10 juta.

Meski pemanfaatan tanaman sebagai pewarna sudah turun-temurun, namun pengetahuan pewarnaan, pemahaman tentang tanaman pewarna alam, serta motif tenun, belum terkelola dan berkembang dengan baik. Pengetahuan umumnya hanya dimiliki oleh kalangan tua, dan terancam punah. Transfer pengetahuan dari generasi ke generasi menjadi sulit dilakukan.

Situasi ini membuat perajin tenun Dayak Iban tergoda beralih ke pewarna kimia atau sintetis. Selain murah dan lebih mudah mendapatkannya, pewarna sintetis juga memberikan warna yang lebih tajam pada kain tenun. Namun, hal ini harus dibayar mahal dengan menurunnya nilai ekonomis dan kesakralan tenun tersebut. Karena itu, sejak 2015, TFCA Kalimantan - KEHATI melalui mitranya, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) berupaya mengembangkan pengetahuan tentang pewarna alam untuk tenun ikat Dayak Iban di lima desa di Kecamatan Batang Lumpar dan Embaloh Hulu, Kapuas Hulu.

Melalui pendampingan, ada pengembangan ragam bahan pewarna baru, seperti tanaman rengat padi (*Tom indigofera*), rengat akar, engkerbai (*Psychotria viridiflora*), engkerbai laut, beting, jangau, empait, dan mengkudu kayu. Kini, warga juga membudidayakan tumbuhan pewarna sehingga lebih mudah diperoleh, serta mulai menguasai teknik pewarna alam secara lebih baik dan cepat.

Tenun Dayak Iban pun kini kembali ke jalur yang dulu digariskan nenek moyang. Hal tersebut tak sia-sia, difasilitasi oleh ASPPUK, pada 2017 lalu, tenun Dayak Iban berhasil tampil di dua ajang bergengsi: New York Fashion Week dan Jakarta Fashion Week.

Pemanfaatan tanaman pewarna ini diharapkan menjaga keberlanjutan lingkungan dan tradisi Dayak Iban. Lebih dari itu, kian berkembangnya usaha kecil tenun juga dapat memberi daya ungkit kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, ketergantungan terhadap sumber daya hutan dapat dikurangi. Selain merevitalisasi pewarna alam, TFCA-Kalimantan melalui ASPPUK pada 2017 juga membangun database motif-motif tenun Dayak Iban.

Dengan semangat melestarikan alam pula, KEHATI melalui TFCA-Kalimantan mengajak ibu-ibu Dayak Iban kembali menggunakan pewarna alami yang hampir ditinggalkan. Warga Dayak Iban pun kembali kepada alam dan hutannya, mengembalikan marwah tenun tradisinya.



Restorasi Koridor Halimun-Salak

Green Corridor Iniatives (GCI) adalah program kerjasama antara KEHATI, Chevron, dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Program multipihak ini sebagai upaya memulihkan hutan Koridor Halimun-Salak, yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat.

Koridor Halimun-Salak merupakan kawasan penting di taman nasional yang menghubungkan ekosistem Gunung Halimun dan ekosistem Gunung Salak. Kawasan penghubung ini menjadi daerah jelajah owa jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul jawa (*Panthera pardus*) dan elang jawa (*Nisaetus bartelsi*).

Sayang, habitat satwa di hutan koridor telah mengalami degradasi akibat perambahan dan pembalakan liar. Hal ini mengancam keberadaan satwa-satwa tersebut. Selain itu, rusaknya hutan koridor, yang berada di wilayah hulu beberapa sungai di Jawa Barat dan Banten, telah mengurangi fungsinya sebagai daerah tangkapan air.

Dengan demikian, pemulihan ekosistem koridor untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa penting di Jawa itu. Secara ekologi, hutan koridor memungkinkan populasi satwa di dua ekosistem Gunung Halimun dan Gunung Salak itu saling berinteraksi sehingga menambah peluang hidup.

Progam ini berjalan selama lima tahun yang dimulai sejak 2012. Di lapangan, program mulai pada 2013 telah melakukan penanaman 130 ribu pohon dari lebih 40 jenis pohon asli, dengan 46 ribu tegakan pohon yang ditanam di areal hutan seluas 230 hektare.

Aksi penanaman melibatkan masyarakat setempat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Koridor dan Kelompok Tani Peduli Hutan Kampung Padajaya, Desa Purwabakti.

Selain penanaman pohon, KEHATI dan mitra memetakan kelembagaan restorasi ekosistem Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Upaya itu dilengkapi dengan kajian baseline dan evaluasi program *Green Corridor Iniatives*. Aktivitas pertama melibatkan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, sementara kajian baseline dilakukan oleh Universitas Indonesia. Tujuan pemetaan dan kajian ini untuk mendukung efektifitas upaya restorasi hutan koridor.

Upaya restorasi koridor dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan dilakukan dengan pemanfaatan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi produktif melalui pengembangan pertanian terpadu yang memadukan pertanian dengan peternakan domba, wanatani, pembuatan pupuk cair dan kompos; serta pemberdayaan kelompok perempuan melalui Kelompok Rumah Pangan Lestari.

Di desa-desa sekitar koridor, KEHATI juga mengembangkan energi terbarukan dengan biogas yang dikemas dalam tabung 45 kilogram. Untuk media berbagi pengalaman, program juga membangun pusat pembelajaran untuk pertanian dan perubahan iklim terpadu di lahan seluas 1,2 hektare.

Upaya masyarakat melalui program ini di Kampung Cipeuteuy, Cisarua, dan Kampung Cipanas merupakan bagian dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan telah meraih penghargaan Kampung Iklim dari KLHK, secara berturut-turut tahun 2015, 2016 dan 2017.



Demi Martabat Bangsa

Pengelolaan Multistakeholder Forestry Programme-2 (MFP-2) oleh KEHATI telah berakhir pada 2013 silam. Namun program ini memuat pembelajaran berharga dalam memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Program ini meraih capaian luar biasa dalam mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Bisa dibilang, sistem verifikasi legalitas kayu menjadi salah satu tonggak penting dalam mendorong pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Dalam upaya menjamin tata kelola hutan yang baik, MFP-2 melibatkan masyarakat sipil, seperti Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatra (APIKS). Pelibatan ini untuk mendorong akuntabilitas dan kredibilitas SVLK.

Upaya itu membuahkan hasil: dunia internasional mengakui sistem verifikasi legalitas kayu Indonesia. Puncak pengakuan itu terjadi saat pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa menandatangani Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA).

Dengan perjanjian ini, Indonesia mendapat pengakuan internasional dalam menangani pembalakan liar melalui sistem terintegrasi. Capaian ini sekaligus meningkatkan martabat Indonesia di mata internasional: dari negara yang dikenal dengan pembalakan liar, kini menjadi pelopor tata kelola kayu secara sistemik. Ini mengingat Indonesia adalah negara pertama dengan sistem verifikasi legalitas kayu yang diakui Uni Eropa. Tak heran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menyebut MFP-2 sebagai program kerjasama yang paling berhasil, dan menjadi model bagi kerjasama luar negeri yang lain.

Salah satu upaya meneguhkan kepercayaan internasional terhadap SVLK adalah forum dialog interaktif bagi kalangan pasar kayu dunia. Dialog ini untuk memberikan informasi tentang kredibilitas kayu Indonesia, dan sekaligus forum bagi pelaku bisnis di negara-negara konsumen. KEHATI memfasilitasi dialog di beberapa negara: Perancis, Inggris, Belgia, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan.

Di tingkat masyarakat, KEHATI memfasilitasi unit manajemen hutan rakyat dan industri kecil-menengah untuk mendapatkan sertifikat SVLK. Untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendapatkan sertifikat SVLK, program membangun 'Klinik SVLK' di Solo, Bali, Jepara, dan Pasuruan.

Unit manajemen hutan rakyat yang difasilitasi MFP-2 untuk implementasi SVLK tersebar di Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Hingga akhir program pada 2013, ada 63 unit manajemen hutan rakyat yang mencakup luasan sekitar 35.000 hektare, telah difasilitasi dan bahkan telah lulus audit legalitas kayu.

Selain itu, MFP-2 juga menyiapkan 150 pendamping bagi unit manajemen hutan rakyat dan industri kayu. Para pendamping ini berasal dari penyuluh kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas penerapan sistem verifikasi legalitas kayu.







Pelestarian Bambu

KEHATI mendukung pemanfaatan hasil hutan non-kayu, salah satunya, bambu. Indonesia adalah rumah bagi 160 jenis bambu dari sekitar 1.400 jenis yang ada di dunia. Dari jumlah itu, 88 di antaranya adalah jenis bambu endemik. KEHATI dan PT. CIMB Niaga bekerjasama dalam konservasi bambu di Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Budidaya bambu dilakukan dengan menanam sedikitnya 15 ribu pohon bambu dengan variasi pemanfaatan seperti pangan rebung, bahan pembuatan angklung, dan bahan baku industri bambu. Selain itu KEHATI bersama Konsorsium Biologi Indonesia melakukan kajian mengenai jenis dan potensi bambu di Daerah Aliran Sungai Pemali Hulu, Kabupaten Brebes.



EKOSISTEM PERTANIAN

Sektor pertanian Indonesia menghadapi dua tantangan besar. Pertama, mendesaknya upaya mendorong produktivitas dan ketahanan pangan seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Kedua, daya dukung ekosistem yang kian menurun karena konversi lahan, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim.

Dari sisi populasi, Indonesia mengalami bonus demografi dengan melejitnya jumlah penduduk. Di sisi lain, sumber pangan dan ketersediaan lahan budidaya pangan semakin terbatas. Pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya karbohidrat, masih didominasi beras dan terigu. Akibatnya, konsumsi pangan belum beragam, belum memenuhi gizi seimbang, dan belum sehat.

Dengan keadaan seperti itu, tidak mengherankan pemanfaatan pangan lokal masih jauh dari optimal. Bayangkan saja, permintaan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi (1,49 persen per tahun). Semakin nyata pula dampak buruk perubahan iklim terhadap kapasitas produksi pangan domestik dan global.

Kembali ke Sumber Pangan Lokal

KEHATI mengembangkan pertanian ekologis dan teknologi yang selaras dengan kearifan lokal. Upaya ini dibarengi dengan pemberdayaan demi keberlanjutan manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Upaya terebut nampak dari kiprah KEHATI dalam program pelestarian plasma nutfah dan pemanfaatan sumber pangan lokal di Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Di Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores dan Lembata, KEHATI bersama mitra melestarikan dan memanfaatkan pangan lokal untuk ketahanan pangan. Kerja-kerja di lapangan meliputi latihan pembuatan bokasi dan pupuk cair sebagai pengganti pupuk kimia; menanam ragam pangan dan sayuran organik; mengembangkan kebun tumpangsari ragam pangan lokal.

Pertanian organik yang dikembangkan akan melindungi ekosistem sehingga lahan tetap subur dan menghasilkan tanaman yang sehat. Selain itu, dengan menanam bibit lokal akan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pangan dari luar daerah. Lagipula, selain mudah diperoleh, benih lokal juga sesuai dengan iklim dan tanah setempat.

Diversifikasi pangan lokal salah satu prioritas KEHATI di ekosistem pertanian. KEHATI berhasil menambah luasan lahan budidaya dengan komoditas sorgum, jagung, dan kacang-kacangan. Diversifikasi pangan tentu menghadapi berbagai tantangan, seperti bertambahnya populasi yang harus disertai dengan ketersediaan pangan bergizi. Arus modernisasi juga menggerus pola konsumsi masyarakat, dari mengkonsumsi pangan lokal beralih kepada pangan instan. Pergeseran ini disebabkan banyak hal: kurangnya pengetahuan tentang pangan yang beragam, yang bergizi seimbang, dan yang aman. Sebagian masyarakat masih memiliki prinsip konsumsi 'asal kenyang.'

Bila menilik kembali riwayat pangan lokal, daerah-daerah di Indonesia memiliki aneka sumber bahan makanan. Salah satunya: sorgum. Tumbuhan ini multiguna dengan banyak keunggulan. Sorgum unggul dalam beberapa hal: mudah dibudidayakan, minim perawatan, adaptif di semua lahan, dapat dipanen lebih sekali dalam satu periode tanam, tidak butuh banyak air, dan tidak mudah terserang hama.



Dahulu, sorgum banyak ditemui di daerah-daerah lahan kering dan marginal, seperti di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Tengah, sorgum disebut *cantel*. Di Nusa Tenggara Timur, tanaman ini punya banyak nama: *pena mina, jagung solor, mesak, watablolo, lolo, jagung rote, terae, penbuka,* dan *wataru*.

Perlahan, sorgum hilang karena tak lagi ditanam, ataupun karena kebijakan yang tak berpihak pada pangan lokal. Sebelum langka, sorgum sebenarnya biasa ditanam secara tumpangsari.

Masuk akal bila sorgum tak lagi banyak dikenal masyarakat masa kini. Padahal, nilai nutrisi sorgum tak kalah dengan padi dan jagung. Bahkan, sorgum berpotensi menggantikan terigu yang hingga kini masih impor.

Sorgum cocok jadi alternatif pangan karena mampu tumbuh saat kemarau panjang dan bisa hidup di daerah kering, berbatu, dan marjinal. Sorgum juga tidak butuh pupuk sehingga tidak membahayakan unsur hara tanah.

Karena itulah KEHATI mendukung pemanfaatan pangan lokal untuk daerah kering di Indonesia timur. Fokus programnya: memanfaatkan kembali pangan lokal yang terabaikan—jelai, jewawut, sagu, sorgum, keladi, dan umbi-umbian. Dengan memanfaatkan pangan lokal, cita-cita ketahanan pangan akan tercapai, sambil merawat sumber daya genetiknya.

Nusa Tenggara Timur yang didominasi lahan kering menjadi salah satu lokasi program KEHATI dalam memanfaatkan pangan lokal berbasis masyarakat. Ini terutama untuk jenis ragam sorgum. Sejak 2013 sampai sekarang, program ini difokuskan di Pulau Flores, mulai dari Manggarai Barat, Flores Timur, dan pulau kecil: Adonara, Solor, dan Lembata.



Secara turun-temurun, masyarakat Nusa Tenggara Timur punya tradisi mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat selain beras—termasuk sorgum. Bahkan, di Nggela, Kabupetan Ende, ada upacara khusus *Nggoa lolo:* tradisi 'penghormatan' sorgum.

Namun seiring kebijakan pangan beras, masyarakat semakin meninggalkan pola pangan lokal, dan beralih pada beras. Seiring dengan itu, tradisi lokal sebagai 'penghargaan' terhadap sumber pangan pun perlahan hilang.

Dampak lainnya, ragam benih lokal seperti sorgum, jagung, kacang, dan padi pun terancam punah. Benih-benih lokal ini tergeser benih hibrida dan organisme rekayasa genetik (GMO-genetic modified organism) yang kemudian menjadi benih 'wajib' dari pemerintah.

Di tingkat komunitas, KEHATI mendorong penguatan lembaga dengan membentuk lumbung desa untuk melembagakan kearifan lokal. Lumbung sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benih yang disepakati masyarakat. Program ini sebagian besar diikuti kaum perempuan.

Untuk berbagi pengalaman, mitra KEHATI menularkan model pengolahan lahan, budidaya sorgum, dan tumpangsari di lahan kering. Model pertanian ekologis ini telah menjadi rujukan di beberapa desa dan kecamatan lain. Di masa datang, upaya ini diharapkan menginspirasi pihak lain untuk mempraktikkan pertanian ekologis di daerah-daerah lain di Indonesia.

Sejauh ini, perluasan lahan budidaya sorgum telah mencapai 102 hektare di delapan kecamatan. Kegiatan ini juga diiringi dengan dukungan bagi pengolahan dan pemasaran sorgum. Kini, puskesmas, posyandu, dan sekolah telah memanfaatkan sorgum dan pangan lokal lainnya sebagai bahan makanan tambahan.

Program Koridor Pangan Lokal Flores ini melahirkan beberapa inisiatif di tingkat lokal. Misalnya saja, sorgum menjadi makanan tambahan bagi ibu hamil, dan untuk mengurangi gizi buruk balita di Manggarai Barat dan Flores Timur. Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian juga menetapkan Flores sebagai pusat penelitian sorgum dan tempat pengadaan benih.



Kisah Berhikmah

Berkah Sorgum di Lahan Kering

Hamparan tanaman sorgum siap panen terbentang luas di lahan seluas 40 ha, di Dusun Likotuden, Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Flores Timur. Sejauh mata memandang, bulirbulir sorgum menjelma bak permadani di kaki langit. Tak pelak, binar kebahagiaan pun terpancar dari wajah petani Likotuden. Warga Kawalelo pun lega karena desanya akan terbebas dari rawan pangan di masa paceklik. Cadangan pangan begitu melimpah.

Siapa yang menyangka jika di lahan kering tandus, yang kerap disebut batu bertanah, sorgum dapat tumbuh subur dan menjadi rujukan untuk belajar soal tanaman di lahan kering. Sebelumnya, banyak pihak yang akan mendukung program sorgum namun tidak mau menetap secara intens mendampingi petani.

"Umumnya, tawaran bantuan yang datang dari LSM sifatnya bukan pendampingan," ujar Uskup Larantuka Mgr. Frans Kopong. Pendampingan di Likotuden baru dilakukan ketika Maria Loretha, atau Mama Sorgum, penerima KEHATI Award 2012, bergabung di Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel).

Mengenalkan sorgum di Likotuden bukan hal yang mudah. Menurut Direktur Yaspensel Keuskupan Larantuka, Romo Benyamin Daud Pr, awalnya sangat sulit untuk mengajak petani bekerja keras menggarap lahan berbatu. Namun, setelah menunjukkan sorgum mampu bertahan pada kondisi alam yang makin sulit ditebak, para petani mulai bersemangat.

"Saat curah hujan terbatas akibat perubahan iklim, sorgum terbukti sangat cocok di lahan kering. Padahal, jagung dan padi yang ditanam bersamaan sudah mati semua," ungkap pastor yang selalu terjun mendampingi petani ini.

Alhasil, gerakan menanam sorgum semakin meluas. Jika sebelumnya di Lembor dan Flores Timur, kini menyebar ke Ende, Manggarai, Lembata dan Maumere.

Kerja keras para penggerak sorgum mulai menarik dukungan dari banyak pihak. Dari sisi kesehatan, Puskesmas Demon Pagong, Flores Timur, telah menjadikan sorgum sebagai makanan tambahan balita untuk mengatasi gizi kurang dan gizi buruk. Kementerian Pendidikan dan Kebudayan membangun PAUD sorgum di Likotuden, sebagai upaya mengenalkan pangan lokal sejak dini. Tak hanya itu, Menteri Pertanian akhirnya mencanangkan penanaman sorgum di Flores Timur dengan target 1.000 hektare pada Oktober 2016.

Kini, sorgum menjadi sumber pangan harian. Petani sepakat, panen sorgum hanya 40 persen yang dijual, sisanya untuk konsumsi. "Ini mukjizat. Berkat sorgum, desa ini mulai dikunjungi, baik untuk wisata atau belajar sorgum. Petani tak lagi khawatir rawan pangan," ungkap Romo Benyamin.

Pada 2018, inisiatif Puskesmas Demon Pagong menjadi kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Flores Timur menggulirkan 'Gempur Stunting dengan Pangan Lokal' dan memanfaatkan sorgum dan kelor (SoLor) dalam program 'Makanan Tambahan Mengatasi Gizi Buruk dan Stunting' di Flores Timur. Dan sampai 2019, luasan lahan penanaman petani telah mencapai 200 hektare di Flores Timur dan Lembata.

Pertanian Organik Sangihe

Di gugusan kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, KEHATI mengembangkan budidaya hortikultura organik dengan memanfaatkan pupuk organik. Secara mandiri, kelompok tani yang telah mampu memproduksi pupuk organik hayati dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu. Kelompok di Desa Lenganeng misalnya, tak hanya mendapatkan penghasilan dari panen, tapi juga dari penjualan pupuk organik.

KEHATI membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga donor, universitas, lembaga penelitian, dan kelompok swadaya masyarakat. Kemitraan itu diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak: pemerintah daerah Sangihe, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, LIPI, Universitas Gadjah Mada, Ford Foundation, BNI 46, dan Asosiasi Petani Organik Komunitas Mandiri Sangihe (APO KOMASA). Para pihak inilah yang mendukung program KEHATI di Sangihe.

Untuk memperkuat kelembagaan, mitra KEHATI meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati dengan komoditas unggulan: pala, sagu, kelapa dan cengkeh. Aktivitas ini melibatkan para petani anggota APO KOMASA. Untuk menjaga mutu produk, sebelas kampung telah memperoleh sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik ECOCERT .

Mitra KEHATI dan pemerintah setempat mendeklarasikan Sangihe sebagai Kabupaten Organik. Para pihak juga menyepakati Sangihe akan menurunkan pemakaian pupuk kimia dan zero pupuk kimia dalam dua tahun. Selain itu, pemerintah Sangihe menetapkan program gerakan konsumsi pangan lokal dua hari tanpa nasi dalam seminggu. Upaya ini untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan menurunkan masuknya beras dari pulau lain. Di tahun 2018, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerbitkan peraturan bupati tentang pertanian organik.





Kisah Berhikmah

Sejahtera Lewat Pala, Berdaulat dengan Sagu

Namanya Tjuk Nyak Dien Tendakunusa (48). Meskipun namanya mirip dengan pahlawan nasional asal Aceh, Tjut Nyak tak memiliki kaitan dengan Bumi Serambi Mekah. Ia perempuan asli Desa Karatung Satu, Manganitu, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

"Bapak saya memang mengagumi Tjuk Nyak Dien. Makanya, saat lahir, saya diberikan nama itu. Paling tidak biar semangatnya bisa menular ke saya," tuturnya.

Sebagai pemimpin perempuan di desanya, Tjuk Nyak adalah pahlawan bagi warganya. Berkat usahanya, pala dan sagu Sangihe naik kelas.

Selama 12 tahun dia dipercaya sebagai Kepala Desa Karatung Satu. Masa awal menjabat bukan perkara mudah baginya. Sebagai perempuan yang saat itu masih relatif muda, dia diharapkan membangkitkan pembangunan desanya yang mulai stagnan. Hal ini akibat lesunya

produktivitas pala dan sagu, dua komoditas sumber penghidupan utama warga.

"Anak-anak muda enggan lagi berkebun. Pohon-pohon sagu menjadi kurang terurus. Jumlahnya berkurang," ujar dia.

Akhirnya, dia membuat gebrakan dengan membangun jalan-jalan menuju kebun pala dan sagu yang umumnya terletak di areal lahan miring, berbukit dan susah dijangkau.

Tak hanya itu, dia juga membangun saluran irigasi untuk pasokan air bagi tanaman dan untuk mengolah tepung sagu di dekat kebun. Pada 2012, Tjut Nyak Dien menjadi salah satu wakil petani yang mengikuti pameran Terra Madre Slow Food di Turin Italia.

Upayanya tak sia-sia. Kemudahan akses membuat anak-anak muda kembali berminat berkebun. Namun, masalah pasar menjadi kendala. Bersama cengkeh dan kelapa, pala, fuli (kulit ari buah pala) dan sagu adalah tanaman perkebunan utama di Pulau Sangihe. Permainan tengkulak menjadi hambatan bagi petani untuk dapat menikmati keuntungan lebih—khususnya dari pala dan sagu. Sementara produk olahan untuk dua komoditas tersebut belum berkembang akibat kurangnya keterampilan dan pengetahuan.

Karena itu, sejak 2009, Yayasan KEHATI hadir di Sangihe melalui kesepakatan dengan pemerintah daerah Sangihe. Kesepakatan ini untuk pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah pulau kecil. Dengan menggandeng mitra lokal, KEHATI mengembangkan potensi lokal, khususnya pertanian dan ekowisata sebagai sumber kemandirian ekonomi dan pangan secara lestari. Salah satunya melalui pertanian organik.

Program ini mendorong produk-produk pertanian, khususnya rempah Sangihe, masuk ke pasar ekspor—termasuk ke ceruk pasar khusus. Sejak 2016, ada sekitar 271 petani yang berhimpun dalam organisasi berbentuk koperasi. Mereka tergabung dalam Asosiasi Petani Organik (APO) Komunitas Masyarakat Sangihe Mandiri (KOMASA).

Khusus komoditas perkebunan, seperti pala, sagu, kelapa, fuli, dan cengkeh, KEHATI mendorong tata kelola pertanian organik dan berkelanjutan melalui sertifikasi organik Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Ecocert. Dengan sertifikasi ini, komoditas dari Sangihe memiliki sertifikat untuk pasar Eropa dan Amerika sebagai produk organik.

Tjut Nyak merupakan salah satu perintis APO-KOMASA. "Kehadiran KEHATI sangat membantu kami memecahkan persoalan bagaimana petani pala dan sagu punya masa depan yang lebih baik dengan pasar yang lebih potensial," ungkapnya.

Tak hanya melalui APO-KOMASA, Tjuk Nyak juga merintis Kelompok Tani Lestari di desanya. Difasilitasi KEHATI, melalui kelompok tani tersebut, Tjut Nyak mengarahkan perempuan-perempuan di desanya untuk mengolah tepung sagu menjadi aneka penganan.

Upayanya tidak sia-sia. Sagu, makanan asli setempat yang mulai tersingkir oleh beras, lambat-laun kembali banyak diproduksi.

Sartika Tendakunusa (34), ketua Kelompok Tani Lestari Karatung Satu, mengungkapkan, pengembangan produk olahan sagu membantu perekonomian keluarga. Setiap bulan, Kelompok Tani Lestari di Desa Karatung Satu yang beranggotakan 35 orang itu mampu meraup pendapatan rata-rata Rp25-30 juta, khusus dari mie sagu.

"Permintaan sudah berkembang hingga ke Manado, Makasar, bahkan Jakarta," ungkapnya. Salah satu respons positif atas program organik, pemerintah Kabupaten Sangihe pada November 2017 lalu, mendeklarasikan Sangihe sebagai Kabupaten Organik. Selain itu, Sangihe juga menyepakati menurunkan pemakaian pupuk kimia dan zero pupuk kimia dalam dua tahun.

Pemerintah Kabupaten Sangihe telah menetapkan program gerakan konsumsi pangan lokal dua hari tanpa nasi dalam seminggu sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan menurunkan masuknya beras dari pulau lain. Ini tentu kabar gembira untuk masa depan keberlanjutan pertanian organik sekaligus upaya membangun kedaulatan pangan di Sangihe.

Sementara bagi Tjuk Nyak, sertifikasi organik diharapkan tak sekadar membuka peluang bagi kesejahteraan warga. Tapi, juga sebagai langkah terbaik untuk menjaga kelestarian alam Sangihe.

"Kami di pulau. Jauh dari mana-mana. Kalau sagu habis karena ditinggalkan, sementara pala hasilnya begitu-begitu saja, kehidupan kami ke depan akan sulit. Kita semua, termasuk pemerintah, harus serius menindaklanjuti apa yang sudah dirintis KEHATI," tandasnya.

Tata Kelola Sawit Rakyat

Keterlibatan KEHATI dalam tata kelola kelapa sawit didasari keprihatinan atas perkembangan sawit yang berdampak pada sumber daya hayati. Ini dapat diihat dari fenomena ekspansi masif kebun sawit di kawasan hutan di berbagai daerah. Perkembangan ini sungguh mengkhawatirkan bagi kelestarian keanekaragaman hayati.

Untuk menangani masalah tersebut diperlukan solusi cerdas untuk mencegah kerusakan sumber daya hayati yang lebih besar. Tak pelak lagi, pengendalian dan penataan kebun sawit di kawasan hutan amat mendesak. Beberapa opsi solusi ada di depan mata: penegakan hukum, penaatan regulasi, resolusi agraria, sampai pengembangan model-model pengelolaan sawit yang memperhatikan keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, KEHATI melihat ekspansi sawit ke kawasan hutan dilakukan oleh rakyat atau pekebun kecil. Dalam kasus lain, rakyat dijadikan alasan pihak lain untuk membuka kebun sawit ke kawasan hutan. Hal ini menunjukkan adanya eksploitasi dari pihak lain kepada pelaku kecil, dan pembiaran bagi pekebun agar tetap bergantung pada usaha sawit. Dengan kata lain, ada sejumlah tipologi yang menyebabkan adanya sawit rakyat di kawasan hutan.

Memahami persoalan itu, KEHATI melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mengangkat peran pekebun kecil dalam mengelola sawit secara efisien dan ramah lingkungan. Pada tahap selanjutnya, hal itu akan mencegah meluasnya ekspansi sawit ke kawasan hutan.

Sejalan dengan perkembangan di atas, sejak Juni 2016, KEHATI mendapat amanah dari pemerintah untuk terlibat dalam Tim Penguatan Skema Sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Tim multipihak yang dibentuk Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian ini memiliki tugas dan peran yang cukup besar. Dan, hal itu membuka pintu bagi KEHATI untuk mencari solusi persoalan sawit rakyat.

Langkah KEHATI merupakan salah satu ikhtiar mewujudkan pengelolaan sawit yang bertanggung-gugat, berkeadilan, serta memastikan perlindungan sumber daya hayati. Peran KEHATI menjembatani perbaikan tata kelola sawit dan memfasilitasi proses penyusunan regulasi terkait ISPO.

Tujuan awalnya: memperbaiki kebijakan melalui peraturan presiden tentang sertifikasi ISPO. Namun pada perkembangannya, KEHATI memperluas cakupan kerjanya: meningkatkan kapasitas sawit rakyat dalam memenuhi aspek keberlanjutan. Ini sebagai respon atas tantangan di lapangan yang sangat beragam, yaitu kapasitas masyarakat belum cukup dan aspek legalitas belum terpenuhi.

Sebagai langkah awal, KEHATI bersama mitra melakukan pemetaan dan pendataan sawit di Indonesia. Hasilnya, peta tutupan sawit mencakup luasan sekitar 16,8 juta hektare. Dari pemetaan ini sekaligus diketahui sekitar 3,47 juta hektare sawit rakyat ada di kawasan hutan.

Dengan demikian, peran KEHATI bukan hanya di ranah regulasi, tapi juga membangun model-model penyelesaian masalah sawit rakyat di lapangan. Beberapa

upaya dilakukan KEHATI bersama mitranya: pendampingan untuk pendataan, pemetaan, dan mencari solusi sawit rakyat yang ada di kawasan hutan.

Untuk itu, KEHATI dan mengembangkan pilot proyek bagi penyelesaian sawit rakyat di kawasan hutan. Di Kalimantan Timur misalnya, proses yang berkembang di pilot proyek telah sampai pada penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: apakah kawasan hutan akan dilepas, apakah dengan penegakan hukum, ataukah ada solusi lain

Salah satu solusi alternatif: pengembangan agroekosistem bagi kebun sawit yang ada di kawasan hutan. Agroekosistem telah dikenal masyarakat dengan berbagai sebutan: *simpuk* di Kalimatan Timur, *tembawang* di Kalimantan Barat, *repong* di Lampung Barat, *para* di Sumatra Barat, dan *talun* di Jawa Barat. Hanya saja, untuk sawit memang belum ada contohnya.

Hakikatnya, model-model agroekosistem tersebut sering berkaitan dengan arus utama komoditas. Intinya, penataan sawit rakyat untuk mendorong pengelolaan kebun secara intensif, mencegah degradasi lingkungan, dan menata legalitas lahan. Hasil akhirnya, tak ada lagi ekspansi sawit di kawasan hutan.







EKOSISTEM PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 14 ribu, dengan panjang garis pantai 95 ribu kilometer. Tak kurang 60 persen dari sekitar 250 juta penduduk tinggal di pesisir dengan kesejahteraan yang rendah. Namun, pola pemanfaatan di kawasan ini, dan usaha perikanan berlebihan, telah menjadi ancaman serius bagi daya dukung ekosistem pesisir. Merespons ancaman tersebut, KEHATI melaksanakan berbagai kerja konservasi di ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.



Merajut Benteng Pesisir Utara Jawa

Keadaan pantai utara (pantura) Jawa sudah tidak seperti dulu lagi. Kawasan hutan mangrove yang dulu rimbun telah berubah menjadi tambak. Hampir 90 persen hutan mangrove pantura telah sirna dari kawasan pesisir. Padahal, hutan mangrove adalah benteng alam yang melindungi daratan dari gerusan air laut, angin, dan ombak.

Akibatnya, abrasi menggerus daratan, air laut semakin dekat ke permukiman. Dinding-dinding rumah rusak karena penetrasi garam. Kondisi ini kemudian membuka mata sebagian kelompok masyarakat yang tinggal di pantura, seperti di Brebes, Jawa Tengah, dan Indramayu, Jawa Barat.

Sebagian masyarakat Brebes yang tinggal dekat laut mulai resah dan ingin bertindak untuk mencegah abrasi yang kian parah. Melalui upayanya sendiri, mereka berinisiatif menanam mangrove untuk menghidupkan kembali benteng alam yang hilang.



Tak hanya menanam, kelompok masyarakat di Pandansari, Brebes, juga gencar berkampanye melestarikan hutan mangrove lewat pementasan budaya. Mitra Mangrovesari misalnya, merupakan salah satu mitra yang berhasil mandiri dalam keberlanjutan program pelestarian pesisir. Tak mengherankan, Mangrovesari meraih sejumlah penghargaan dan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak—termasuk Kalpataru.

Menangkap inisiatif masyarakat Pandansari, KEHATI memberikan dorongan untuk lebih mengembangkan upaya mengembalikan benteng alam. Upaya penghijauan pesisir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di Brebes saja, sudah 200 hektare dihijaukan dengan dua juta lebih tanaman mangrove. Selain itu, upaya pengembangan masyarakat juga memberikan sinyal positif.

Pandansari merupakan model desa adaptasi iklim yang dirintis KEHATI. Hal itu mengingat dampak negatif perubahan iklim begitu nyata di desa pesisir ini. Model desa adaptasi iklim ini melanjutkan program jangka panjang rehabilitasi pesisir dan pendampingan masyarakat yang sudah ada sejak 2009. Dengan dukungan perguruan tinggi setempat, KEHATI menghasilkan kompilasi peta desa yang terabrasi, data kawasan terdampak bencana, dan berbagai data penting lainnya. Data-data ini berguna untuk menjadi bekal mitigasi perubahan iklim di pesisir Pandansari

Dari sisi ekonomi, usaha masyarakat menggeliat dengan budidaya kerang, tangkapan kepiting dan udang. Peternakan kambing yang menggunakan daun mangrove sebagai pakan juga berkembang baik. Tidak mengherankan konservasi mangrove di Brebes menjadi percontohan bagi daerah yang lain. Jaringan semakin luas, dukungan dari berbagai pihak pun berdatangan.

Perjuangan kelompok Mangrovesari terus bergulir. Setelah berhasil menyatukan visi membangun desa dan merehabilitasi mangrove, Mangrovesari mengembangkan ide baru: Dewi Mangrovesari atau Desa Wisata Mangrovesari.

Rupanya, hutan mangrove yang rimbun menumbuhkan gagasan dan kreativitas warga untuk destinasi baru itu. Destinasi yang dicanangkan pada 2015 ini mendapat dukungan dan pendampingan dari KEHATI.



Dewi Mangrovesari kini menjadi tujuan wisata utama di Brebes dan Jawa Tengah. Dampak positifnya: tercipta lapangan kerja baru, mulai dari pemandu, penyewaan kapal wisata, sampai petugas kebersihan. Warga juga berkesempatan membuka warung makan, kios suvenir, hasil kerajinan, serta oleh-oleh khas Pandansari. Mangrovesari memegang seluruh pengelolaan kawasan wisata ini.

Pada musim liburan dan hari besar, tak kurang dua ribu orang mengunjungi Pandansari. Pendapatan kotor saat ini mencapai Rp 8 miliar setiap tahun, yang dihitung dari omzet langsung kegiatan wisata dan dampak tidak langsung dari ekonomi yang bergulir.

Keberhasilan ini berefek domino: ekonomi desa meningkat, Pandansari dan Mangrovesari meraih berbagai penghargaan. Mashadi sebagai penggerak kelompok mendapatkan penghargaan Kalpataru. Sementara Ketua Kelompok Rusjan meraih penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kini, Pandansari menjadi tujuan belajar bagi desa lain yang akan mengembangkan konservasi mangrove dan wisata desa.

Pandansari hanya salah satu kiprah KEHATI dalam konservasi dan rehabilitasi pesisir. Program rehabilitasi mangrove juga berlangsung di wilayah-wilayah lain.

Pemulihan mangrove dukungan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR) misalnya, menyentuh kawasan pesisir dari Sumatera sampai Maluku. Upaya ini merentang dari Sumatera: Aceh dan Lampung; lalu Jawa: DKI Jakarta, Indramayu, Brebes, Tegal, Cilacap, Yogyakarta, Situbondo, Malang Selatan; berlanjut ke Sulawesi: Majene; Kalimantan: Penajam Paser, Delta Makaham, Mempawah; sampai di Teluk Ambon, Maluku.

Untuk menunjang pendidikan, diterbitkan modul pendidikan lingkungan ekosistem mangrove, pembentukan Jaringan Pelestari Mangrove di Brebes, Indramayu, Jakarta, Tegal, serta Jambore Mangrove dengan dukungan CSR UPS. Selain di Brebes dan Indramayu, konservasi hutan mangrove juga dilakukan di Jakarta. KEHATI bekerjasama dengan berbagai pihak juga mengembangkan *Mangrove Education Center* (MEC) di Pantai Indah Kapuk. Fasilitas ini sebagai sarana pendidikan untuk menyadarkan masyarakat kota tentang pentingnya hutan mangrove. Berbagai modul pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini sampai SMA menjadi penunjang bagi pusat pendidikan hutan mangrove.



Ekowisata Bahari yang Memberdayakan

Untuk memerangi eksploitasi alam, diperlukan pendekatan yang berdampak positif bagi konservasi maupun ekonomi masyarakat. Salah satunya, dengan ekowisata.

Ekowisata adalah sebentuk wisata yang bertanggung jawab. Baik masyarakat lokal dan pengunjung sama-sama dituntut memiliki kesadaran menjaga kelestarian lingkungan di lokasi wisata. KEHATI memandang ekowisata sebagai pendekatan yang lebih mudah diterima masyarakat, tidak menciptakan kontroversi, memberikan manfaat ekonomi, dan menjaga lingkungan.

Dengan pemikiran itu, KEHATI mendorong ekowisata untuk pengelolaan pulau kecil berbasis masyarakat. Perlahan tapi pasti, ekowisata juga dapat mengubah persepsi masyarakat dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati di daerahnya.

Salah satu buktinya: Desa Bohisilian di Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Dahulu desa ini memiliki reputasi buruk dalam memanfaatkan sumber daya laut. Misalnya saja, nyaris seluruh masyarakat Bohisilian menggunakan bom dan racun untuk menangkap ikan. Ini mendorong KEHATI mengenalkan konsep ekowisata kepada masyarakat. Ekowisata menjadi pilihan menarik karena alam Pulau Maratua luar biasa indah.

Setelah negosiasi panjang, akhirnya masyarakat berubah menjadi agen konservasi lingkungan. Semua elemen masyarakat meninggalkan praktik yang tak ramah lingkungan. Kini, mereka justru bersemangat menjaga lingkungan untuk keberlanjutan ekowisata.

Keberhasilan Bohisilian kemudian diterapkan di desa-desa lain. Alhasil, desa-desa lain pun bersepakat mengelola Pulau Maratua secara lestari dan bertumpu pada ekowisata. Untuk kemandirian, masyarakat membentuk badan usaha berupa perseroan terbatas 'Maratua Lestari.'

Pengelolaan pulau-pulau kecil dengan melibatkan beberapa desa, lalu bergabung menjadi unit usaha adalah yang pertama di Indonesia. Hal ini menarik perhatian kementerian terkait, yang kemudian ikut memberikan dukungan.

Sebagai model ekowisata, upaya konservasi di Pulau Maratua mampu mempengaruhi kebijakan baik di tingkat lokal maupun pusat. Selain itu, ekowisata juga menumbuhkan ketertarikan dunia pendidikan. Misalnya saja, Universitas Gadjah Mada melakukan Kuliah Kerja Nyata di Pulau Maratua selama lima tahun dengan program tematik ekowisata.

Sebagai wujud dukungan yang berkelanjutan, KEHATI menggelar Maratua Jazz dan Dive Fiesta. Maratua Jazz merupakan wisata konser musik jazz, sedangkan Dive Fiesta adalah wisata menyelam.

Ekowisata bahari yang dikembangkan bersama masyarakat Maratua ini mendapat dukungan program dan pengadaan sarana wisata dari PT. Chevron Indonesia. Di Desa Bohe Sellian misalnya, telah berdiri *dive center* dengan peralatan selam yang lengkap sebagai penunjang ekowisata.

Melihat dampak positif ekowisata Maratua, KEHATI kemudian mengembangkan konsep serupa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pada awalnya, pembangunan di Kepulauan Sangihe mengarah pada sektor pertambangan. Menimbang risiko kerusakan lingkungan dari pertambangan, KEHATI mendorong masyarakat Sangihe mengembangkan potensi ekowisata yang belum tergarap.



Sangihe merupakan kabupaten kepulauan dengan potensi wisata alam di darat dan di laut. Dengan potensi itu, KEHATI mendorong pemerintah kabupaten mengembangkan sumberdaya hayatinya untuk modal keunggulan daerah. Ekowisata kini menjadi program kerja unggulan Sangihe, yang disertai dengan pengembangan perikanan dan olahan hasil perikanan. Di sektor perkebunan, KEHATI pun mendukung perkebunan pala organik.

Kisah Berhikmah

'Punggawa' yang menjadi Penyelamat Lingkungan

Sejak dahulu kala, warga suku Bajau di Pulau Maratua, Kepulauan Derawan, dikenal sebagai pelaut tangguh. Mereka mengarungi laut, dan memanfaatkan hasil laut untuk kehidupan. Bahkan ada ungkapan: anak Bajau yang baru lahir langsung berinteraksi dengan laut.

Laut bagi suku Bajau adalah ibu: tempat berlindung, menyusu, sumber kehidupan dan kedamaian. Masyarakat Bajau yang terpusat di kampung-kampung nelayan ini memiliki tatanan sosial dan ekonomi.

Dalam tatanan suku Bajau, seseorang yang disebut *punggawa* memiliki peran penting dalam memandu kehidupan. Mereka menumbuhkan nilai kepercayaan, ikhlas, dan saling menyayangi. Saat paceklik, mereka akan menanggung beban bersama-sama. Saat hasil melimpah, mereka ikut mereguk untung berlipat.

Adalah Darmansyah, seorang punggawa yang disegani karena kepemimpinannya. Pergaulannya yang melintas batas negara dan kelas sosial membuat pandangannya luas. Kualitas diri inilah yang memberi peluang bagi KEHATI untuk berkiprah di Pulau Maratua.

Pada awalnya, kehadiran KEHATI bersama mitra BESTARI tidak berjalan mulus. Masyarakat telanjur apatis karena bosan dengan janji-janji pemerintah yang tidak terwujud.

Konflik yang mencuat antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan konservasi membuat masyarakat semakin curiga. Namun, upaya konservasi harus dilakukan di wilayah ini. Bisa dibayangkan, masyarakat terbiasa menangkap ikan dengan bom dan racun. Bahkan, para punggawa mendukung dan memasok berbagai kebuuhan untuk kegiatan tak ramah lingkungan itu.

Kondisi seperti benang kusut itu berangsur terurai ketika Darmansyah hadir dalam beberapa dialog bersama masyarakat. Titik balik terjadi ketika Darmansyah memutuskan mendukung pelestarian, dan bersedia menjadi ujung tombak konservasi.

"Sudah saatnya kita mengubah kebiasaan merusak lingkungan dan kita harus bisa mengelola wisata. Kita yang punya ikan, kita yang punya laut, dan kita yang paham tentang laut. Kita hanya membutuhkan teman yang bisa memberikan pengetahuan dan teman membangun Maratua. Kalau ada yang tidak mendukung, nanti saya yang akan memberitahu mereka," ujar Darmansyah.

Perlahan tapi pasti, lobi-lobi dengan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil. Masyarakat pun mulai membuka diri untuk kegiatan konservasi. Sebagai salah satu punggawa berpengaruh, Darmansyah banyak mempengaruhi punggawa-punggawa lain untuk berubah.

Upaya yang dilakukan Darmansyah semakin mendapatkan momentum ketika berhasil membentuk kelompok ekowisata. Dia berhasil mengajak bupati menetapkan kawasan Maratua menjadi desa ekowisata. Tekad ini ditindaklanjuti dengan pengukuhan Maratua sebagai desa ekowisata oleh pemerintah pusat. Darmansyah adalah satu dari banyak tokoh penting dalam kerja-kerja KEHATI. Melibatkan unsur masyarakat dalam kerja konservasi akan memberikan dampak positif bagi upaya konservasi.

Dana Abadi Bentang Laut Kepala Burung

Di perairan timur Indonesia, sejak 2017, KEHATI mengawal proses realisasi program konservasi di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua Barat. Bentang laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut global ini sarat jasa ekosistem yang menopang masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menjamin kelestarian ekosistem perairan ini, program konservasi menggunakan model pendanaan jangka panjang dan lestari bernama **Blue Abadi Fund** (BAF).

Blue Abadi Fund merupakan dana perwalian konservasi khusus untuk wilayah perairan ini, yang diinisiasi oleh kemitraan Bentang Laut Kepala Burung. Kemitraan multipihak ini terdiri Conservation International Indonesia, Starling Resources, The Nature Conservancy, WWF Indonesia, dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai dana tahap awal, skema pendanaan ini didukung dana menyusut (sinking fund) dari USAID sebagai partner Blue Abadi Fund.

Tujuan Blue Abadi Fund adalah untuk menyediakan arus pendanaan jangka panjang yang aman dan stabil demi menjamin kelestarian ekosistem dan spesies di Bentang Laut Kepala Burung. Selain itu, juga untuk pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan—termasuk kearifan lokal. Untuk mencapai tujuan itu, Blue Abadi Fund memiliki dua jalur pemberian hibah, yaitu Hibah Utama (*primary grants*) dan Hibah Inovasi (*small grants*).

Hibah diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang sejalan dengan Rencana Strategis Blue Abadi Fund, dengan dua tujuan utama. Pertama, mendukung pengelolaan bersama jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bentang Laut Kepala Burung yang dimandatkan pemerintah. Kedua, di tingkat organisasi sipil lokal, menjalin kolaborasi

yang mendukung upaya konservasi melalui pendidikan lingkungan, konservasi spesies dan ekosistem, penelitian, pembangunan berkelanjutan dan penghidupan pesisir, serta pengembangan kapasitas.

Sebagai administrator Blue Abadi Fund, KEHATI bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan dana hibah kepada mitra lokal. KEHATI juga mengevaluasi kemajuan, kepatuhan penerima hibah, serta melaporkan perkembangannya setiap tahun kepada donor. Capaian pada periode 2017-2018: penyaluran hibah siklus pertama bagi 23 organisasi lokal, dengan total hibah Rp 20,3 miliar.

Blue Abadi Fund telah berkontribusi dalam memastikan penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi perairan dari kabupaten ke provinsi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada siklus pertamanya, dana hibah ini mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pada 2018, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat mengalami peningkatan, sesuai hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).



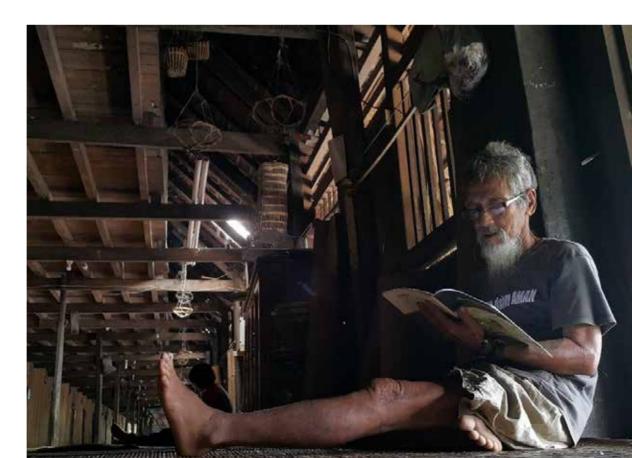
Program Kemakmuran Hijau

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) memiliki peran strategis sesuai dengan visi KEHATI yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat. Berlangsung selama Juli 2015 sampai Maret 2018, program ini memiliki lima aktivitas: perhutanan sosial; pengelolaan pertanian berkelanjutan; energi terbarukan; konservasi gambut, dan penguatan ekonomi untuk kalangan perempuan.

Yayasan KEHATI ditunjuk **Millennium Challenge Account Indonesia** (MCA Indonesia) sebagai manajer program hibah (*grant program manager*) untuk Sumatera dan Kalimantan. Tugas utamanya: mendukung pengelolaan hibah dengan baik. Hal itu dilakukan melalui dukungan bagi penerima hibah agar mampu mengelola program dan keuangan, mematuhi prinsip-prinsip akuntable, termasuk patuh pada kebijakan pada aspek gender, sosial, dan lingkungan.

KEHATI memfasilitasi program senilai lebih dari US\$ 25 juta. Keseluruhan program dilaksanakan 26 mitra yang tersebar di Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Seluruh kerja mitra untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program difasilitasi melalui penguatan kapasitas mitra agar dapat menerapkan prinsip-prinsip hibah secara baik. Program dikelola melalui kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, penilikan naskah laporan, dan kunjungan lapangan.

Hibah ini perwujudan pendekatan bentang alam untuk memastikan ketercakupan dan hasil pengembangan terintegrasi melalui beberapa upaya. Pertama, melindungi sumber daya alam untuk memastikan keberlangsungan investasi energi terbarukan. Kedua, meningkatkan produktivitas rumah tangga dan petani untuk pengembangan ekonomi setempat. Dan ketiga, memberikan peluang dan memastikan entitas setempat dapat berpartisipasi, mengambil manfaat, dan berinvestasi pada bentang alam tertentu.



Salah satu capaian penting program KEHATI-MCA Indonesia adalah perlindungan dan rehabilitasi di sebelas kabupaten sasaran. Salah satunya, pengelolaan ekosistem di daerah aliran sungai yang dikaitkan dengan proyek mikrohidro, air bersih, dan program lain yang relevan.

Selain itu, beberapa mitra juga mengelola ekowisata yang menawarkan ekosistem yang sehat dan pemandangan alam. Beberapa mitra lain berupaya memadukan pengelolaan hutan ke dalam rencana pembangunan desa. Dengan integrasi ini, pemerintah desa dapat berkontribusi dalam pengelolaan hutan, baik melalui skema perhutanan sosial ataupun kemitraan.

Program memberikan manfaat bagi 72 ribu keluarga, serta pelatihan bagi lebih dari 30 ribu orang untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan teknis dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sekitar 151 kelompok tani ataupun asosiasi dibentuk untuk penguatan masyarakat dalam mengelola aset-aset yang dibangun.

Aset-aset ini meliputi 10 pembangkit listrik mikrohidro, 14 pembangkit listrik tenaga surya, dan 32 unit biogas. Seluruh aset ini memberikan manfaat bagi 3.700 keluarga di desa-desa terpencil yang belum terjangkau PLN. Mitra juga membangun keberlanjutan unit manajemen bisnis berbasis masyarakat, termasuk badan usaha milik desa, koperasi, unit pengelolaan listrik mikrohidro, dan kelompok usaha kecil.

Tak hanya itu, juga terdapat lebih dari 45 unit fasilitas infrastruktur dan peralatan produksi untuk mendukung ekonomi masyarakat. Bentuknya mulai dari embung untuk menampung air, pipanisasi air bersih, pusat informasi mangrove, sampai rumah produksi untuk pengolahan produk pertanian dan kehutanan.

Program juga menanam 1,8 juta pohon yang diharapkan memberikan kontribusi bagi penyerapan karbon dan mengurangi efek gas rumah kaca. Penanaman sebagian besar menyentuh area perhutanan sosial, yang izin kelolanya dihasilkan melalui

program.

Hingga tahap akhir, program yang dikelola KEHATI menghasilkan lebih dari 500 jenis produk pengetahuan: video, buku, poster, peta, modul pembelajaran. Beberaoa produk pengetahuan ini diadopsi pemerintah daerah setempat, semisalnya modul pelatihan dan produk praktik pertanian terbaik.



Kisah Berhikmah

"Setelah Terang, Kehidupan juga akan Menerangi"

Bupati Malinau Yansen TP menuturkan hal itu saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal di Lung Barang dan Metut, Kabupaten Malinau. Ungkapan itu nampaknya bukan slogan belaka.

Bayangkan, dua desa terpencil itu berada di pedalaman hutan hujan tropis yang belum banyak tersentuh pembangunan infrastruktur. Sejak Indonesia merdeka, desa di jantung *Heart of Borneo* ini belum terjamah jaringan listrik PLN. Hingga akhirnya, Konsosium CIT dan BIOMA berhasil memasuki desa ini pada akhir 2015.

Pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 106.000 watt ini memberikan napas baru bagi 264 keluarga yang tinggal di kedua desa. Ibu-ibu nampaknya yang paling terpengaruh dengan adanya pembangkit listrik. Kini mereka dapat hidup dengan lebih sehat lantaran tak lagi menghirup asap dari kayu bakar. Bahkan ibu-ibu memperoleh pendapatan tambahan dari produk yang diolah dengan listrik. "PLTS mengurangi biaya belanja minyak, yang memang sangat mahal di Metut," ungkap Martina Ibung, warga Desa Metut. Tak heran, pembangkit listrik tenaga surya memberikan dampak positif bagi penghematan pengeluaran rumah tangga.

Pengelolaan pembangkit listrik ini dinaungi peraturan desa. Dengan dukungan tetua adat, anggaran pemeliharaan dan pemanfaatan pembangkit dikelola kelompok masyarakat setempat. Dengan peraturan desa, selain dari iuran masyarakat, biaya pemeliharaan juga didapat dari anggaran dana desa. Ini mengingat anggaran pemeliharaan terbilang besar, utamanya untuk merawat baterai.

Namun manfaat pembangkit listrik ini jauh lebih besar. Puskesmas pembantu dapat menyimpan vaksin dan melayani kesehatan masyarakat 24 jam. Kini, anak-anak dapat belajar pada malam hari dan ikan sungai hasil tangkapan dapat disimpan lebih lama. Inilah maksud dari pernyataan Bupati Yansen TP itu.



Yang Muda, Yang Peduli

Sepanjang kiprahnya, KEHATI menunjukkan sederet kerja nyata. Di sinilah peran komunikasi diperlukan untuk menularkan pengalaman, pengetahuan, dan hasil kerja KEHATI kepada publik. Harapannya, masyarakat akan terinspirasi, dan akhirnya berkontribusi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Komunikasi juga penting dalam membangun relasi antara KEHATI dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan kegiatan komunikasi, KEHATI selalu bergerak dinamis seturut perkembangan zaman. KEHATI memanfaatkan media sosial untuk mengampanyekan dan mengedukasi publik tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati.

KEHATI mengajak generasi muda sebagai agen perubahan untuk membawa misi pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satunya, melalui gerakan *Biodiversity Warriors*. Memanfaatkan teknologi yang ada, gerakan anak muda ini coba menjangkau pemuda dan pemudi di seluruh negeri.

Gerakan ini untuk mempromosikan keanekaragaman hayati di internet dan media sosial. *Biodiversity Warriors* aktif mendorong lahirnya *citizen scientist* yang mampu memberikan informasi keanekaragaman hayati.

Dari berbagai aktivitasnya, *Biodiversity Warriors* diharapkan memunculkan ideide kreatif untuk aksi konservasi bersama masyarakat. Untuk wilayah perkotaan, *Biodiversity Warriors* menggelar Cap(na)ture untuk memantau keanekaragaman hayati di ruang terbuka hijau. Ada juga *Biodiversity Warriors Journey* atau ekspedisi ke pusat keanekaragaman hayati tinggi untuk pengamatan langsung dan aksi sosial bersama masyarakat sekitar.



Kisah Berhikmah

Geledah Ciliwung

Pagi masih buta, saat kami berdua puluh dengan misi sama telah berada di tepi Sungai Ciliwung Condet, Cililitan, Jakarta Timur. Sesekali kami saling bertukar cerita dan memeriksa ponsel. Tidak terasa jarum jam meluncur cepat. Akhirnya, apa yang kami nantikan tiba, awan mendung memberikan celah untuk sinar mentari menerobos pepohonan.

Ya, pagi itu kami, *Biodiversity Warriors*, hendak "Menggeledah" Sungai Ciliwung Condet, Cililitan, Jakarta Timur. Kegiatan ini bagian dari perayaan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2017 yang jatuh pada 21 Mei. Acara ini diselenggarakan KEHATI bersama *Biodiversity Warriors*, dengan tema *Biodiversity and Sustainable Tourism*.

Gigitan nyamuk menyerang. Namun, itu tidak membuat semangat kami luntur untuk mengamati keanekaragaman hayati Sungai Ciliwung Condet, Cililitan, Jakarta Timur. Di sungai ini, kami mengamati satwa liar dan pepohonan di sepanjang jalur pengamatan dan menyusuri sungai dengan perahu.

Tidak perlu terlalu jauh, baru sekitar 50 meter menyusuri sungai, kami disambut biawak air tawar (*Varanus salvator*) yang sedang berjemur di tepi sungai, dan raja udang meninting (*Alcedo meninting*). Titik pertama pengamatan jatuh pada jejeran loa (*Ficus racemosa*) yang merupakan pohon khas pinggiran sungai.

"Bagian matanya dikelilingi garis hitam!" seru Indeka tiba-tiba.

"Tubuhnya?" balas Ayumitia yang mencatat pengamatan Indeka.

Mata Indeka kembali mengidentifikasi, lalu menyahut, "Tubuhnya berwarna cokelat dengan garis putih di bagian punggungnya." Keduanya kompak bekerja sama dalam pengamatan hari itu.

Catatan pengamatan tersebut dicocokkan dengan foto satwa liar yang ada di buku Geledah Jakarta, Menguak Potensi Keanekaragaman Hayati Ibu Kota yang disusun *Biodiversity Warriors*, Yayasan KEHATI.

Di titik pertama tersebut, kami mengidentifikasi beberapa jenis satwa liar: bunglon taman (Calotes versicolor) yang sedang beristirahat, burung kokokan laut (Butorides striata) sedang mengintai mangsa, dan kupu-kupu Papilio demoleus, sedang terbang mencari bunga.

Matahari semakin naik ke ubun-ubun. Kami mencukupkan pengamatan hari itu. Kami mengidentifikasi 8 jenis herpetofauna, 16 jenis burung, 4 jenis capung, 1 jenis mamalia, dan 10 jenis kupu-kupu.

Biodiversity Warriors merupakan gerakan anak-anak muda yang mengemban misi memopulerkan keanekaragaman hayati Indonesia, serta mengampanyekan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati kepada publik. Gerakan ini diinisiasi KEHATI. Hingga Desember 2017, anggota Biodiversity Warriors tercatat 1.812 orang. Mereka adalah anak-anak muda pada rentang usia 17-30 tahun dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain capture nature, kegiatan Biodiversity Warriors di antaranya: BW Goes to School, menyusun dan mempublikasikan jurnal dan buku, membangun dan memperluas jaringan anak-anak muda peduli keanekaragaman hayati, seminar, serta penelitian.





MENATAP MASA DEPAN

Sejak berdiri pada 1994, KEHATI secara konsisten bekerja keras dalam konservasi keanekaragaman hayati. Konsistensi ini menjadikan KEHATI sebagai lembaga hibah konservasi (conservation trust fund) terkemuka di Indonesia. Berbagai tantangan dan kendala telah menempa KEHATI untuk tetap bertahan dan berkiprah dalam konservasi keanekaragaman hayati.





Selama itu pula, KEHATI menjadi saksi pasang-surut pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. KEHATI menjadi saksi bahwa upaya konservasi sangat dinamis sesuai dengan keadaan nasional dan global. Barangkali itulah takdir: kelahiran dan kiprah KEHATI memang untuk merespons dinamika yang berkembang di tataran global dan nasional. Pun sejatinya, manfaat jasa keanekaragaman hayati melampui batasbatas politik dan negara. Dengan demikian, KEHATI dan jaringannya adalah penghubung antara kesadaran lokal dan global dalam konservasi keanekaragaman hayati.

KEHATI sangat menyadari luasnya dimensi ruang dan waktu konservasi keanekaragaman hayati. Di antara tantangan dengan harapan, KEHATI memetik pelajaran dan pengalaman berharga selama 25 tahun. Pembelajaran inilah yang menjadi bekal KEHATI untuk menatap masa depan.

KEHATI dan jaringannya adalah penghubung antara kesadaran lokal dan global dalam konservasi keanekaragaman hayati Selama perjalanannya, KEHATI telah menumbuhkan kesadaran masyarakat atas nilai penting keanekaragaman hayati bagi kelangsungan hidup manusia. Bekerja dengan banyak pihak dan menjangkau berbagai wilayah ekologis, KEHATI menciptakan jaringan mitra dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam konservasi keanekaragaman hayati.

KEHATI merawat semangat zaman untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya hayati. Tema-tema itulah yang mendominasi wacana yang diusung KEHATI. Wacana yang mengingatkan agar masa kini tidak merampas masa depan generasi mendatang.

KEHATI dan Target Global Keanekaragaman Hayati

Kini, saatnya menyimak arah perkembangan konservasi keanekaragaman hayati di tingkat global. Sebagai lembaga yang lahir dari konteks global dan nasional, KEHATI tak pelak lagi sangat dipengaruhi oleh dinamika internasional.

Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyepakati pencapaian 17 Target Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ini merupakan sasaran global yang mesti dicapai negara-negara anggota PBB pada 2030.

Sasaran SDGs diharapkan dapat mengubah arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Maksudnya, pertumbuhan yang menimbang aspek sosial dan tata kelola yang mencegah kerusakan lingkungan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup lintas-generasi.

Selama ini, program KEHATI telah berkaitan dengan pencapaian SDGs. Utamanya pada target ketahanan pangan, perubahan iklim, konservasi sumberdaya kelautan, dan, pemanfaatan lestari ekosistem hutan. Meski telah menunjukkan kontribusinya, ke depan program KEHATI tetap akan mendukung pencapaian sasaran SDGs.

Keanekaragaman hayati menjadi prasyarat bagi pembangunan karena menjamin kehidupan umat manusia sepanjang masa. Ini tercermin dalam beberapa target untuk mengurangi laju hilangnya keanekaragaman hayati dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati. Sasaran ini dikenal sebagai Aichi Biodiversity Target. Ada dua puluh sasaran global dalam Aichi Biodiversity Target, yang mendukung SDGs, dengan bertumpu pada pembangunan berkelanjutan.

Sasaran Aichi Biodiversity Target dikelompokkan dalam lima tujuan strategis. Pertama, menangani penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati, dengan mengarusutamakan azas konservasi kepada pemerintah dan masyarakat. Kedua, mengurangi tekanan langsung terhadap keanekaragaman hayati, dan mempromosikan pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat status kelestarian keanekaragaman hayati dengan menjaga ekosistem, spesies, dan genetik. Keempat, meningkatkan manfaat keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem bagi semua pihak. Dan kelima, meningkatkan program pelestarian melalui perencanaan partisipatif, pengelolaan pengetahuan, dan peningkatan kapasitas para pihak.





KEHATI dan Megatren Global

Kelestarian keanekaragaman hayati di masa datang dipengaruhi megatren dunia. Kekuatan-kekuatan makro-ekonomi dalam pembangunan global akan berdampak pada bisnis, ekonomi, masyarakat, budaya, dan kehidupan manusia. Tren global ini akan menentukan masa depan dunia dengan laju perubahan yang terus meningkat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun 'Visi Indonesia 2045' yang mengenali megatren dunia, yaitu meningkatnya populasi kelas menengah, persaingan sumber daya alam, teknologi, perubahan iklim, dan urbanisasi.

Nampaknya ke depan, Asia dan Amerika Latin akan mendominasi jumlah kelas menengah – atas yang diperkirakan lebih dari 84 persen populasi dunia. Sementara itu, persaingan dalam memanfaatkan sumber daya alam akan meningkat, seiring meningkatnya peran ekonomi Asia dan Afrika. Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi eksploitasi sumber daya alam di dua wilayah itu.

Kini, masyarakat global berada dalam era revolusi industri 4.0. Era ini didominasi teknologi informasi dan komunikasi, teknologi nirkabel, dan kecerdasan artifisial. Sementara itu bioteknologi, rekayasa genetik, dan energi terbarukan, akan mengubah cara dan pola pemanfaatan sumber daya hayati.

Seiring dengan perkembangan itu, dampak pemanasan global semakin terasa: suhu global meningkat 3 - 3,5 persen, bila tidak ada usaha menurunkan emisi gas rumah kaca. Sementara penduduk dunia yang tinggal di perkotaan diperkirakan mencapai 65 persen, dengan 95 persen pertambahan penduduk kota terjadi di negara-negara berkekuatan ekonomi baru (*emerging economies*).

Mencermati megatren global, dan menimbang 'Visi Indonesia 2045,' KEHATI menatap tantangan dan harapan di masa datang. Pada 2045, Indonesia ditargetkan akan tinggal landas dengan model pembangunan yang bertumpu pada kekayaan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Pada saat itu, keanekaragaman hayati tetap menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia yang inklusif, sejahtera, lestari, dan berkelanjutan.

Kelak, generasi milenial, yang lahir sesudah 1980, akan memimpin Indonesia. Populasi generasi milenial, yang kini dalam rentang usia 15-35 tahun sekitar 80 juta orang. Potensi generasi ini begitu besar: akrab dengan teknologi baru, berdaya beli, dengan kemampuan berinvestasi pada 2020. KEHATI diharapkan mampu merangkul sebanyak mungkin generasi milenial untuk berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Menghadapi perubahan cepat di berbagai bidang, KEHATI perlu mengadopsi berbagai bentuk pengelolaan organisasi yang lebih adaptif, meningkatkan interaksi, dan memperluas jaringan. KEHATI perlu menangkap peluang baru, sembari sigap menghadapi tantangan baru.

Dengan arah 'Visi Indonesia 2045,' KEHATI akan menempuh perjalanan panjang dalam konservasi keanekaragaman hayati. Posisi KEHATI saat ini sedang menatap ke masa depan, dengan memetik pelajaran dari masa lalu.

Sebagai rancangan dalam menghadapi perkembangan zaman, KEHATI menyiapkan diri dengan sejumlah langkah strategis. Dengan mengelola gagasan kreatif yang hidup di dalam dan di luar lembaga, KEHATI menggagas pandangan strateginya pada lembar-lembar halaman berikut ini.

Mengembangkan Warisan KEHATI

KEHATI telah mempraktikkan model-model pengelolaan keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh negeri. Berbekal pengalaman itu, KEHATI akan memperluas cakupan programnya. Posisi saat ini: KEHATI telah menunjukkan kerja-kerja konservasi dengan fokus pangan, energi, kesehatan, dan air (PEKA). Salah satu petikan pelajaran: KEHATI memiliki pengetahuan dan jaringan kerja dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Dengan memperluas cakupan program, KEHATI dapat mewariskan model pengelolaan keanekaragaman hayati bagi Indonesia. Pengembangan cakupan program itu melalui beberapa upaya: advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas, dan penguatan tata kelola sumberdaya alam secara lestari.

KEHATI berpengalaman dalam model pengelolaan keanekaragaman hayati, utamanya pangan lokal, mangrove, dan taman Kehati. Dengan dukungan lembaga donor dan pihak terkait lainnya, kelak KEHATI akan mencurahkan investasi bagi perluasan dan replikasi tiga program strategis tersebut. Harapannya, model pengelolaan yang dikembangkan KEHATI itu dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Menimbang megatren global, KEHATI akan mengembangkan program baru yang inovatif terkait pengelolaan sumber daya genetik (*bioprospecting*), energi baru terbarukan, dan perikanan berkelanjutan. Melalui kerjasama dengan pemerintah, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan terkait, KEHATI akan menginisiasi pengembangan program baru itu sebagai respon atas tingginya kebutuhan, dan melimpahnya ketiga sumber daya itu di Indonesia.

Untuk mempermudah upaya memperluas cakupan program, KEHATI mendokumentasikan pembelajaran dan pengetahuan dari model-model pengelolaan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, KEHATI mendorong model-model pengelolaan itu untuk diadopsi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Dorongan adopsi itu dapat melalui advokasi kebijakan, penguatan kapasitas dan perbaikan tata kelola dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Pengembangan yang tak kalah penting adalah terbentuknya lembaga trust fund baru. Pengalaman KEHATI menunjukkan, trust fund sangat membantu dalam memastikan pendanaan konservasi dalam jangka panjang. Itu salah satu pembelajaran terpenting selama perjalanan KEHATI. Dengan demikian, sebagai Conservation Trust Fund terpercaya, KEHATI sudah pasti akan mendorong pembentukan lembaga trust fund baru untuk mendukung upaya konservasi di Indonesia. Bekerjasama dengan

pemerintah, lembaga donor, dan pemangku kepentingan terkait, KEHATI akan memfasilitasi pembentukan *trust fund* baru, baik yang fokus pada ekosistem, kawasan, maupun spesies tertentu.

Memperkuat Advokasi Kebijakan

Di masa datang, KEHATI berharap kebijakan terkait konservasi keanekaragaman hayati akan semakin menguat. Tentu, kebijakan konservasi di masa datang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai KEHATI dan ilmu pengetahuan.

Harapan itu dilandasi pengalaman panjang KEHATI dalam berjejaring dengan mitra-mitra kerja. Hingga sejauh ini, KEHATI telah menjangkau sekitar 300 ribu penerima manfaat hibah, dua ribu organisasi dan konsorsium masyarakat sipil, serta 5,5 juta hektare wilayah ekologi di Indonesia.

Jangkauan yang luas tersebut merupakan modal jaringan maupun pembelajaran untuk mendorong lahirnya kebijakan konservasi keanekaragaman hayati—terutama terkait pangan, energi, kesehatan, dan air. Cakupan upaya advokasi kebijakan ini menjangkau seluruh jenjang pengambil keputusan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa.

KEHATI akan menempuh kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan terkait dalam advokasi kebijakan publik. Sesuai dengan pengalaman dalam advokasi kebijakan, KEHATI akan lebih proaktif dalam proses penyusunan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, terbuka peluang untuk mendorong adopsi model pengelolaan yang telah dikembangkan KEHATI.

Mencermati cepatnya arus komunikasi saat ini, KEHATI akan mengembangkan data, informasi, maupun pengetahuan lintas-disiplin sebagai dasar argumen 'counter discources' pembangunan. Tentu saja, sesuai dengan era digital yang terbuka, khalayak dapat mengakses data, informasi, dan pengetahuan tersebut. Seluruh narasi pengetahuan tersebut akan menjadi posisi KEHATI dalam menanggapi tantangan pembangunan.

Karena itu, KEHATI memandang penting penerbitan *policy brief* konservasi keanekaragaman hayati. *Policy brief* ini dihasilkan melalui diskusi bernas bersama pakar, akademisi, budayawan, pemuka agama dan tokoh lain. Dengan demikian, sangat penting untuk membangun jejaring konservasi dengan kalangan akademisi, pemerintah, praktisi, organisasi masyarakat sipil, pemuka agama, dan sektor swasta pada tataran nasional, regional, dan internasional.

Jangkauan KEHATI bersama mitra kerja

300 ribu penerima

manfaat hibah

2

organisasi dan konsorsium masyarakat sipil

5,5 juta hektare wilayah ekologi di Indonesia

Menjangkau Berbagai Kalangan

Seperti disinggung di atas, KEHATI harus mampu merangkul generasi milenial untuk turut berkontribusi dalam konservasi. Generasi millenial—dan generasi berikutnya—akan memegang tampuk kepemimpinan Indonesia di masa mendatang.

Generasi ini akan menjadi kelas menengah perkotaan yang menguasai berbagai bidang pembangunan. Kendati hidup di perkotaan, mereka mengenal konservasi dan lingkungan hidup melalui internet dan media sosial.

Sementara itu, puluhan juta masyarakat lokal akan menggantungkan hidupnya secara langsung pada sumber daya hayati. Di sisi lain, bila terjadi kerusakan lingkungan, masyarakat lokal yang paling merasakan dampak buruknya.

Jadi ada setidaknya ada dua arus utama: generesi milenial perkotaan yang 'melek' isu lingkungan, dan masyarakat lokal yang bersentuhan langsung dengan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, untuk menyikapi hal itu, KEHATI akan merangkul seluruh rentang generasi dari berbagai kalangan. KEHATI akan menjangkau anak-anak muda, masyarakat urban, masyarakat lokal, seniman, budayawan, pemuka agama, pemuka adat, dan sosok lain yang bereputasi untuk mengarusutamakan konservasi keanekaragaman hayati.

KEHATI menempuh strategi dengan mengembangkan platform gerakan kaum muda di tingkat lokal sampai nasional, dan menumbuhkan pemimpin muda untuk menjadi agen perubahan. Cakupan penyadartahuan untuk menanamkan nilai-nilai konservasi menyentuh banyak kalangan: pendidik, agamawan, budayawan dan cendekiawan. Tentu saja, seperti telah dilakukan selama ini, dilakukan KEHATI juga akan menyertakan kalangan bisnis, dengan meningkatkan komitmen mereka terhadap konservasi keanekaragaman hayati.

Yang tak bisa ditinggalkan: eksponen kaum muda yang berada di perguruan tinggi. Kaum milenial terdidik ini berpotensi besar menjadi basis gerakan konservasi keanekaragaman hayati. Potensi ini bisa digerakkan dengan penyadartahuan tentang konservasi.

Generasi mileneal yang berada di perkotaan berpotensi untuk menjadi konsumen kritis dalam mendukung produk-produk ramah lingkungan. Ada eksponen lain di kalangan muda, yaitu warganet atau *netizen*. Warganet yang didominasi kaum milenial ini hidup dalam dunia maya dengan akses informasi yang luas.

Dengan menggunakan sisi positifnya, dunia internet menyediakan ruang sebagai media penyebaran informasi. Peluang ini bisa dimanfaatkan KEHATI sebagai wahana kampanye melalui situs dan media sosial. Di masa kini, dan mendatang, telah terbukti suara warganet mampu mempengaruhi arah kebijakan. Dengan demikian, era digital menuntut KEHATI untuk mengembangkan konsep kampanye inovatif tentang konservasi keanekaragaman hayati. KEHATI bisa menonjolkan narasi konservasi melalui isu-isu kekinian yang relevan untuk mempengaruhi opini dan kebijakan publik.

Lebih Inovatif dan Kreatif

Tantangan konservasi keanekaragaman hayati di masa datang akan lebih pelik, sementara dana hibah amat terbatas. Terlalu banyak tantangan, terlalu sedikit sumber daya. Pembelajaran mengelola dan menghimpun dana menyadarkan KEHATI perlunya penggalangan dana dan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif dan beragam.

Pun, KEHATI akan merangkul industri keuangan. KEHATI percaya industri keuangan sebagai mata rantai pokok dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Oleh sebab itu, KEHATI akan secara lebih signifikan mendorong diadopsinya cara berinvestasi yang ramah lingkungan dan sosial di pasar modal Indonesia. Upaya ini mencakup juga membangun kerjasama dengan berbagai manajer investasi terkemuka dan pelaku industri keuangan lainnya. KEHATI, misalnya, ingin melihat aset dari produk investasi yang ramah sosial dan lingkungan tumbuh setidak-tidaknya tiga kali lipat dalam lima tahun ke depan.

Saat ini telah berkembang berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan dan pendanaan konservasi seperti *impact investing, blended finance, crowd funding, venture philanthropy,* dan berbagai inovasi lainnya. Inisiatif-inisiatif ini semakin berterima, dan mendapatkan dukungan luas baik dari kalangan filantropi, *development agencies,* maupun investor dan institusi keuangan komersial. Karena itu, dalam rangka memperluas upaya intervensi di sektor keuangan, KEHATI akan aktif mengekpslorasi, mendorong, dan memfasilitasi terbentuknya *impact investment fund* domestik yang berorientasi konservasi di Indonesia.

Yang tak kalah penting, upaya-upaya dalam merangkul industri keuangan ini diharapkan dapat membuka akses sumber-sumber pendanaan selain hibah bagi mitra-mitra KEHATI. Dengan demikian, mitra memiliki sumber pendanaan alternatif dan lanjutan untuk menjaga keberlanjutan dari program-program yang telah dibangun dan dikawal bersama.

Memperkokoh Lembaga

Dari sisi internal kelembagaan, KEHATI akan mengokohkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan program-program strategis. Kinerja organisasi dipengaruhi beberapa faktor pendukung *core business* lembaga, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, pendanaan, tata hubungan kerja, instrumen monitoring dan evaluasi, serta manajemen sistem informasi dan pengetahuan. Untuk mampu menangkap peluang sembari menghadapi tantangan di masa depan, KEHATI selayaknya membangun sistem kelembagaan yang efektif, efisien, dan adaptif untuk meningkatkan kinerja lembaga.

Penutup

Pandangan strategis tersebut membekali KEHATI dalam menempuh jalan panjang konservasi keanekaragaman hayati di masa datang. Pembelajaran selama 25 tahun menegaskan betapa penting untuk bersikap adaptif dan inovatif baik dalam pengelolaan program maupun penggalangan dana.

Di balik segala capaian selama ini, KEHATI menyadari bidang keanekaragaman hayati memilik dimensi ruang dan waktu yang luas. Karena itu, sejak sekarang, KEHATI telah menyiapkan diri untuk menatap Indonesia di masa depan.

Tantangan sudah ada di depan mata: perubahan iklim, pemanasan global, dar ancaman menyusutnya keanekaragaman hayati. Bahkan dampaknya telah dirasakar masyarakat pesisir. Tapi KEHATI punya bekal pengalaman dan pembelajaran dar pengembangan program prioritas pangan, energi, kesehatan dan air.

Namun KEHATI juga memahami kiprah selama 25 tahun baru menyentuh secui dari keanekaragaman hayati Indonesia yang berlimpah ruah. Pekerjaan rumah masih menanti di masa datang dengan segala tantangan dan peluangnya.

Intinya, paradigma KEHATI adalah memanfaatkan dengan memperkaya nilai tambah keanekaragaman hayati demi keberlanjutan hidup masyarakat. Bukan memanfaatkan dengan cara memungut dan menggali. Yang terakhir ini cara eksploitatif: menghabiskan dan merampas masa depan anak-anak bangsa.

KEHATI memahami, anak-anak bangsa dari elemen generasi muda yang akan menghadapi tantangan dua atau tiga dekade ke depan—bahkan sepanjang masa. Karena itu, KEHATI akan terus mencurahkan upayanya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat madani yang menjadi garda depan dalam membangkitkan kemandirian masyarakat lokal. Kuncinya adalah peningkatan kapasitas untuk membekali pengetahuan masyarakat dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Dengan kapasitas yang memadai, akal budi masyarakat Indonesia akan mampu memecahkan segala persoalan hidup dengan bertumpu pada sumber daya hayati Keanekaragaman hayati akan tetap menjadi tumpuan bagi kehidupan bangsa sepanjang masa ***

Daftar Pustaka

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* 2015 2020. Jakarta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia* 2014. Jakarta
- Loebis, A. & T. Hadad. 2015. Inspirasi Seorang Pembangun Institusi, Setengah Abad Membesarkan Organisasi Masyarakat dan Lingkungan. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Maxim, S., Hadad, I., & Sitorus, S. 2003. *Membangun Dana Cadangan Abadi bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Kasus KEHATI.* The Synergos Institute dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta.
- Supriatna, Jatna. 2018. Konservasi Biodiversitas, Teori dan Praktik di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Yayasan KEHATI. 2003. Agar KEHATI Masuk ke Hati, Memoir 20 Anggota Dewan Penyantun Yayasan KEHATI Periode 1994 – 2003.
- Yayasan KEHATI. 2006. Merekam Jejak Mitra, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat. Jakarta.

Dokumen Yayasan KEHATI

- Laporan Tahunan Annual Report 1996
- Laporan Tahunan Annual Report 1997
- Laporan Tahunan Annual Report 1999
- Laporan Tahunan Annual Report 2000
- Laporan Tahunan Annual Report 2004/2005
- Laporan Tahunan Annual Report 2007
- Laporan Tahunan Annual Report 2008
- Laporan Tahunan Annual Report 2009
- · Laporan Tahunan Annual Report 2011
- Laporan Tahunan Annual Report 2012
- Laporan Tahunan Annual Report 2014
- Laporan Tahunan Annual Report 2015
- Annual Report 2016
- Annual Report 2017
- Annual Report 2017 TFCA-Sumatera
- Laporan Kegiatan TFCA-Sumatera, Semester II Januari Juni 2018
- Laporan Kegiatan TFCA-Sumatera, Semester II Juli Desember 2018
- Ikatan Pemahaman dan Harapan Renstra 2008 2012. Jakarta.
- Strategic Plan 2013 2017
- Rencana Strategis 2019 2023, Keanekaragaman Hayati Mengabdi untuk Kelestarian Negeri. Jakarta.
- Final Report of a Ten Year Cooperation with The United States Agency for International Development. KEHATI dan USAID,







Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720 - INDONESIA Telp. 62-21-718 3185 Fax. 62-21-719 6131 www.kehati.or.id